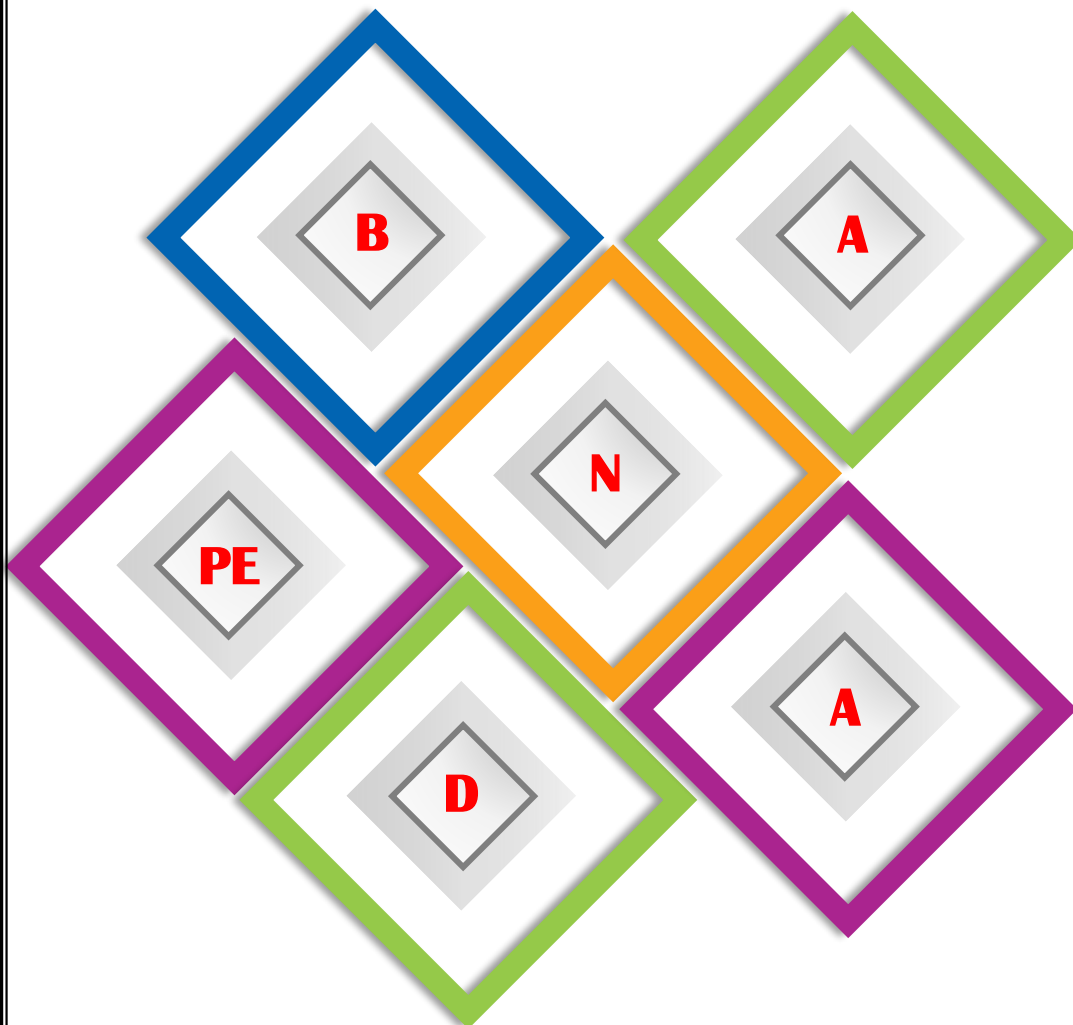




BAPENDA
SUMATERA SELATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN III

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN JL. POM IX KAMPUS PALEMBANG**
TELP. 0711 – 310633 FAX 0711 – 319819 KODE POS 30137

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan III tahun anggaran 2025 merupakan periode awal pelaporan kinerja jangka menengah pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029, yang memuat mengenai capaian kinerja, hambatan dan solusi dalam mencapai kinerja serta rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dokumen LKjIP yang disusun secara berjenjang antar unit eselon yang mendukung kinerja Eselon II dan/atau tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama pelaksanaan tahun 2025.

Tujuan dan sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan memperhatikan permasalahan (*strategic issue*) dan capaian pendapatan daerah serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam Dokumen Perencanaan Kinerja. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah serta dinamika perkembangan perekonomian baik dalam skala regional maupun nasional

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Perangkat Pemerintah Daerah mengemban tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

Sebagai perangkat daerah di bidang pemungutan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan

kewenangan yang ada. Dalam melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya pemungutan pajak-pajak daerah provinsi telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Seiring tuntutan agar setiap organisasi publik selalu terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka organisasi publik harus membuat suatu Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah (Strategik Plan), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja diharapkan organisasi mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih fokus. Dokumen Perencanaan Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan strategi pencapaiannya.

Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang harus dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Perencanaan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

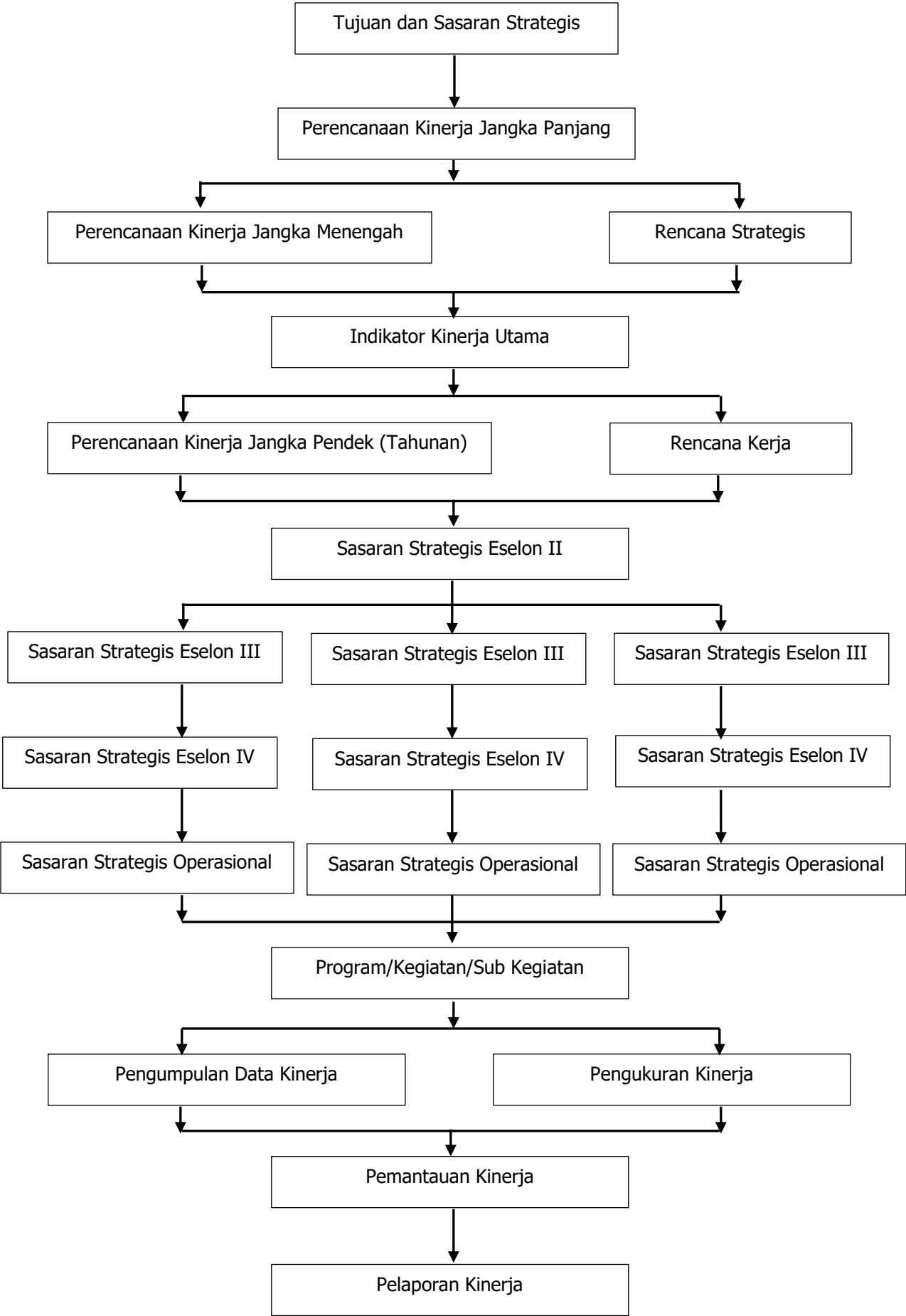
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kondisi realisasi kinerja dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah dalam kurun waktu jangka pendek. Dokumen ini menyediakan dasar bagi *core business* organisasi secara *sustainable* untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja tahunan selanjutnya.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dari sebuah sistem penganggaran dari Perangkat Daerah. Kaitan dengan anggaran berbasis kinerja tetap harus dipertimbangkan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran

Perangkat Daerah dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

Dalam upaya menggali dan memanfaatkan segenap potensi yang ada di bidang Pendapatan Daerah yang dalam pelaksanaannya telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta mempunyai kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan.

Sehingga secara sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan rangkaian proses yang terstruktur dan terarah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sub urusan pendapatan. Adapun bagan alir proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar pada bagan alir berikut ini:



B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi

Secara rinci tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang keuangan sub pendapatan daerah.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;
- Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

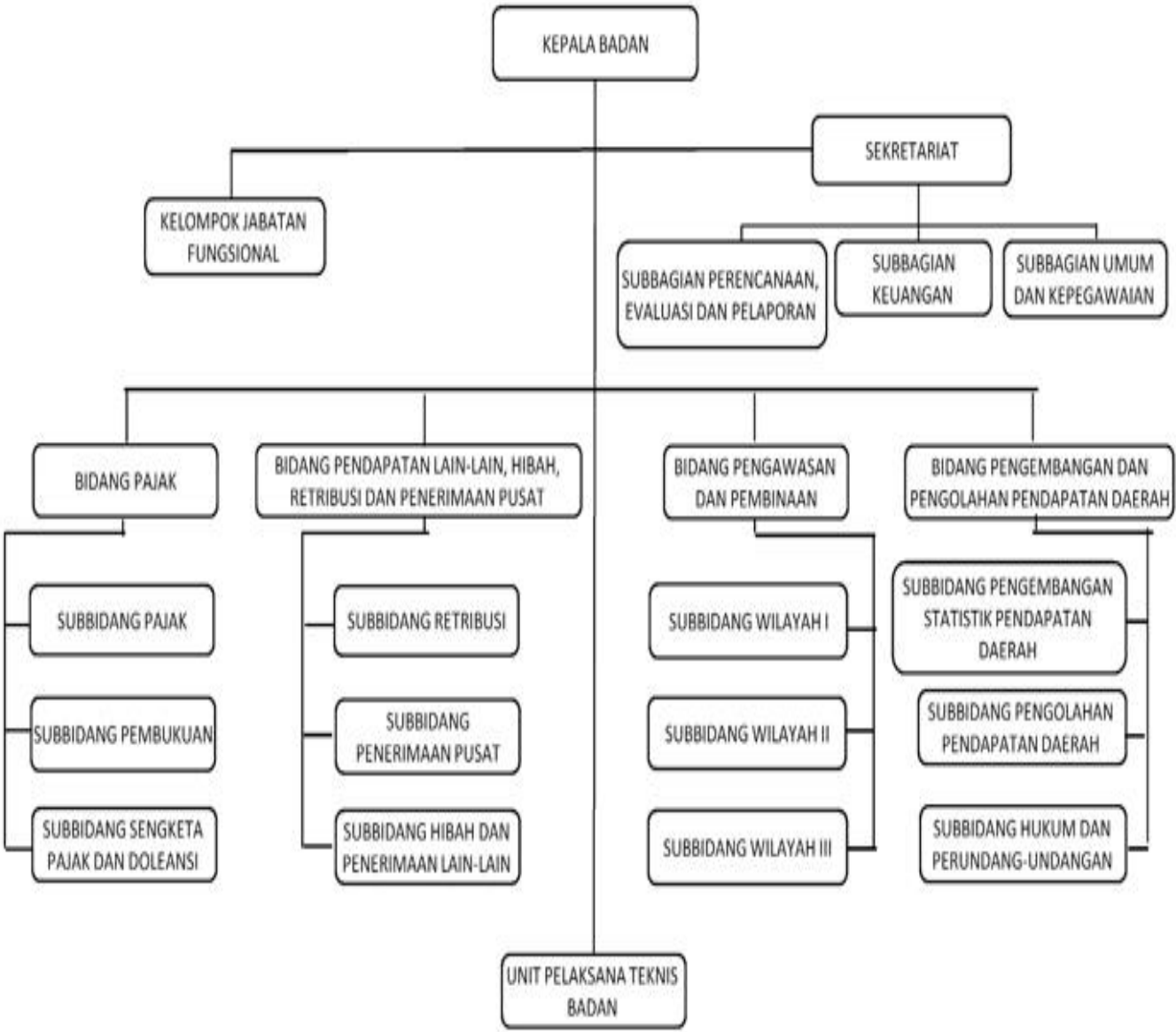
3. Struktur Organisasi

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 dimana struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disusun sebagai berikut:

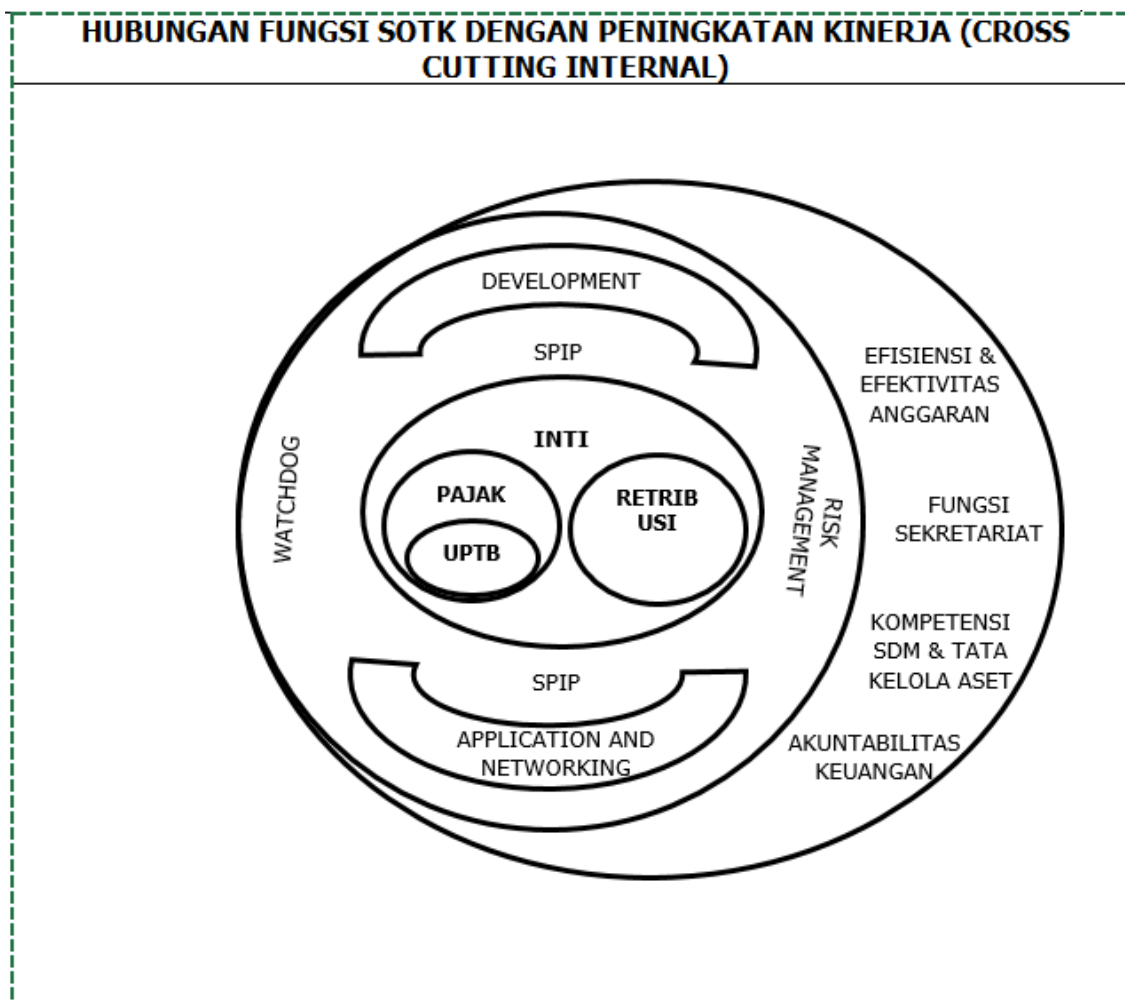
- Kepala Badan
- Sekretariat, membawahi:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Subbagian Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Bidang Pajak, membawahi:
 - Subbidang Pajak
 - Subbidang Pembukuan
 - Subbidang Sengketa Pajak dan Doleansi
- Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat membawahi:
 - Subbidang Retribusi
 - Subbidang Penerimaan Pusat
 - Subbidang Hibah dan Penerimaan Lain-lain
- Bidang Pengawasan dan Pembinaan, membawahi:
 - Subbidang Wilayah I
 - Subbidang Wilayah II
 - Subbidang Wilayah III
- Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - Subbidang Pengembangan Statistik Pendapatan Daerah
 - Subbidang Pengolahan Pendapatan Daerah
 - Subbidang Hukum dan Perundang-undangan
- Unit Pelaksana Teknis Badan
- Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Tata Kerja

Yang dimaksud tata kerja dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini adalah terciptanya hubungan kerja yang kolaboratif antar unit kerja (*internal cross cutting*) untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Hubungan tata kerja yang kolaboratif tersebut digambarkan pada gambar berikut:



Hubungan tata kerja (*internal cross cutting*) sebagai berikut:

1. Bidang Pajak – Bidang P2PATDA Kolaborasi

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA) dengan Bidang Pajak, dimana Bidang P2PATDA menggali potensi melalui analisa pengembangan terhadap sumber – sumber dan inovasi dalam pajak daerah, sementara Bidang Pajak membuat kebijakan di sektor pajak antara lain insentif fiskal daerah, kebijakan equivalen dan opsen PKB serta opsen BBN-KB

Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah (P2PATDA) dengan Bidang Pendapatan Lain Lain, dimana Bidang P2PATDA menggali potensi melalui analisa pengembangan terhadap sumber – sumber dan inovasi dalam retribusi daerah, sementara Bidang Retribusi membuat kebijakan di sektor retribusi antara lain kemudahan dan transparansi dalam pengelolaan retribusi.

2. Bidang Pajak – Bidang Wasbin Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pengawasan, pengendalian intern, pemeriksaan terhadap pemungutan pajak daerah sehingga mengurangi risiko atas kesalahan dan berakibat menimbulkan kerugian daerah dalam pengelolaan pajak daerah.

3. Bidang Pajak – UPTB Puslia Kolaborasi

UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi (Puslia) menjalankan kebijakan di sektor pajak daerah (Bidang Pajak) dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen di Bidang Pajak, antara lain Sistem Pembayaran Pajak melalui e Dempo, SOS, e signal, SIAPO, e PAP, e PAB, Sistem Pembayaran Pajak melalui e commerce (Tokopedia, Bli Bli.com, Indomaret dan Alfamart).

4. Bidang Wasbin – UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kolaborasi

Bidang Pengawasan dan Pembinaan (Wasbin) melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara intensif atau secara berkala kepada UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan penetapan pajak daerah.

5. Dan lain lain Bentuk Kolaborasi Antar Unit Kerja

Sekretariat sebagai koordinator, melakukan internal cross cutting terhadap semua Bidang/UPTB untuk pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), kebutuhan anggaran serta kebutuhan sumber daya lainnya dalam meningkatkan kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Hubungan tata kerja (*eksternal cross cutting*) sebagai berikut:

Kelompok sasaran layanan yang menjadi mitra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain kelompok sasaran wajib pajak kendaraan, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Dukungan stakeholder yang menjadi mitra Bapenda sangat diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah, antara lain:

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi mitra Bapenda dalam hal register nomor kendaraan bermotor.

B. Jasa Raharja

Penggunaan sebagian dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari wajib pajak dapat digunakan sebagai bentuk *corporate social responsibility* untuk kegiatan memberikan *pelayanan di samsat*.

C. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penggunaan data terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan sangat memudahkan bagi petugas samsat untuk melihat data tunggakan pajak kendaraan, pajak progresif dan lain sebagainya.

D. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagai mitra Bapenda dapat berkontribusi terhadap penyediaan data kendaraan sebagaimana diatur dalam Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 49431) untuk jenis angkutan barang umum dengan rekomendasi TNKB Umum serta penggunaan kendaraan dengan nomor kendaraan di luar Provinsi Sumatera Selatan lebih dari 90 hari beroperasi di Sumatera Selatan dapat dilakukan mutasi masuk ke Provinsi Sumatera Selatan.

E. OPD Pemangku Retribusi

Beberapa OPD yang secara kewenangannya sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain : Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Bappeda, Pertanian TPH, Ketahanan Pangan dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral, Perkebunan, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pendidikan, PU Bina Marga dan Tata Ruang, Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata, BPSDM, Badan Penelitian dan Pengembangan serta BPKAD.

Sebagai OPD yang mengelola pendapatan daerah, Bapenda mendorong OPD pemangku retribusi untuk berinovasi menggali sumber – sumber retribusi yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

F. BUMN/BUMD/BUMS

Keberadaan BUMN/BUMD/BUMS sebagai pihak yang bermitra dengan Bapenda memberikan kontribusi dalam penerimaan pendapatan daerah dari sisi penerimaan pajak air permukaan serta penyertaan modal bagi BUMD Provinsi Sumatera Selatan.

G. Perbankan

Pihak perbankan dalam hal ini Bank Sumsel Babel sebagai mitra Bapenda dalam hal akuntabilitas penerimaan pajak dan retribusi daerah.

C. **Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama** (*Strategic Issued*)

Aspek strategis keberadaan organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melihat perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelola kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntable. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Sementara mobilisasi pendapatan (*revenue mobilization*) daerah merupakan salah satu strategi yang mencerminkan kemandirian otonomi daerah dalam mendanai pembangunan dengan mengutamakan sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Provinsi yang meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sementara permasalahan-permasalahan (*Strategic Issued*) yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

1.a Tata kelola organisasi belum optimal;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi UPTB Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya dua peraturan ini semestinya pengelolaan organisasi terutama terkait pemerataan pegawai/sumber daya manusia pada seluruh unit kerja/UPTB bisa dioptimalkan, namun kondisi pada saat ini belum bisa optimal dikarenakan belum meratanya distribusi pegawai/SDM pada seluruh unit kerja/UPTB Bapenda.

1.b Belum optimalnya upaya intensifikasi pendapatan daerah diluar pajak

Apabila dilihat dari pencapaian penerimaan pendapatan daerah pada komponen PAD tahun 2025, kontribusi terbesar adalah sektor pajak dengan rata-rata kontribusi 89,31% sedangkan non pajak hanya berkontribusi 10,69 %. Dari komposisi pembentuk PAD ini dapat diketahui bahwa PAD Prov.Sumsel sangat bergantung pada sektor pajak, sementara kontribusi dari retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (pengelolaan BUMD) masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya pengelolaan

pendapatan sektor non pajak terutama sektor retribusi dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD), sehingga dibutuhkan upaya, inovasi dan kebijakan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber PAD dari retribusi dan pengelolaan BUMD.

1.c Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi

Kemajuan teknologi selayaknya dapat kita manfaatkan untuk mempermudah seluruh aktivitas, begitu juga dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kebutuhan akan sistem/aplikasi yang mumpuni mutlak diperlukan untuk menunjang pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan Bapenda bersama dengan mitra kerja pengelolaan pendapatan daerah yakni institusi Polri, Jasa Raharja dan Bank Sumselbabel dalam pengelolaan SAMSAT. Untuk pengelolaan Non SAMSAT dilakukan bersama institusi Sat POL PP, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan BUMD. Pembangunan/Pengembangan sistem teknologi informasi pendapatan daerah mutlak harus dilakukan untuk dapat mengakomodir seluruh kebutuhan institusi mitra pengelolaan pendapatan daerah serta kebutuhan masyarakat untuk dapat menciptakan layanan prima terhadap masyarakat dalam bidang pendapatan daerah. Dengan adanya aplikasi/sistem yang mumpuni dengan segala kemudahannya maka akan terwujud pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien yang pada ujungnya akan mampu mendorong pencapaian pendapatan daerah. Saat ini Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan masih tentang pada pengelolaan Samsat, Untuk pengelolaan Non Samsat belum terintegrasi dalam Aplikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dikembangkan.

1.d Perlu adanya revisi Peraturan Daerah terkait belum terakomodirnya upaya-upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Daerah serta peraturan-peraturan daerah lainnya terkait dengan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah sehingga diperlukannya kegiatan pemetaan potensi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang akan diakomodir dengan aturan yang berlaku.

- 1.e Kurangnya kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia
- Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi aspek penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya manusia yang berkompetensi dapat memberikan gambaran analisis serta dapat menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerah.
- 1.f Pengawasan internal belum berbasis risiko
- Manajemen wajib menganalisis risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen agar memfokuskan pengambilan kebijakan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah, keuangan, SDM ataupun standarisasi mutu pelayanan. Peran pengawasan dan pembinaan dalam konteks Satuan Pengawas Internal Organisasi sangat diperlukan.
- 1.g Belum optimalnya penerapan dan evaluasi SOP kepada wajib pajak dengan program penjaminan mutu pelayanan
- Pelayanan terhadap wajib pajak harus berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan. Standarisasi pelayanan di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan belum dilakukan dengan baik sehingga perlu dilakukan upaya perumusan, penyusunan, pengaplikasian dan pengevaluasian standar-standar pelayanan yang merupakan bagian dari pengawasan dan pembinaan organisasi.
- 1.h Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak.
- Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dan UPTB masih belum sesuai standar yang berlaku.
- 1.i Peta proses bisnis internal belum dilaksanakan secara optimal
- Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pencapaian standar Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.

Peta proses bisnis mengumpulkan seluruh informasi dengan melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan proses bisnis disusun. Peta Proses Bisnis menjadi standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, selain itu peta proses bisnis dapat digunakan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses menjadi lebih terarah.

- 1.j Jangkauan pemberian pelayanan kepada wajib pajak masih belum optimal.

Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan dinamika keberadaan wajib pajak yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Sumatera Selatan, termasuk wilayah *captive area* menjadikan tantangan tersendiri dalam mengejar target pendapatan daerah dari sisi pajak daerah. Pembentukan unit layanan saat ini sudah 29 unit layanan yang tersebar dalam wilayah 17 kabupaten/kota se Sumatera Selatan dirasakan belum juga optimal dikarenakan berada di pusat kota, sementara jangkauan layanan wajib pajak menyentuh wilayah perairan pedalaman Sumatera Selatan.

- 1.k Belum optimalnya digitalisasi pembayaran pajak daerah

Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan elektronifikasi pemerintah daerah antara lain digitalisasi pembayaran pajak daerah belum memadai. 7 (tujuh) kanalisasi dalam pembayaran non tunai yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat segera terpenuhi pada pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Permasalahan Eksternal

- 2.a Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam mematuhi kewajiban terhadap pembayaran pajak sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Daerah. Upaya sosialisasi dan penyuluhan pajak yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir belum banyak meningkatkan kesadaran wajib pajak.

- 2.b Masih rendahnya kontribusi instansi pengelola retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah;

Dari 13 (tiga belas) Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah pada tahun 2025, sudah 10 (delapan) Perangkat Daerah yang capaian realisasinya melebihi target ($>100\%$) dan 3 Perangkat Daerah lainnya belum mencapai target ($<100\%$). Upaya intensifikasi koordinasi dengan Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah telah dilakukan secara optimal hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi yaitu sebesar Rp. 8.283.459.488,00 (110,67%) dari target sebesar Rp. 7.484.658.673,00.

2.c Iklim ekonomi yang tidak stabil

Adanya pengaruh resesi pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* sehingga menyebabkan iklim ekonomi masyarakat tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan penurunan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan baru yang berdampak terhadap penerimaan pajak serta terjadinya tunggakan Pajak Daerah sehingga penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak optimal.

2.d Belum optimalnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sumbangan pihak ketiga sebagai salah satu unsur penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan hibah sehingga tidak dapat ditargetkan. Realisasi penerimaan merupakan hasil pendekatan persuasif kepada BUMN, BUMD ataupun BUMS yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2.e Pengaruh kebijakan nasional dibidang keuangan pusat dan daerah.

Amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pendapatan daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang dimaksud, adanya opsen sebagai tambahan pungutan pajak menurut persentase tertentu, Bea Balik Nama (BBN) Mutasi pajak yang di gratiskan, namun ada juga tambahan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta beberapa potensi retribusi yang hilang di beberapa OPD terkait.

- 2.f Operasional alat angkutan berat atau kendaraan barang banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan.
Perlu adanya pengaturan operasional angkutan barang dari sisi hulunya, sehingga kendaraan angkutan barang yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan ikut berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 2.g Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB
Pada tanggal 05 Januari 2025 mulai dilaksanakannya opsen PKB dan Opsen BBN-KB, dimana penerimaan bagi hasil dari pajak PKB dan pajak BBN-KB ke Kabupaten/Kota dilaksanakan secara real time split payment ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota sebesar 66 persen dari hutang Pokok PKB dan BBN-KB.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

E. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan terhadap pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini dimaksudkan untuk :



1. Mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan *good government* karena LKjIP merupakan dasar untuk mengatur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis, dan dapat di pertanggungjawabkan;
2. Sebagai monitoring dan evaluasi secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah terhadap target yang telah ditetapkan dalam *cascading* dokumen Renstra tahun 2025-2029;
3. Sebagai *early warning*, atas hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya;
4. Memberikan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) dengan instansi pemerintah;
5. Untuk mengukur kuantitatif terhadap indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja outcomes, indikator kinerja proses, indikator kinerja output secara periodik berkala waktu tahunan, triwulanan dan bulanan untuk memastikan indikator tersebut menjawab *critical success factor*.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Uraian maksud diatas menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan program perencanaan strategis dan sekaligus merupakan pengukuran terhadap pelaksanaan dari semua program kegiatan serta sub kegiatan sehingga dapat mengetahui sampai sejauh mana pencapaian kualitas kinerja pada tahun 2025.

Sementara tujuan disusunnya LKjIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu penyusunan LKjIP juga mengacu dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyajian penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

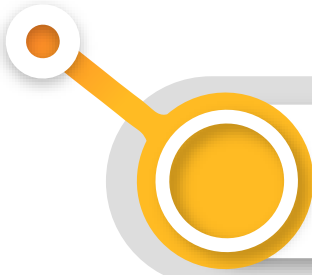
B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Telaaha Visi dan Misi

Perencanaan Kinerja berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilaksanakan dengan upaya 4 (empat) misi yaitu, (1) menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional, (2) meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, (3) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan (4) meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

Arah Pembangunan tahap pertama dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini difokuskan untuk memantapkan perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan. Fokus pembangunan ini dilaksanakan melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sesuai fokus pembangunan maka arah pembangunan tahap I melingkupi beberapa poin sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan
2. Peningkatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif
3. Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).

4. Peningkatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
5. Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.
6. Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.
7. Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah.
8. Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata dan budaya.
9. Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk.
10. Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.
11. Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
12. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
13. Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.
14. Penguatan Toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestarikan warisan budaya lokal dan nasional.
15. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
16. Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
17. Pengembangan teknologi di bidang pangan dan air untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Alam.
18. Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Misi ke 2 (dua) "Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat". Selanjutnya misi ke 2 (dua) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi pertanian, perikanan dan perkebunan melalui akses ketersediaan sarana produksi.
2. Membuat regulasi daerah tentang tata niaga dalam rangka proteksi sektor pertanian.
3. Mendorong percepatan reforma agrarian tingkat daerah.
4. Meningkatkan dan memperluas akses pasar dengan memaksimalkan fungsi koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok BUMN/BUMD, BUMDes dan swasta melalui program kemitraan.
5. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan lapangan kerja.
6. Mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar regional dan global.
7. Mengendalikan inflasi dengan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia Cabang Sumatera Selatan.
8. Melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi antar kawasan guna memperlancar arus barang dan jasa antar daerah.
9. Mendukung program restorasi lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
10. Mendukung upaya menjaga ekosistem laut, daerah pesisir dan hutan mangrove.
11. Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
12. Melanjutkan revitalisasi pasar-pasar tradisional.
13. Mendorong program replanting perkebunan sawit dan karet rakyat.
14. Melanjutkan program sambung pucuk kopi guna peningkatan produksi.

Berdasarkan penelaahan visi dan misi RPJMD tahun 2025-2029 diatas, maka pilar pembangunan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dari sisi Pendapatan Daerah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Pilar Kinerja Bapenda

“.....Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Kualitas Pembangunan Sumatera Selatan yang adil merata.....”

Nilai nilai dalam pilar kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Kapasitas Fiskal Daerah yang terus meningkat dan berkembang, menunjukkan bahwa daerah kinerja sisi pendapatan daerah harus optimal dengan potensi kemampuan daerah yang ada;
2. Ruang konsolidasi dan harmonisasi fiskal Pusat dan Daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berbasis inovasi, keunggulan dan daya saing, mengurangi ketergantungan Transfer ke Daerah (TKD) dengan menciptakan investasi, penguatan basis pajak daerah;
3. Implementasi dan menciptakan impact Indikator Kinerja Utama dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4. Dimensi Pembangunan Kinerja:
 - a. *Customer Perspektif*, dengan melaksanakan:
 - ❖ Penguatan Basis Pajak Daerah,
 - ❖ Sinergi dan Kolaborasi
 - ❖ Kepatuhan Wajib Pajak
 - ❖ Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pembayaran

b. Internal Process, dengan melaksanakan:

- ❖ Program Prioritas Daerah
- ❖ Peningkatan nilai outcomes kegiatan sub kegiatan
- ❖ Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
- ❖ Analisis deviasi keterlambatan pelaksanaan

c. Learning and Growth, dengan melaksanakan:

- ❖ Pengawasan secara intensif berbasis skala risiko dan skala dampak
- ❖ Menggali potensi PAD berbasis kemampuan daerah
- ❖ Kelembagaan organisasi yang kuat
- ❖ Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Berdasarkan Visi dan Misi diatas maka tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang Pendapatan Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah atau Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan dalam matriks tahapan sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

1. Unit Eselon II Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon II						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	1,95	2,02	2,09	2,15	2,21	2,28	2,28
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	%	5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51	8,51
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	0,434	0,458	0,465	0,478	0,498	0,520	0,520
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	%	1,26	1,28	1,32	1,38	1,42	1,48	1,48
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,25	1,252	1,256	1,258	1,260	1,270	1,270
5.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	48,45	49,89	51,32	52,76	54,20	55,64	55,64
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	92,03	92,21	NA	NA	NA	NA	NA
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	%	0,96	0,98	NA	NA	NA	NA	NA
		Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,12	1,18	NA	NA	NA	NA	NA

2. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Pajak						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	%	1,61	1,73	1,81	1,84	1,93	1,96	1,96
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,53	14,81	14,91	15,02	15,19	15,28	15,28
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,19	5,02	4,93	4,88	4,71	4,62	4,62
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100	100	100	100	100	100	100

3. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang PDLL						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	%	95,12	95,43	95,67	95,84	95,93	96,00	96,00
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,45	89,78	89,85	89,91	89,97	90,08	90,08
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,71	83,93	84,06	84,17	84,27	84,39	84,39
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,42	84,83	84,94	85,02	85,13	85,27	85,27

4. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang Wasbin						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	%	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,64	92,91	93,06	93,21	93,34	93,61	93,61
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	17,03	16,85	16,71	16,53	16,29	16,19	16,19
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	12,88	12,74	12,59	12,51	12,38	12,29	12,29

5. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Bidang P2PATDA						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	81,89	82,19	82,31	82,44	82,69	82,89	82,89
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,69	83,81	83,96	84,06	84,16	84,32	84,32
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,41	93,62	93,74	93,88	93,97	94,15	94,15
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	%	100	100	100	100	100	100	100

6. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III Sekretariat						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,83	94,96	95,01	95,17	95,28	95,43	95,43
		Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	%	5,02	4,92	4,72	4,61	4,43	4,28	4,28
		Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,78	80,92	81,14	81,32	81,63	81,92	81,92



7. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB Puslia						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,34	62,67	62,71	62,84	62,93	63,06	63,06
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,32	91,54	91,70	91,82	91,94	92,14	92,14
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	78,93	79,21	79,38	79,52	79,73	79,81	79,81
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,46	41,78	41,86	42,03	42,26	42,48	42,48
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	100	100	100	100	100	100

8. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kinerja Unit Eselon III UPTB PPD						TARGET AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	100	100	100	100	100	100
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	8,87	8,62	8,41	8,33	8,24	8,12	8,12
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,72	9,60	9,58	9,41	9,32	9,21	9,21

c. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan serta sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja diperoleh melalui hasil analisa *cascading* atau penjenjangan pohon kinerja yang dimulai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2025 – 2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPJMD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029 adalah “Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah”.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 - 2029 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai

indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran strategis pendapatan dalam RPJMD tahun 2025 – 2029 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2020 - 2024 serta menjabarkan tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian /kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja Bapenda yang telah disusun baik untuk jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, maka ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 akan menjelaskan rumusan hasil indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	IKU	1,95
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	IKU	5,00
2.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	IKU	0,434
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	IKU	1,26
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	IKU	1,25
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	IKU	48,45

6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		IKU	92,03
7.	Meningkatnya Kontribusi Terhadap PDRB PAD	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,96
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	IKU	1,12

2. Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1 Eselon III

a. Bidang Pajak

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	Indikator Kinerja Outcomes	1,61 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	14,53 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Indikator Kinerja Outcomes	5,19 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

b. Bidang Pendapatan Lain lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Indikator Kinerja Outcomes	95,12 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	89,45 %
3.	Meningkatnya Pendapatan Penerimaan dari Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Indikator Kinerja Outcomes	83,71 %
4.	Meningkatnya Penerimaan Hibah dari	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Indikator Kinerja Outcomes	84,42 %

c. Bidang Pengawasan dan Pembinaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Indikator Kinerja Outcomes	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Indikator Kinerja Outcomes	92,64 %



	Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah			
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Indikator Kinerja Outcomes	17,03 %
4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Indikator Kinerja Outcomes	12,88 %

d. Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	81,89 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	83,69 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	93,41 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

e. Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1 Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Indikator Kinerja Outcomes	94,83 %
		1.2 Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Indikator Kinerja Outcomes	5,02 %
		1.3 Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	80,78 %

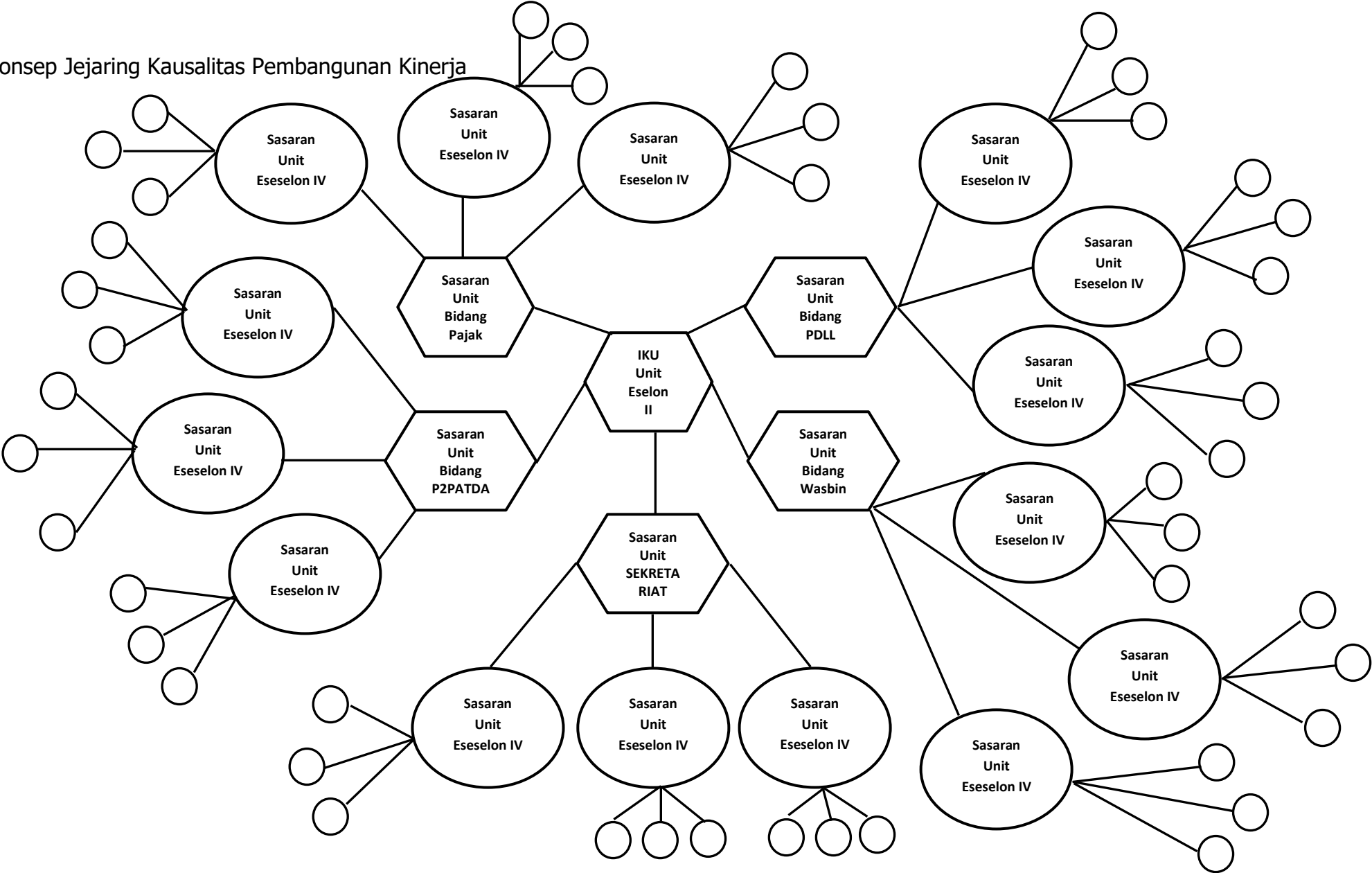
f. UPTB Pusat Informasi dan Aplikasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	62,34 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	91,32 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Indikator Kinerja Outcomes	78,93 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	41,46 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	Indikator Kinerja Outcomes	100 MBPs

g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Indikator Kinerja Outcomes	8,87 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	9,72 %

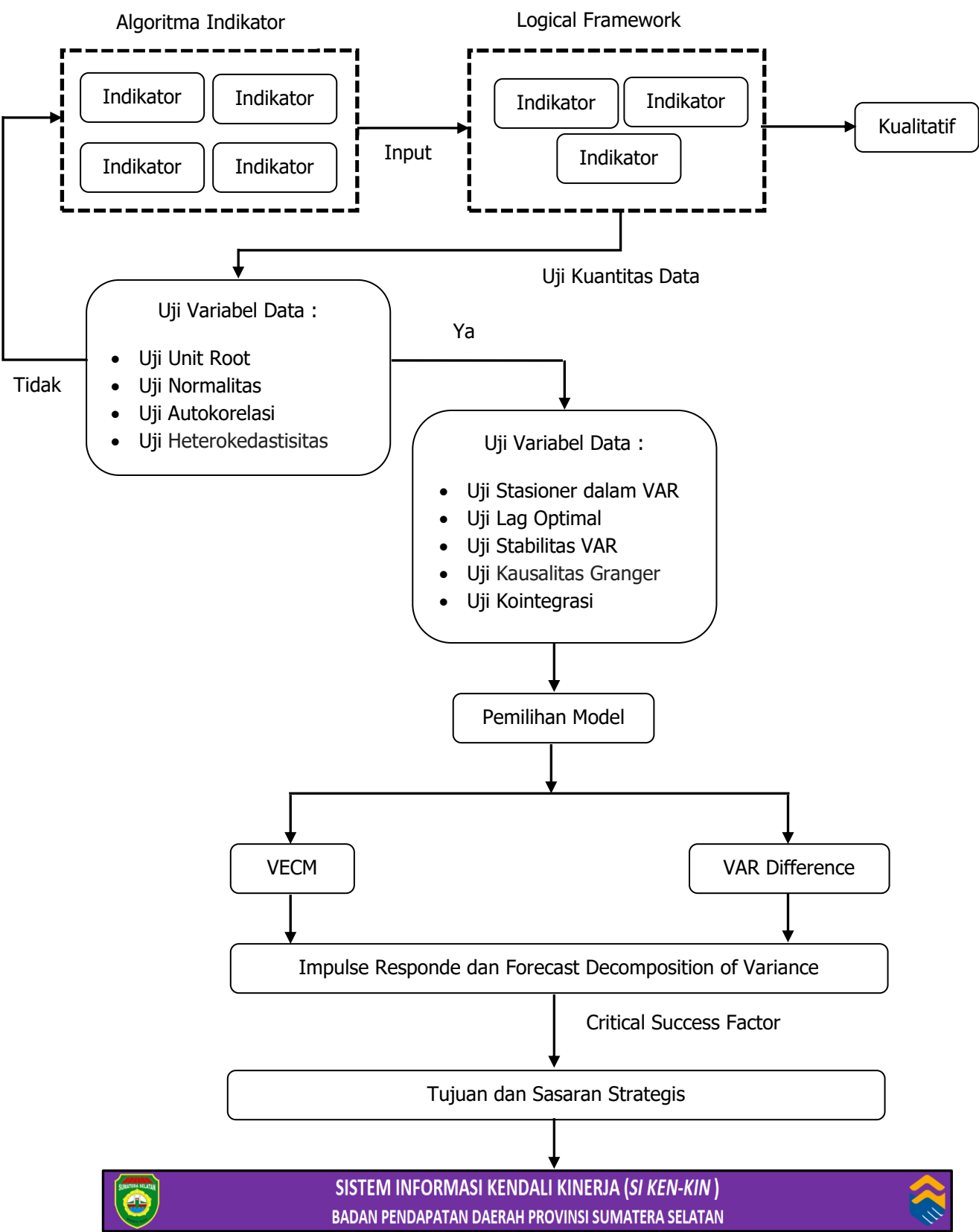
D. Konsep Jejaring Kausalitas Pembangunan Kinerja



E. Teknik Analisa Data Indikator

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan alat dan teknik analisis dengan software eviews versi 13 dan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN) dengan metodologi sebagai berikut :

- 1. Melakukan analisis data indikator dengan melakukan pembuktian secara kuantitatif



Pada tahapan ini, semua indikator yang telah disusun berdasarkan penjenjangan atau cascading, mulai dari Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1, IKSSO Level 2 dan seterusnya sampai dengan indikator kinerja output sub kegiatan.

2. Membuat Indikator Index Level Data

INDEX	INDIKATOR	LEVEL	PEMILIK
IKSS1	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	Sasaran Strategis 1	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS2	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Sasaran Strategis 2	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS3	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Sasaran Strategis 3	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Sasaran Strategis 4	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis 5	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS6	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Sasaran Strategis 6	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS7	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Sasaran Strategis 7	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS8	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis 8	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSSO1	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pajak
IKSSO2	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang PDLL
IKSSO3	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
IKSSO4	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang P2PATDA
IKSSO5	Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Sekretaris Badan
IKSSO6	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB Puslia
IKSSO7	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB PPD
IKSSO8	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pajak
IKSSO9	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Doleansi
IKSSO10	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pembukuan
IKSSO11	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Retribusi



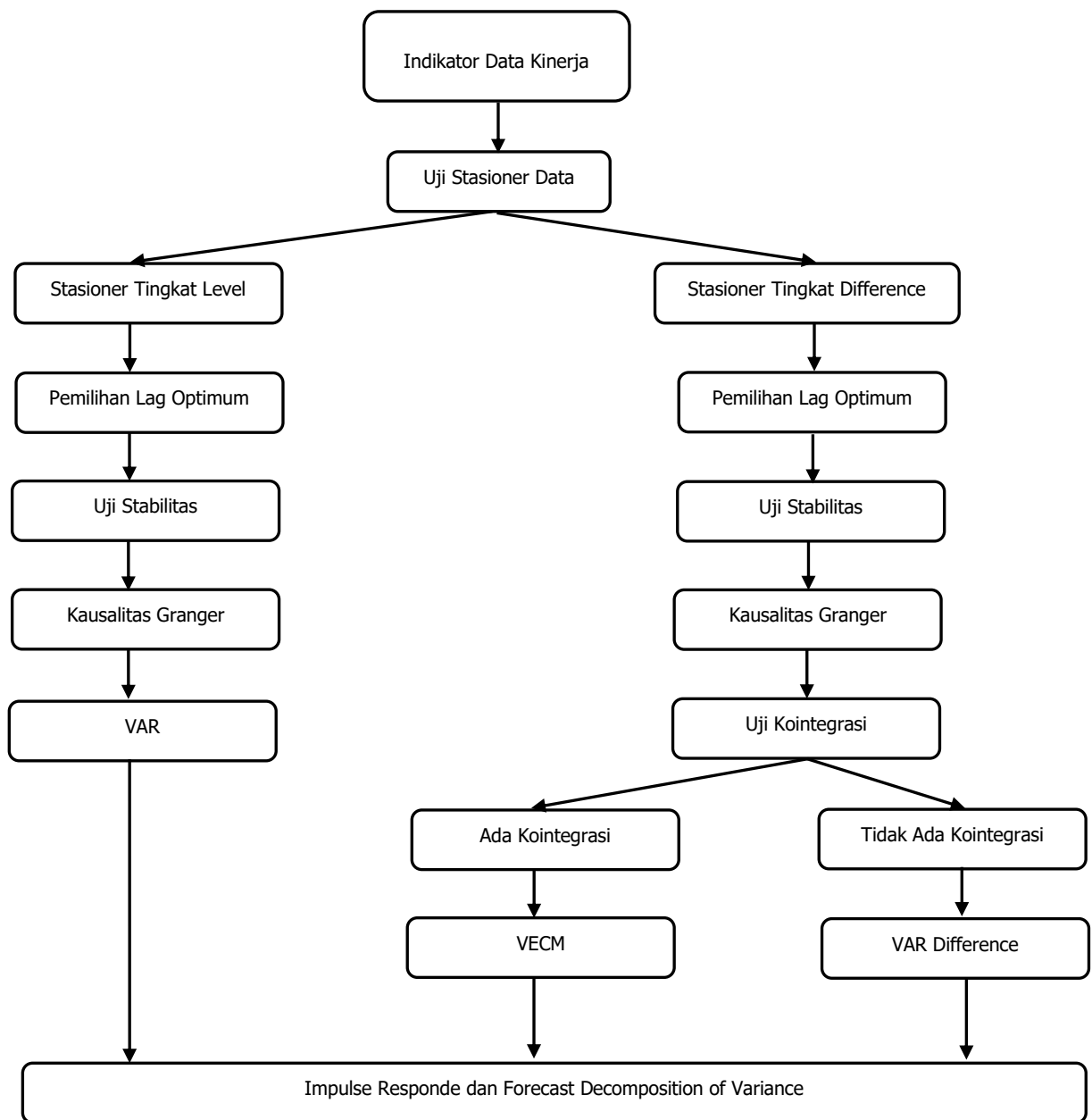
IKSSO12	Persentase Bagi Hasil	Meningkatnya	Penerimaan	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
IKSSO13	Persentase Hibah	Meningkatnya	Penerimaan	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbid Hibah
IKSSO14	Persentase Pemeriksaan	Meningkatnya	Intensitas	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah I
IKSSO15	Persentase Penyelesaian	Berkurangnya	Tindak Lanjut	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah II
IKSSO16	Persentase Refresif	Berkurangnya	Tindakan	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbid Wilayah III
IKSSO17	Persentase Objek Potensi	Meningkatnya	Penelitian Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbid Statistik
IKSSO18	Persentase Meningkatnya		Kerjasama	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan
IKSSO19	Persentase yang Diharmonisasi	Meningkatnya	Peraturan	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbid Hukum
IKSSO20	Persentase Pertanggungjawaban Keuangan	Meningkatnya	Akuntabilitas	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbag Keuangan
IKSSO21	Persentase Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan	Efektifitas	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbag Perencanaan
IKSSO22	Persentase Sumber Daya Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya	Kompetensi Manusia Dalam	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
IKSSO23	Persentase Meningkatnya		Kerjasama	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Subbag TU UPTB Puslia
IKSSO24	Persentase Digitalisasi	Meningkatnya	Penggunaan	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Seksi Jaringan UPTB Puslia
IKSSO25	Persentase Keamanan Data Informasi	Meningkatnya	Sistem	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi UPTB Puslia
IKSSO26	Persentase Pajak	Berkurangnya	Tunggakan	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Seksi Penagihan UPTB PPD
IKSSO27	Persentase Perhitungan Penetapan Pajak Daerah	Berkurangnya Perhitungan	Kesalahan Dalam	Sasaran Outcomes Level 2	Strategis Level 2	Kepala Seksi Penetapan UPTB PPD

3. Persamaan Data

Untuk melakukan running data, persamaan data pada masing indikator index yang telah ditetapkan harus dilakukan standarisasi dengan computasi data ke logaritma natural (ln) sehingga data mempunyai level pembacaan yang sama pada software evIEWS versi 13.

4. Tahapan Pemilihan Model

Pemilihan model yang cocok pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggunakan metodologi tahapan sebagai berikut:



Metodologi yang digunakan dalam menguji kuantitatif indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan/atau (jika-maka) antar indikator dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Teknik analisis yang digunakan dengan *vector error correction model* (VECM) yaitu pengembangan dari vector autoregression model dimana terdapat kointegrasi antar variable.

- a. Uji Stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar – akar (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak mengandung akar unit yang artinya data stasioner.
- b. Uji lag optimal dilihat dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum

- c. Uji stabilitas VAR, stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1 (satu).
- d. Uji kausalitas granger dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variable endogen dapat diperlakukan sebagai variable eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhannya antar variable. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan kausalitas.
- e. Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variable-variabel di dalam metodologi ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen's Cointegration Test. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang.

Model analisis yang digunakan dalam metodologi ini dengan pendekatan hubungan variabel dinamis dengan model faktor koreksi kesalahan (VECM) model, uji stasioner, kausalitas Granger dan kointegrasi yang terdiri dari (1) model pertama akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1; (2) model kedua akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 2; (3) model ketiga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 1 dan Level 2 secara bersama-sama mempengaruhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Uji akar unit pada metodologi ini menggunakan rumusan yang dikembangkan oleh Levin dkk (2002) dan Im dkk (2005). Persamaan uji akar unit Levin dkk (2002) dan Im dkk dengan mempertimbangkan kriteria Augmented Dickey Fuller (ADF test) sebagai berikut :

$$\Delta \ln Y_t = \rho_t Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{\rho_t} \delta_{t,j} \Delta \ln Y_{t-j} + \varepsilon_t \quad (1)$$

Dimana : Y merupakan vektor dari variabel endogen utama dalam metodologi ini yaitu tujuan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2. Uji unit akar oleh Levin dkk. (2002) dengan asumsi bahwa akurasi

parameter p , identik dalam deret waktu (yaitu, p , p untuk semua t), sedangkan urutan lag p , dapat bervariasi secara bebas. Prosedur ini menguji hipotesis nol $p = 0$ untuk semua t terhadap hipotesis alternatif $p < 0$ untuk semua t . Penolakan hipotesis nol menunjukkan kemungkinan dilanjutkannya proses integrasi data dan sebaliknya.

Uji unit akar oleh Im et al. (2005) yang juga berdasarkan persamaan (1), berbeda dengan uji unit akar Levin dkk. (2002), dengan asumsi ρ menjadi heterogen antar bagian. Uji unit akar oleh Im et al. (2005) pengujian hipotesis nol diterima jika $p_t = 0$ terhadap hipotesis alternatif $p < 0$, ($t=1, \dots, t$); $p = 0$, ($t=t, \dots, t$) untuk semua t . Penerimaan hipotesis alternatif memungkinkan rangkaian individu untuk diintegrasikan. Uji unit root oleh Levin dkk. (2002) dan Im dkk. (2005) dapat diestimasi pada data pada level dan first differential dalam bentuk logaritma natural ($\ln$).

Secara empiris metodologi ini untuk melihat dampak secara kausalitas terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam jangka pendek dan panjang, metodologi ini juga menggunakan uji kointegrasi, untuk melihat kemungkinan maksimal uji kointegrasi Johansen (Verbeek, 2012) untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel-variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan Granger analisis kausalitas juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM), sedangkan persamaannya dapat ditampilkan sebagai berikut:

$$x_t = A_1 x_{t-1} + \dots + A_p x_{t-p} + B y_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Dimana: x , adalah vektor variabel data endogen, dan A mewakili matriks autoregresif. y , adalah vektor deterministik dan B mewakili matriks parameter. E adalah vektor inovasi dan p adalah panjang lag.

Untuk mengungkap arah kausalitas antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam konteks variabel data. Maka model persamaan kausalitas VECM Granger dapat dilihat sebagai berikut:

$$\Delta \ln IKSS1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4} \pi_{6t,l} \Delta \ln IKSSO4 + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (3)$$

$$\Delta \ln IKSSO1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO8_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO8_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO9_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO9_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO10_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO10_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (4)$$

$$\Delta \ln IKSSO2_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO11_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO11_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO12_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO12_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO13_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO13_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (5)$$

$$\Delta \ln IKSSO3_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO14_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO14_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO15_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO15_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO16_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO16_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (6)$$

$$\Delta \ln IKSSO4_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO17_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO17_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO19_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO19_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (7)$$

$$\Delta \ln IKSSO5_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO5_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO5_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO21_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO21_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO22_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO22_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (8)$$

$$\Delta \ln IKSSO6_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO6_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO6_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO23_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO23_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO24_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO24_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO25_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO25_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (9)$$

$$\Delta \ln IKSSO7_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO7_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO7_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO26_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO26_{t-1} + \sum_{l=1}^{mIKSSO27_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO27_{t-1} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (10)$$

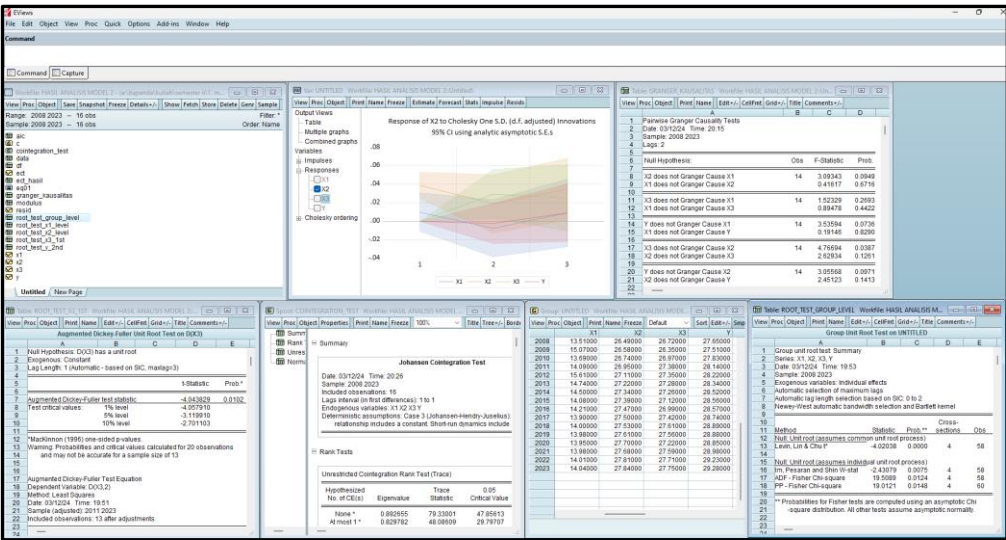
Dimana t adalah periode waktu ($t = 1, \dots, t$); l lag dari setiap variabel data; $\ln IKSS$ adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis; $\ln IKSSO$ adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dan $IKSSO$ Level 2; EC adalah koreksi kesalahan dan $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$ mengasumsikan tingkat kesalahan pada model (istilah kesalahan).

Menurut Lopez & Weber (2017) akan diperoleh beberapa kemungkinan mengenai nilai koefisien masing-masing variabel data tersebut, yaitu (i) misalnya pada persamaan pertama hanya terjadi kausalitas antara $IKSS$ dan $IKSSO$ Level 1 dan $IKSSO$ Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah, artinya hanya $Y, 0$ (penolakan hipotesis nol), sedangkan semua hipotesis β_{1t} dan $\theta_{1t} = 0$ berarti antara $IKSS$, $IKSSO$ Level 1 dan $IKSSO$ Level 2 dan Y

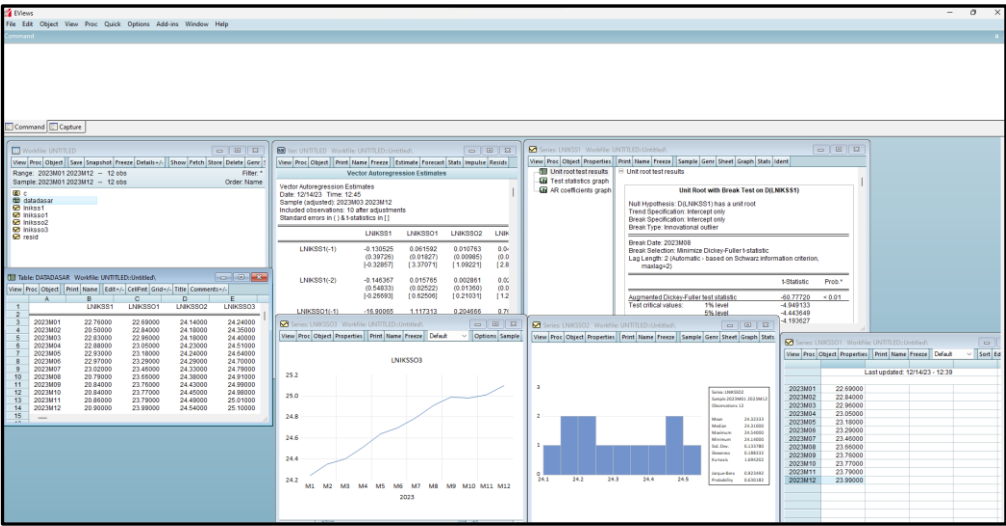
tidak ada hubungan sebab akibat satu sama lain (penerimaan hipotesis nol), hal ini menunjukkan paling sedikit ada satu hubungan atau yang lainnya; (ii) penerimaan hipotesis nol terjadi, jika semua probabilitas berada pada $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} = 0$, yang berarti tidak ada satu pun variabel yang memiliki hubungan sebab akibat yang baik dalam arah yang sama (berarah) atau dua arah (dua arah); (iii) penolakan hipotesis nol terjadi, jika terdapat kemungkinan lain, misalnya jika $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} \neq 0$, yang berarti semua variabel mempunyai kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan/atau jika maka baik searah (direksional) maupun dua arah (dua arah).

5. Running Data

Untuk melakukan pengujian terhadap variabel data kinerja yang telah disusun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan software eviews versi 13 sebagai berikut:



Gambar 1 Tampilan Awal views versi 13



Gambar 2 Tampilan Running Data

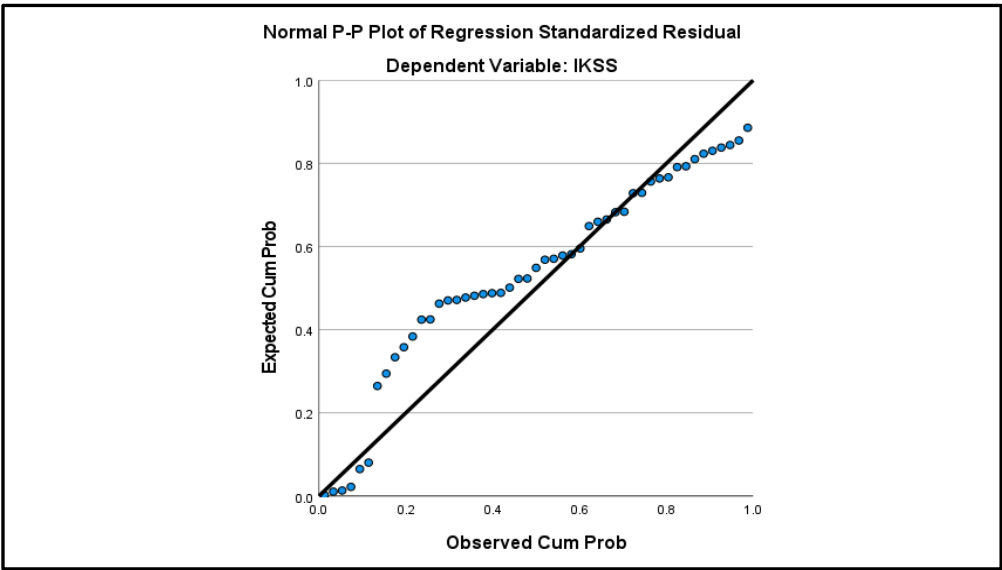
Sebelum mengestimasi kausalitas VECM Granger, beberapa kriteria ekonometrik harus dipenuhi, seperti pengujian stasioner data dengan uji unit root menggunakan kriteria uji Augmented Dickey-Fuller (ADF-Test), pengujian ini dikembangkan oleh Levin et al. (2002) dan Im dkk. (2005). Hasil pengujian unit root dapat dilihat pada Tabel berikut:

Variabel	ADF Test	t-Statistik			Prob*
		1%	5%	10%	
$\Delta (lnIKSS1)$	-6.850925	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0029
$\Delta (lnIKSS2)$	-7.304150	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0005
$\Delta (lnIKSS3)$	-7.351302	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0016
$\Delta (lnIKSS4)$	-7.269643	-3.581152	-2.926622	-2.601424	0.0022
$\Delta (lnIKSS5)$	-7.599555	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0002
$\Delta (lnIKSS6)$	-5.079018	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0034
$\Delta (lnIKSS7)$	-7.081123	-3.451682	-3.724587	-2.261899	0.0001
$\Delta (lnIKSS8)$	-7.050415	-3.620184	-2.076314	-2.810604	0.0018
$\Delta (lnIKSS01)$	-3.319360	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0401

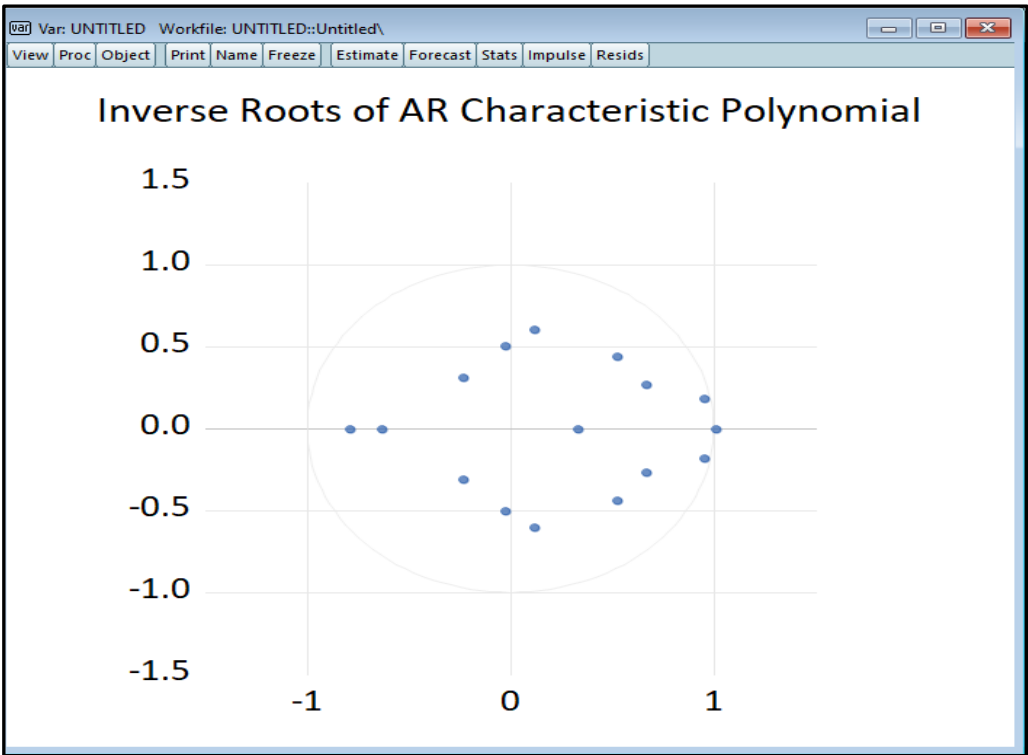
$\Delta (lnIKSS02)$	-4.298721	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0100
$\Delta (lnIKSS03)$	-5.701658	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0029
$\Delta (lnIKSS04)$	-6.556084	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0012
$\Delta (lnIKSS05)$	-5.986154	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0021
$\Delta (lnIKSS06)$	-6.120437	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0009
$\Delta (lnIKSS07)$	-5.033496	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0036
$\Delta (lnIKSS08)$	-3.719095	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0262
$\Delta (lnIKSS09)$	-4.650565	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0092
$\Delta (lnIKSS010)$	-5.877345	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0034
$\Delta (lnIKSS011)$	-4.923968	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0042
$\Delta (lnIKSS012)$	-6.636032	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSS013)$	-4.175967	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0201
$\Delta (lnIKSS014)$	-3.833980	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0223
$\Delta (lnIKSS015)$	-5.436816	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0021
$\Delta (lnIKSS016)$	-3.964601	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnIKSS017)$	-4.209333	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0159
$\Delta (lnIKSS018)$	-3.933559	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0225
$\Delta (lnIKSS019)$	-7.432736	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0002
$\Delta (lnIKSS020)$	-5.901626	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0012
$\Delta (lnIKSS021)$	-6.013486	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0014
$\Delta (lnIKSS022)$	-5.100250	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0042
$\Delta (lnIKSS023)$	-3.710393	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0237
$\Delta (lnIKSS024)$	-3.235105	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0414
$\Delta (lnIKSS025)$	-3.464311	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0375
$\Delta (lnIKSS026)$	-3.509086	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0001
$\Delta (lnIKSS027)$	-4.621210	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0095

Null Hypothesis : $\Delta(lnIKSS)$; $\Delta(lnIKSSO \text{ Level } 1)$; $\Delta(lnIKSSO \text{ Level } 2)$ has a unit root
Lag Length: 0 (Automatic – base on SIC, max lag = 2)
*MacKinnon (1996) one-sided p-values

Tabel diatas menunjukan hasil running test dari pengujian unit root test pada tingkat perbedaan pertama (*first difference*), dimana hasilnya menunjukan nilai probabilitas < 0,05 (*stasioner) hal ini ditunjukan dengan nilai dari hasil uji ADF yang lebih tinggi dari t-nilai statistik pada tingkatan 1%, 5% dan 10%. Selanjutnya 33 (tiga puluh tiga) variabel tersebut lnIKSS; lnIKSSO Level 1; lnIKSSO Level 2; dapat digunakan untuk mengestimasi kausalitas Granger dengan model koreksi kesalahan vektor (VECM).



Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator mendekati dengan *desire line* tujuan Perangkat Daerah yang berarti dari pengujian Heterokedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model.



Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator berada dalam lingkaran pengamatan yang artinya variabel data yang diamati berada pada normalitas data dan tidak ada penyimpangan data.

Langkah berikutnya adalah pemilihan lag optimum yang tepat pada model kausalitas. Tabel berikut ini menunjukan hasil pengujian lag optimum. Hasil running test menunjukan bahwa penentuan panjang pada

lag data yang akan digunakan dalam mengestimasi kausalitas Granger adalah lag dua untuk 35 (tiga puluh lima) variabel data yang diuji.

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-419.1810	NA	162.6512	19.28095	19.48370*	19.35614*
1	-403.6441	26.83645	252.2089	19.71110	20.92759	20.16223
2	-360.2234	65.13107*	114.2664*	18.87379*	21.10403	19.70087
3	-341.1326	24.29740	168.5682	19.14239	22.38637	20.34541
4	-313.5341	28.85291	191.8342	19.02428	23.28200	20.60325

*indicate lag order selected by the criterion
AIC : Akaike Information Criterion

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai parameter Akaike Information Criterion (AIC) minimum berada pada lag kedua dengan nilai |18.87379|, hal ini mengisyaratkan lag optimum berada pada lag kedua.

Optimum Lag	$\Delta (lnIKSS)$	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	Joint
$\Delta Lag one$	2.561499 [0.7672]***	4.752189 [0.4469]**	1.749800 [0.8826]	14.90229 [0.0108]***	2.404408 [0.7908]	26.20479 [0.3967]
$\Delta Lag two$	4.661034 [0.4586]	1.807226 [0.8751]	3.341873 [0.6474]**	2.993611 [0.7010]	114.9873 [0.0000]***	157.2580 [0.0000]
df	5	5	5	5	5	25

Note: Chi-squared test statistic for lag exclusion
Significant level ***1%, **5% and *10%
Number in [] are p-values

Uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan kausalitas, analisis kausalitas Granger juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kerja kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM). Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansen pada Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Trace Statistic lebih tinggi dari nilai kritis, begitu pula nilai Max-Eigen Statistic lebih tinggi dari nilai kritis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang terdapat kointegrasi pada model persamaan hasil uji kointegrasi Johansen disajikan pada Tabel diatas.

Trace Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	128.4782	69.81889	0.0000
At most 1*	0.456632	65.34761	47.85613	0.0005
At most 2*	0.287481	37.89900	29.79707	0.0047
At most 3*	0.270480	22.64630	15.49471	0.0035
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036

Maximum Eigenvalue Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	63.13059	33.87687	0.0000
At most 1	0.456632	27.44861	27.58434	0.0520
At most 2	0.287481	15.25269	21.13162	0.2716
At most 3	0.270480	14.19159	14.26460	0.0513
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036

Dari persamaan (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) yang telah diformulasikan diawal, maka hasil pengujian test terhadap model vektor koreksi kesalahan (VECM) yang dihasilkan dengan persamaan baru :

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS,2) &= 0.357687854138 \cdot D(lnIKSS(-1),2) + 0.255696325482 \cdot D(lnIKSS01(-1),2) \\
 &+ 0.363554788223 \cdot D(lnIKSS02(-1),2) + 0.222569874236 \cdot D(lnIKSS03(-1),2) \\
 &+ 0.555889632566 \cdot D(lnIKSS04(-1),2) + 0.666889566336 \cdot D(lnIKSS05(-1),2) \\
 &+ 0.110225577956 \cdot D(lnIKSS06(-1),2) + 0.330000561142 \\
 &\cdot D(lnIKSS07(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS01,2) &= 1.6134766894 \cdot D(lnIKSS08(-1),2) + 0.618968722732 \cdot D(lnIKSS09(-2),2) \\
 &+ 0.185263624107 \\
 &\cdot D(lnIKSS010(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{12}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS02,2) &= 0.61326312845 \cdot D(lnIKSS011(-1),2) + 0.340396781481 \cdot D(lnIKSS012(-2),2) \\
 &+ 0.116692533601 \\
 &\cdot D(lnIKSS013(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{13}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS03,2) &= 1.07193559441 \cdot D(lnIKSS014(-1),2) + 0.5599794065846 \\
 &\cdot D(lnIKSS015(-2),2) + 0.500636698415 \\
 &\cdot D(lnIKSS016(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{14}$$

$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS04,2) &= 0.420313895269 \cdot D(lnIKSS017(-1),2) + 0.200233652213 \\
 &\cdot D(lnIKSS018(-1),2) + 0.339965221000 \\
 &\cdot D(lnIKSS019(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

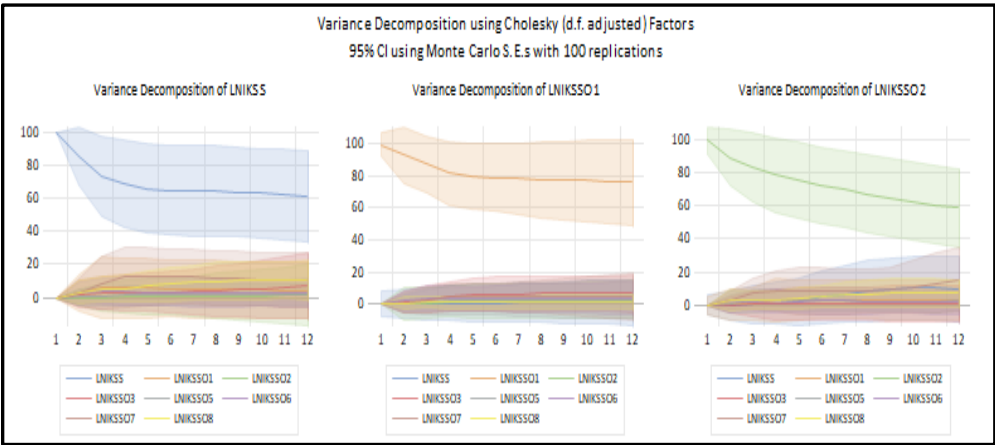
$$\begin{aligned}
 D(lnIKSS05,2) &= 0.604814176085 \cdot D(lnIKSS020(-1),2) + 0.66800500123622 \\
 &\cdot D(lnIKSS021(-1),2) + 0.558999622300 \\
 &\cdot D(lnIKSS022(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{16}$$

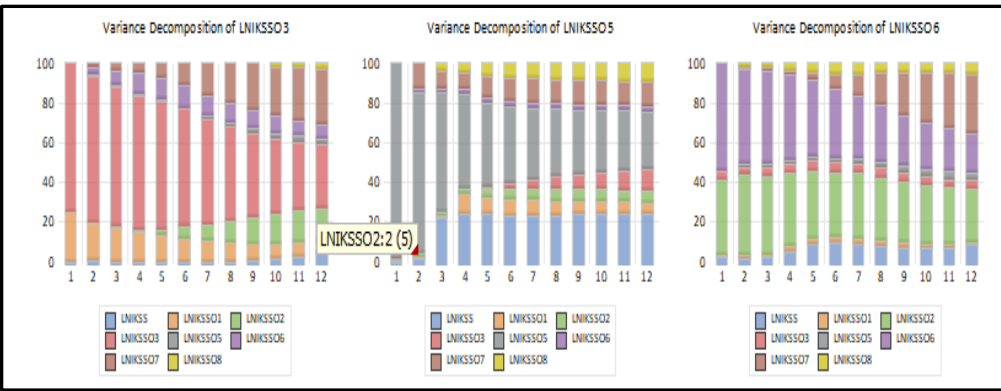
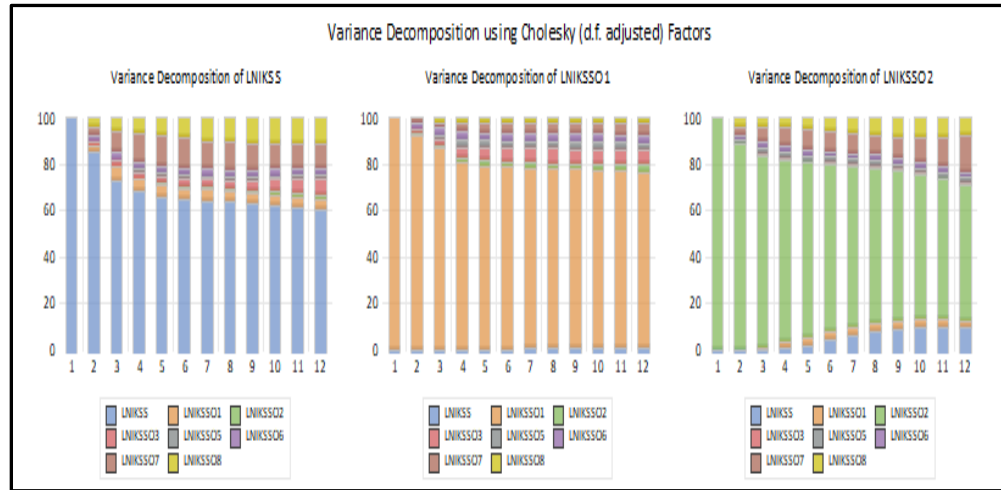
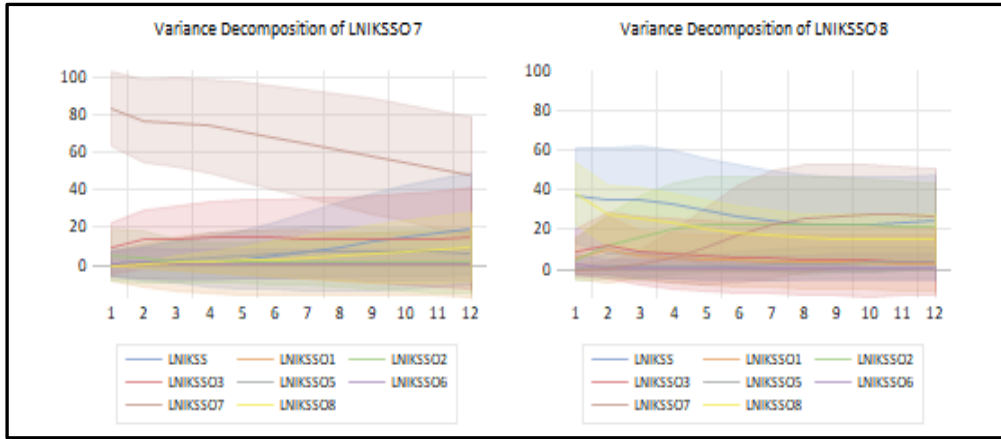
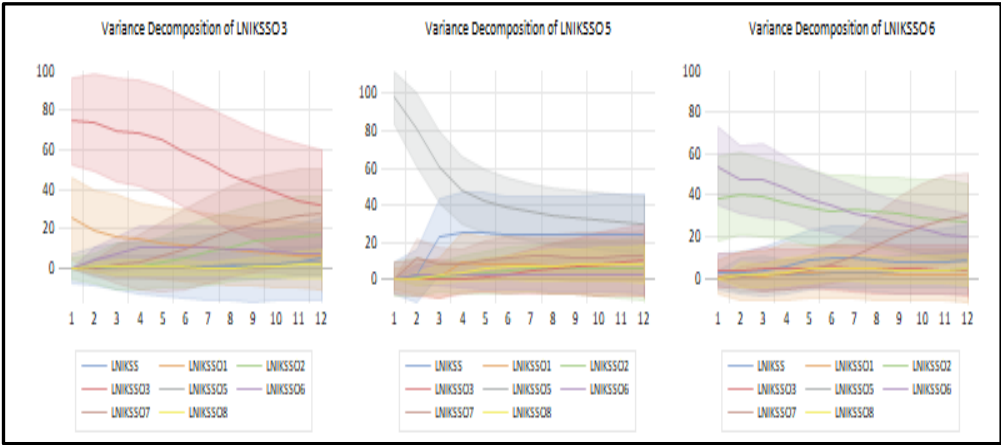
$$\begin{aligned}
 D(\ln IKSS06,2) &= 0.460615311019 \cdot D(\ln IKSS023(-1),2) + 0.004125563678 \\
 &\quad \cdot D(\ln IKSS024(-1),2) + 0.445012300622 \\
 &\quad \cdot D(\ln IKSS025(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{17}$$

$$\begin{aligned}
 D(\ln IKSS07,2) \\
 &= 0.00731308357823 \cdot D(\ln IKSS027(-1),2) + 0.008852003166 \\
 &\quad \cdot D(\ln IKSS027(-1),2)
 \end{aligned}
 \tag{18}$$

Model koreksi kesalahan vektor merupakan salah satu bentuk model vektor autoregresif (VAR) yang memperkirakan karena adanya bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM sering juga disebut sebagai desain VAR untuk rangkaian non stasioner yang mempunyai hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM memulihkan hubungan jangka pendek dan panjang variabel endogen agar dapat bersatu dalam hubungan kointegrasi, namun tetap membiarkan adanya dinamika jangka pendek. Hasil estimasi model VEC dapat dilihat pada Tabel berikut.

Dependent Variabel	C	$\Delta (\ln IKSS1_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS2_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS3_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS4_{t-1})$	$\Delta (\ln IKSS5_{t-1})$	ECT_{t-1}	Summary
$\Delta (\ln IKSS01)$	0.031 (0.249) [0.128]	0.357 (0.148) [-2.408]	0.087 (0.197) [0.445]	0.017 (0.201) [0.086]	0.097 (0.111) [0.878]	0.053 (0.078) [-0.685]	3.289	R ² : 0.8557 Adj. R ² : 0.538 F-stat : 5.661 AIC : 4.086 SC : 4.568
$\Delta (\ln IKSS02)$	0.027 (0.331) [-0.083]	1.059 (0.351) [3.010]	0.221 (0.467) [0.473]	0.479 (0.477) [1.003]	0.192 (0.263) [0.729]	1.613 (0.185) [-8.678]	2.131	R ² : 0.8663 Adj. R ² : 0.342 F-stat : 3.081 AIC : 4.654 SC : 5.136
$\Delta (\ln IKSS03)$	0.012 (0.338) [-0.038]	0.145 (0.114) [1.280]	0.029 (0.151) [-0.192]	0.613 (0.154) [-3.960]	0.080 (0.085) [-0.937]	0.185 (0.060) [-3.075]	0.561	R ² : 0.9063 Adj. R ² : 0.312 F-stat : 2.816 AIC : 4.698 SC : 5.179
$\Delta (\ln IKSS04)$	0.026 (0.186) [-0.141]	0.305 (0.208) [1.464]	0.433 (0.277) [-1.563]	0.137 (0.283) [-0.486]	1.071 (0.156) [-6.848]	0.089 (0.110) [0.810]	0.156	R ² : 0.8264 Adj. R ² : 0.491 F-stat : 4.862 AIC : 3.510 SC : 3.992
$\Delta (\ln IKSS05)$	0.045 (0.131) [0.345]	0.013 (0.149) [-0.089]	0.386 (0.199) [-1.944]	0.026 (0.203) [-0.131]	0.028 (0.112) [0.252]	0.046 (0.079) [-0.591]	8.656	R ² : 0.9380 Adj. R ² : 0.911 F-stat : 42.177 AIC : 2.810 SC : 3.291





6. Hasil

Setelah melakukan rangkaian beberapa uji variabel data Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja

(1). IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$	$\Delta (lnIKSS7)$	$\Delta (lnIKSS8)$
$\Delta (lnIKSS01)$	64.17	51.12	49.63	57.18	48.71	52.26	66.02	60.18
$\Delta (lnIKSS02)$	71.26	67.13	64.47	66.54	58.96	44.53	63.25	70.07
$\Delta (lnIKSS03)$	51.41	52.16	60.28	76.34	59.26	64.11	60.30	52.42
$\Delta (lnIKSS04)$	57.81	68.36	62.54	73.12	63.04	63.09	70.23	62.25
$\Delta (lnIKSS05)$	66.23	61.17	69.51	58.71	63.58	74.35	63.32	61.25
$\Delta (lnIKSS06)$	63.41	63.14	62.72	51.77	69.14	65.14	63.27	64.01
$\Delta (lnIKSS07)$	72.54	60.31	72.15	56.08	70.41	66.34	60.60	74.23

(2). IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	56.71	63.71	73.03	57.58	48.54	75.23	61.28
$\Delta (lnIKSS09)$	61.12	62.24	59.31	54.69	54.63	64.15	72.54
$\Delta (lnIKSS010)$	51.61	54.81	56.19	56.06	55.63	73.54	59.17
$\Delta (lnIKSS011)$	53.26	64.53	70.14	57.16	64.15	66.24	63.31
$\Delta (lnIKSS012)$	76.18	72.56	57.28	62.21	62.03	58.19	62.31
$\Delta (lnIKSS013)$	63.25	60.34	76.15	65.01	64.48	63.21	65.24
$\Delta (lnIKSS014)$	64.12	62.26	58.45	57.91	54.26	53.60	64.75
$\Delta (lnIKSS015)$	55.72	54.61	51.83	54.36	57.18	56.90	57.21
$\Delta (lnIKSS016)$	56.29	54.46	62.35	64.32	57.94	56.36	64.91
$\Delta (lnIKSS017)$	50.13	53.16	56.32	55.47	58.62	55.13	56.31
$\Delta (lnIKSS018)$	54.47	53.62	65.28	71.02	69.13	63.13	65.24
$\Delta (lnIKSS019)$	56.13	58.47	56.32	54.57	57.12	55.62	64.52
$\Delta (lnIKSS020)$	58.23	52.24	60.23	61.42	62.23	58.97	57.63
$\Delta (lnIKSS021)$	54.63	62.58	59.23	54.41	53.62	57.21	54.78
$\Delta (lnIKSS022)$	56.04	59.78	60.32	61.24	63.23	66.24	57.81
$\Delta (lnIKSS023)$	57.03	64.21	64.88	72.02	74.36	53.60	54.63
$\Delta (lnIKSS024)$	55.66	63.32	64.57	55.04	64.21	64.72	60.24



$\Delta (lnIKSS025)$	54.63	57.16	63.02	65.24	66.58	66.32	58.02
$\Delta (lnIKSS026)$	58.57	56.47	70.12	52.36	51.64	72.03	64.23
$\Delta (lnIKSS027)$	66.34	64.45	56.23	56.63	54.47	59.63	56.23

b. Persentase *Cross Cutting*

(1) IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$	$\Delta (lnIKSS7)$	$\Delta (lnIKSS8)$
$\Delta (lnIKSS01)$	18.12	16.04	20.21	14.16	15.56	13.73	21.04	26.32
$\Delta (lnIKSS02)$	17.23	23.12	14.26	18.23	19.19	15.76	13.65	14.32
$\Delta (lnIKSS03)$	15.60	14.78	18.26	19.26	19.26	14.63	17.25	16.24
$\Delta (lnIKSS04)$	13.64	16.62	17.42	14.56	20.14	14.16	15.82	16.16
$\Delta (lnIKSS05)$	16.23	25.01	18.78	17.26	14.15	16.23	13.26	14.72
$\Delta (lnIKSS06)$	16.26	15.78	14.57	15.26	14.69	15.26	16.44	15.55
$\Delta (lnIKSS07)$	19.63	18.24	22.15	16.23	14.45	16.34	15.27	14.72

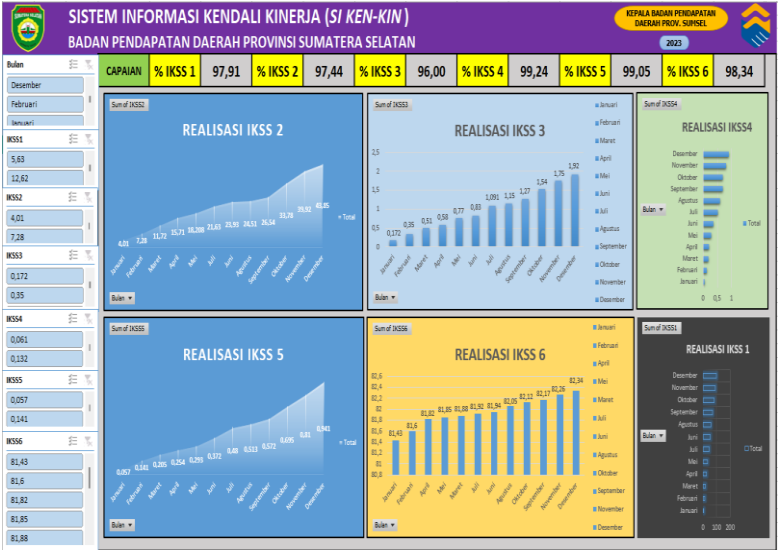
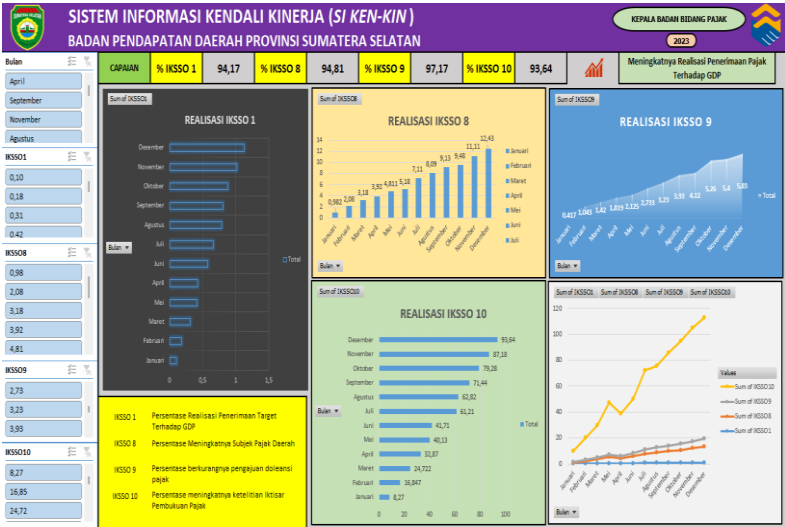
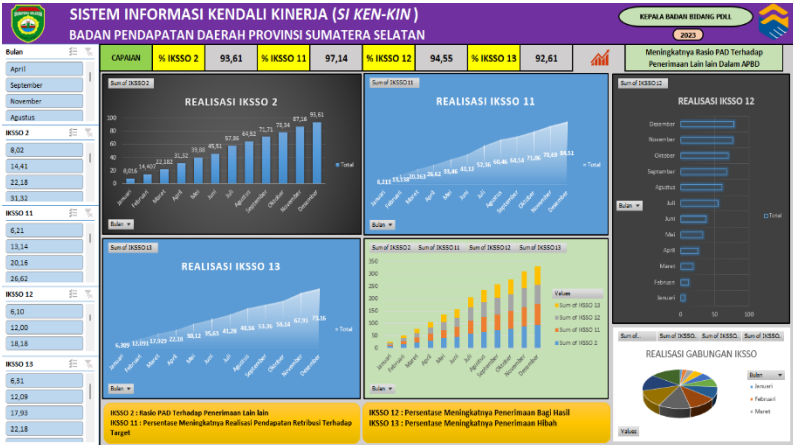
(2) IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	16.45	12.28	15.62	14.23	11.24	17.18	18.23
$\Delta (lnIKSS09)$	15.26	13.24	14.56	13.25	13.23	14.56	17.81
$\Delta (lnIKSS010)$	14.58	14.23	13.36	14.56	15.28	14.23	17.12
$\Delta (lnIKSS011)$	14.25	13.36	12.28	13.32	14.15	17.01	23.16
$\Delta (lnIKSS012)$	12.28	11.58	14.23	13.36	14.25	17.17	16.40
$\Delta (lnIKSS013)$	16.17	15.23	16.24	14.23	18.27	14.23	15.23
$\Delta (lnIKSS014)$	14.05	13.26	14.23	15.23	16.24	14.52	13.23
$\Delta (lnIKSS015)$	14.25	13.25	12.47	13.25	14.21	18.22	19.12
$\Delta (lnIKSS016)$	16.25	13.24	17.24	16.23	15.21	14.27	21.26
$\Delta (lnIKSS017)$	17.24	16.23	14.23	12.17	13.23	14.52	13.26
$\Delta (lnIKSS018)$	16.24	14.22	13.26	16.24	15.47	14.23	13.26
$\Delta (lnIKSS019)$	15.24	14.47	13.26	12.45	13.28	14.62	20.21
$\Delta (lnIKSS020)$	18.21	17.24	16.52	14.14	13.25	14.21	15.01
$\Delta (lnIKSS021)$	18.15	16.92	15.42	11.25	14.28	13.62	14.75
$\Delta (lnIKSS022)$	13.35	14.26	13.25	14.23	14.25	13.38	12.36
$\Delta (lnIKSS023)$	14.28	13.25	13.26	14.21	18.18	16.71	15.28



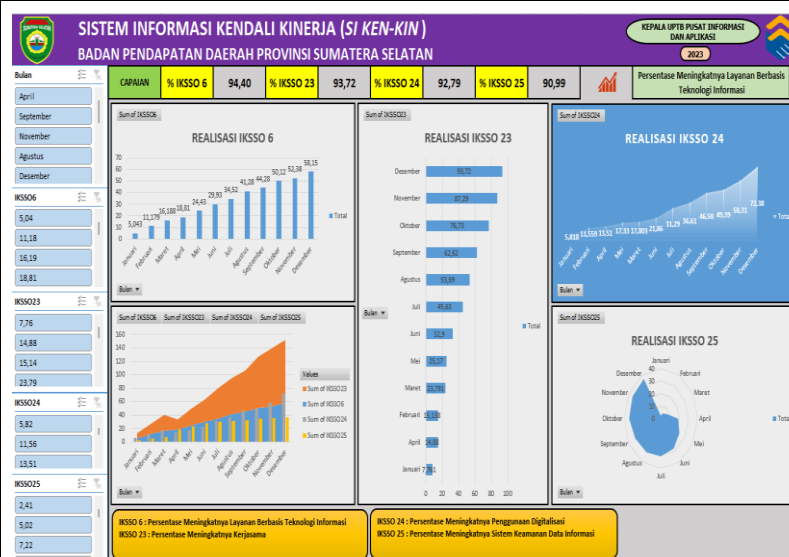
$\Delta (lnIKSS024)$	13.26	12.48	13.25	14.14	15.24	14.21	14.26
$\Delta (lnIKSS025)$	12.12	13.26	14.23	13.58	14.23	15.12	16.23
$\Delta (lnIKSS026)$	14.27	13.32	14.71	11.81	19.24	20.12	15.61
$\Delta (lnIKSS027)$	24.13	16.23	14.88	12.66	14.66	13.32	14.26

7. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN)

NO.	KENDALI KINERJA	SISTEM INFORMASI
1.	Kepala Badan	
2.	Bidang Pajak	
3.	Bidang PDLL	

4.	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	SISTEM INFORMASI KENDALI KINERJA (SI KEN-KIN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 2023 Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah Capaian: % KSSO 3: 100,00, % KSSO 14: 93,27, % KSSO 15: 95,28, % KSSO 16: 94,26 REALISASI KSSO 15: Bar chart showing monthly performance from January to December, with values ranging from 1,106 to 27,15. REALISASI KSSO 14: Bar chart showing monthly performance from January to December, with values ranging from 1,106 to 27,15. REALISASI KSSO 3: Radar chart showing performance across various indicators, with a total score of 94,26. KSSO 3 : Level Maturitas Pengendalian Intern (0- 5) KSSO 14 : Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan KSSO 15 : Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian KSSO 16 : Persentase Berkurangnya Tindakan Retesif
5.	Bidang P2PATDA	SISTEM INFORMASI KENDALI KINERJA (SI KEN-KIN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PENDAPATAN 2023 Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah Capaian: % KSSO 4: 94,68, % KSSO 17: 99,42, % KSSO 18: 94,80, % KSSO 19: 93,31 REALISASI KSSO 4: Bar chart showing monthly performance from January to December, with values ranging from 5,99 to 95,56. REALISASI KSSO 17: Bar chart showing monthly performance from January to December, with values ranging from 1,106 to 27,15. REALISASI KSSO 18: Bar chart showing monthly performance from January to December, with values ranging from 1,106 to 27,15. REALISASI KSSO 19: Pie chart showing the distribution of revenue sources, with a total of 93,31. KSSO 4 : Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah KSSO 17 : Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah KSSO 18 : Persentase Meningkatnya Kinerja KSSO 19 : Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi
6.	Sekretariat	SISTEM INFORMASI KENDALI KINERJA (SI KEN-KIN) BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT 2023 Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Capaian: % KSSO 5: 92,82, % KSSO 20: 100,00, % KSSO 21: 93,53 REALISASI KSSO 5: Bar chart showing monthly performance from January to December, with values ranging from 1,106 to 27,15. REALISASI KSSO 20: Radar chart showing performance across various indicators, with a total score of 93,53. REALISASI KSSO 21: Bar chart showing monthly performance from January to December, with values ranging from 1,106 to 27,15. KSSO 5 : Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah KSSO 20 : Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan KSSO 21 : Persentase Efisien dan Efektifitas Penggunaan Anggaran

7.	UPTB Puslia
----	-------------



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk menyatakan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja dari kebijakan/program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan tahun 2025 dan Penetapan Kinerja tahun 2025.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator sebagai berikut :

Evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KINERJA TAHUN 2025		PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOMES / OUTPUT	KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN [Rp.]	
		Target	Realisasi			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	1,95	1,554	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak	29	29	500.000.000	454.936.040
Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	5,00	1,1187	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2	2	312.400.000	284.937.838
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,434	0,478	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	2	980.400.000	814.937.400
Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,26	(10,258)	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	3	3	535.000.000	456.199.100
Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,25	0,909	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3	3	756.287.000	668.506.000
Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	45,835	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1	1	1.140.000.000	1.098.450.000
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	92,03	93,198	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	1	634.000.000	550.200.000
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,96	0,682	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	300.000.000	257.345.430
	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,12	2,097	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	500.000.000	414.311.000



3.1.1 Capaian Indikator Tujuan

Tujuan

Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

“.....Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....”

Tujuan Perangkat Daerah dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029 Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dari sisi Pendapatan Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui sebaran kemampuan keuangan daerah digunakan peta Kapasitas Fiskal Daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah.

Desentralisasi fiskal dalam era kewenangan otonomi daerah terus dilakukan peningkatan dan inovasi dalam mencari sumber – sumber yang menjadi potensi daerah berdasarkan pengelolaan kewenangan yang diserahkan. Perencanaan pembangunan daerah memerlukan pembiayaan yang bersumber pada kemandirian fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kemandirian kebijakan otonomi daerah yang mengatur, mengurus dan mengelola kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah. Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan local taxing power, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, performance layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Formula Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah:

$$KFD_{Provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]$$

Dimana:

$KFD_{Provinsi}$	= Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
TKD	= Transfer ke Daerah
PTAD	= Pendapatan Transfer antar Daerah
LLPS	= Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
SiLPA	= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
OTSUS	= Dana Otonomi Khusus
DTI	= Dana Tambahan Infrastruktur
DAIS	= Dana Istimewa
BP	= Belanja Pegawai
BBH	= Belanja Bagi Hasil
BB	= Belanja Bunga
PUD	= Pembayaran Utang Daerah

Untuk menghitung indeks kapasitas fiskal daerah, dengan formula:

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{KFD_{Provinsi-i}}{Belanja Pegawai_{Provinsi-i}}$$

Dimana:

$RKFD_{Provinsi-i}$	= Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
$KFD_{Provinsi-i}$	= Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
BP	= Belanja Pegawai Daerah Provinsi

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
Tujuan	:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
Indikator	:	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

No.	Pendapatan	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	PAD	Rp 800.547.217.519,50	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 3.201.572.841.453,93	
2	TKD	Rp 898.776.605.481,00	Rp 2.095.968.136.816,00	Rp 3.339.256.598.442,00	
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	
4	LLPS	Rp -	Rp -	Rp 2.708.616.000,00	
5	SILPA	Rp 911.033.505.651,00	Rp 1.794.023.508.720,22	Rp 1.705.434.949.456,33	
Total		Rp 2.610.357.328.651,50	Rp 6.132.883.793.794,01	Rp 8.248.973.005.352,26	

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	
4	BP	Rp 576.853.060.331,00	Rp 1.124.281.074.234,00	Rp 1.630.593.390.704,00	
5	BBH	Rp 14.580.850.206,00	Rp 895.685.040.219,50	Rp 1.543.243.887.030,89	
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	
Total		Rp 591.433.910.537,00	Rp 2.019.966.114.453,50	Rp 3.173.837.277.734,89	

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 2.018.923.418.114,50	Rp 4.112.917.679.340,51	Rp 5.075.135.727.617,37	
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	3,500	3,658	3,112	

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 234.946.670.500,43	Rp 492.937.700.312,46	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.442.390.252.850,91	Rp 1.728.676.011.382,43	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.408.459.834.492,57	Rp 2.711.986.454.517,24	Rp 3.201.572.841.453,93			
2	TKD	Rp 370.166.981.500,00	Rp 855.146.952.061,00	Rp 898.776.605.481,00	Rp 1.317.398.328.861,00	Rp 1.688.075.606.336,00	Rp 2.095.968.136.816,00	Rp 2.474.024.398.866,00	Rp 3.285.657.660.772,00	Rp 3.339.256.598.442,00			
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
4	LLPS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp 1.354.308.000,00	Rp 2.031.462.000,00	Rp 2.708.616.000,00			
5	SILPA	Rp 534.741.994.674,79	Rp 1.103.848.724.368,84	Rp 911.033.505.651,00	Rp 1.638.002.186.525,87	Rp 1.914.008.302.821,05	Rp 1.794.023.508.720,22	Rp 1.600.870.097.753,00	Rp 1.939.507.314.860,07	Rp 1.705.434.949.456,33			
Total		Rp 1.139.855.646.675,22	Rp 2.451.933.376.742,30	Rp 2.610.357.328.651,50	Rp 4.397.790.768.237,78	Rp 5.330.759.920.539,48	Rp 6.132.883.793.794,01	Rp 6.484.708.639.111,57	Rp 7.939.182.892.149,31	Rp 8.248.973.005.352,26			

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
4	BP	Rp 169.473.829.155,00	Rp 305.916.090.863,00	Rp 576.853.060.331,00	Rp 715.706.127.760,00	Rp 866.588.743.536,00	Rp 1.124.281.074.234,00	Rp 1.301.925.899.499,00	Rp 1.458.341.338.291,00	Rp 1.630.593.390.704,00			
5	BBH	Rp -	Rp -	Rp 14.580.850.206,00	Rp 125.756.146.816,00	Rp 125.756.146.816,00	Rp 895.685.040.219,50	Rp 1.192.445.261.251,50	Rp 1.573.953.279.634,10	Rp 1.543.243.887.030,89			
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
Total		Rp 169.473.829.155,00	Rp 305.916.090.863,00	Rp 591.433.910.537,00	Rp 841.462.274.576,00	Rp 992.344.890.352,00	Rp 2.019.966.114.453,50	Rp 2.494.371.160.750,50	Rp 3.032.294.617.925,10	Rp 3.173.837.277.734,89			

$$KFD_{provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SILPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]$$

- Dimana:
- $KFD_{provinsi}$ = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
 - PAD = Pendapatan Asli Daerah
 - TKD = Transfer ke Daerah
 - PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah
 - LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - SILPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
 - OTSUS = Dana Otonomi Khusus
 - DTI = Dana Tambahan Infrastruktur
 - DAIS = Dana Istimewa
 - BP = Belanja Pegawai
 - BBH = Belanja Bagi Hasil
 - BB = Belanja Bunga
 - PUD = Pembayaran Utang Daerah

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{KFD_{Provinsi-i}}{Belanja Pegawai_{Provinsi-i}}$$

Keterangan:

$$RKFD_{Provinsi-i} = \text{Rasio Kapasitas Fiskal Daerah}$$

$$KFD_{Provinsi-i} = \text{Kapasitas Fiskal Daerah}$$

$$Belanja Pegawai_{Provinsi-i} = \text{Belanja Pegawai}$$

No.	Fiskal Daerah	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]			
	Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 970.381.817.520,22	Rp 2.146.017.285.879,30	Rp 2.018.923.418.114,50	Rp 3.556.328.493.661,78	Rp 4.338.415.030.187,48	Rp 4.112.917.679.340,51	Rp 3.990.337.478.361,07	Rp 4.906.888.274.224,21	Rp 5.075.135.727.617,37			
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	5,726	7,015	3,500	4,969	5,006	3,658	3,065	3,365	3,112			

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024		
Tujuan	:	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah
Indikator	:	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

No.	Pendapatan	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	PAD	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 5.309.757.143.255,46
2	TKD	Rp 1.133.774.055.937,00	Rp 2.224.228.176.382,00	Rp 3.736.209.855.726,00	Rp 5.648.721.133.679,00
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	-
4	LLPS	Rp -	Rp 1.205.419.113.904,57	Rp 2.679.312.000,00	Rp 4.018.968.000,00
5	SILPA	Rp 2.375.661.012.263,88	Rp 841.860.784.669,20	Rp 841.860.784.669,20	Rp 114.138.256.896,39
Total		Rp 4.631.586.069.340,62	Rp 6.715.068.597.971,74	Rp 8.352.204.171.065,60	Rp 11.076.635.501.830,90

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 351.201.408.431,00	Rp 1.272.510.439.766,00	Rp 1.792.563.627.554,00	Rp 2.528.391.380.267,00
5	BBH	Rp 391.842.644.792,00	Rp 1.401.122.947.393,32	Rp 2.670.833.973.089,92	Rp 4.296.405.699.936,00
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 743.044.053.223,00	Rp 2.673.633.387.159,32	Rp 4.463.397.600.643,92	Rp 6.824.797.080.203,00

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 3.888.542.016.117,62	Rp 4.041.435.210.812,42	Rp 3.888.806.570.421,68	Rp 4.251.838.421.627,85
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	11,072	3,176	2,169	1,682

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 962.599.471.629,47	Rp 1.289.700.964.348,92	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.718.780.543.810,12	Rp 2.067.741.539.381,43	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.961.452.532.073,49	Rp 3.358.658.622.632,28	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.164.009.649.440,50	Rp 5.309.757.143.255,46	Rp 5.309.757.143.255,46
2	TKD	Rp 584.354.834.800,00	Rp 872.568.153.400,00	Rp 1.133.774.055.937,00	Rp 1.578.287.636.455,00	Rp 1.897.505.375.766,00	Rp 2.224.228.176.382,00	Rp 2.367.826.955.981,00	Rp 3.378.945.549.743,00	Rp 3.736.209.855.726,00	Rp 4.323.978.143.099,00	Rp 5.648.721.133.679,00	Rp 5.648.721.133.679,00
3	PTAD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
4	LLPS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.009.484.000,00	Rp 2.679.312.000,00	Rp 3.014.226.000,00	Rp 4.018.968.000,00	Rp 4.018.968.000,00
5	SILPA	Rp 984.336.427.290,38	Rp 974.049.365.602,38	Rp 2.375.661.012.263,88	Rp 2.676.414.579.737,69	Rp 2.412.829.783.000,71	Rp 841.860.784.669,20	Rp 624.209.805.743,07	Rp 985.764.031.620,41	Rp 841.860.784.669,20	Rp 1.059.034.333.863,57	Rp 114.138.256.896,39	Rp 114.138.256.896,39
Total		Rp 2.531.290.733.719,85	Rp 3.136.318.483.351,30	Rp 4.631.586.069.340,62	Rp 5.973.482.760.002,81	Rp 6.378.076.698.148,14	Rp 5.509.649.484.067,17	Rp 5.953.489.293.797,56	Rp 7.725.377.687.995,69	Rp 8.550.036.352.403,07	Rp 9.550.036.352.403,07	Rp 11.076.635.501.830,90	Rp 11.076.635.501.830,90

No.	Pendapatan	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	OTSUS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	DTI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	DAIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP	Rp 120.266.845.444,00	Rp 297.621.222.433,00	Rp 351.201.408.431,00	Rp 662.177.661.238,00	Rp 804.417.618.097,00	Rp 1.272.510.439.766,00	Rp 1.455.590.263.656,00	Rp 2.466.708.857.418,00	Rp 1.792.563.627.554,00	Rp 1.957.049.740.010,00	Rp 2.528.391.380.267,00	Rp 2.528.391.380.267,00
5	BBH	Rp -	Rp 391.842.644.792,00	Rp 391.842.644.792,00	Rp 586.012.148.087,00	Rp 1.069.585.316.056,40	Rp 1.401.122.947.393,32	Rp 1.830.453.794.364,32	Rp 2.214.867.726.882,32	Rp 2.670.833.973.089,92	Rp 3.043.458.635.724,04	Rp 4.296.405.699.936,00	Rp 4.296.405.699.936,00
6	BB	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pembayaran Pokok PUD	Rp -	Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Total		Rp 120.266.845.444,00	Rp 689.463.867.225,00	Rp 743.044.053.223,00	Rp 1.248.189.809.325,00	Rp 1.874.002.934.153,40	Rp 2.673.633.387.159,32	Rp 3.286.044.058.020,32	Rp 4.681.576.584.300,32	Rp 4.463.397.600.643,92	Rp 5.000.508.375.734,04	Rp 6.824.797.080.203,00	Rp 6.824.797.080.203,00

$$KFD_{provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SILPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]$$

- Dimana:
- $KFD_{provinsi}$ = Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi
 - PAD = Pendapatan Asli Daerah
 - TKD = Transfer ke Daerah
 - PTAD = Pendapatan Transfer antar Daerah
 - LLPS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - SILPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
 - OTSUS = Dana Otonomi Khusus
 - DTI = Dana Tambahan Infrastruktur
 - DAIS = Dana Istimewa
 - BP = Belanja Pegawai
 - BBH = Belanja Bagi Hasil
 - BB = Belanja Bunga
 - PUD = Pembayaran Utang Daerah

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{KFD_{Provinsi-i}}{Belanja Pegawai_{Provinsi-i}}$$

Keterangan:

- $RKFD_{Provinsi-i}$ = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
- $KFD_{Provinsi-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah
- $Belanja Pegawai_{Provinsi-i}$ = Belanja Pegawai

No.	Fiskal Daerah	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Kapasitas Fiskal Daerah	Rp 2.411.023.888.275,85	Rp 2.446.854.616.126,30	Rp 3.888.542.016.117,62	Rp 4.725.292.950.677,81	Rp 4.504.073.763.994,74	Rp 2.836.016.096.907,85	Rp 2.667.445.235.777,24	Rp 3.043.801.103.695,37	Rp 3.888.806.570.421,68	Rp 4.549.527.976.669,03	Rp 4.251.838.421.627,85	Rp 4.251.838.421.627,85
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	20,047	8,221	11,072	7,136	5,599	2,229	1,833	1,234	2,169	2,325	1,682	1,682

3.1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Kinerja kapasitas fiskal Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III tahun 2025 menunjukkan angka peningkatan

Pengukuran data kinerja Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi Triwulan III tahun 2025 [Rp.]	KFD	RKFD
[1]	[2]	[3]	[4]	
I	Pendapatan:	8.248.973.005.352,26		
	1. PAD	3.201.572.841.453,93		
	2. TKD	3.339.256.598.442,00		
	3. PTAD	0,00		
	4. LLPS	2.708.616.000,00		
	5. SiLPA	1.705.434.949.456,33		
II	Pengeluaran:	3.173.837.277.734,89		
	1. OTSUS	0,00		
	2. DTI	0,00		
	3. DAIS	0,00		
	4. BP	1.630.593.390.704,00		
	5. BBH	1.543.243.887.030,89		
	6. BB	0,00		
	7. PUD	0,00		
III	KFD		5.075.135.727.617,37	
IV	RKFD			3,112

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah:

$$KFD_{Provinsi} = [8.248.973.005.352,26] - [3.173.837.277.734,89]$$

$$KFD_{Provinsi} = 5.075.135.727.617,37$$

$$RKFD_{Provinsi-i} = \frac{5.075.135.727.617,37}{1.630.593.390.704,00}$$

$$RKFD_{Provinsi-i} = 3,112$$

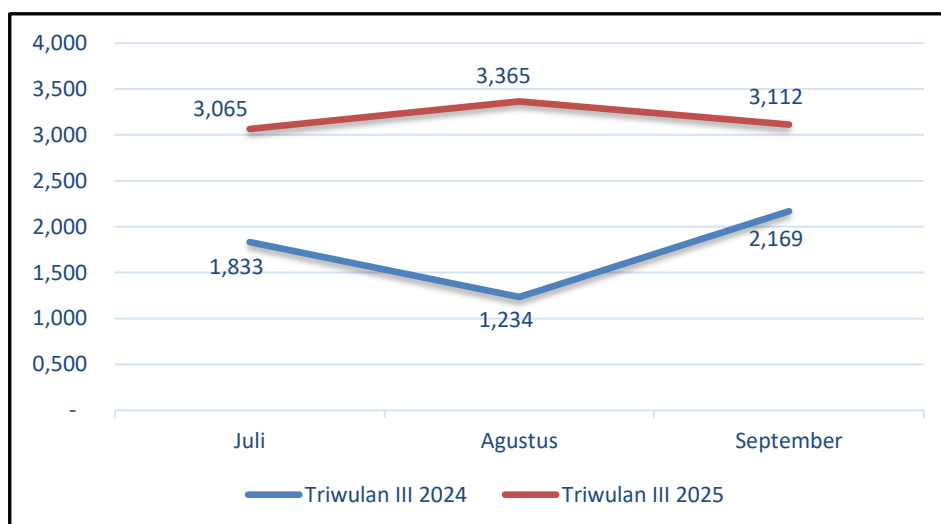
Apabila dibandingkan dengan target kinerja kapasitas fiskal daerah tahun 2025 yang telah ditentukan sebesar 1,95, maka realisasi Triwulan III tahun 2025 sebesar 3,112 atau tercapai sebesar 159,59 %.

3.1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta Capaian Kinerja Pada Triwulan III tahun 2024 Tahun sebelumnya

Kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami trend fluktuatif triwulan 2024 ke triwulan 2025 seperti tergambar pada tabel berikut.

Periodesasi	RKFD		
	Juli	Agustus	September
Triwulan III 2024	1,833	1,234	2,169
Triwulan III 2025	3,065	3,365	3,112

Realisasi kinerja kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 secara *quartely-on-quartely* mengalami peningkatan sebesar 0,943 poin walaupun masih tergolong dalam kapasitas sedang.



3.1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Target kinerja kapasitas fiskal daerah yang tertuang dalam dokumen jangka menengah RPJMD tahun 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 2,28. Realisasi pada Triwulan III tahun 2025 sebesar 3,112 dengan capaian sebesar 136,49 %

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	3,112	2,28	136,49

3.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan data kinerja triwulan III tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera) tidak digunakan.

3.1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN III 2025	REALISASI TRIWULAN III 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	3,216	3,112	96,766	Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Memfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Pemberian insentif fiskal Pajak PKB dan Pajak BBN-KB berupa equivalen sama seperti pembayaran pajak pelaksanaan UU 28 tahun 2009	
						Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) bersama dengan OPD terkait antara lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja	
						Melakukan pengawasan terhadap pajak daerah berbasis mitigasi risiko	
						Pelaksanaan penagihan pajak daerah secara door to door service	
						Melaksanakan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	3,216	3,112	96,766	500.000.000	245.936.040	49,18	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 6. Sosialisasi secara massif terhadap pembayaran pajak daerah cukup signifikan 7. Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2025 s.d 17 Desember 2025

3.1.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	3,126	3,112	96,766	500.000.000,00	245.936.040	49,18	

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Triwulan III tahun 2025 ini belum dihitung karena realisasi kinerja anggaran belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025

3.1.2 Sasaran Strategis 1 (SS.1)

SS.1

Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

".....*Revenue mobilization* merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah....."

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD.

Deviasi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran belanja APBD bersumber pada pendanaan PAD dalam batas toleransi yang ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan capaian kinerja lima tahun terakhir (yoy) batas toleransi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Formula perhitungan IKSS.1:

$$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum APBD Perubahan)}} - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

y = Nilai Deviasi

PAD = Realisasi PAD tahun ke n

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (sebelum perubahan)

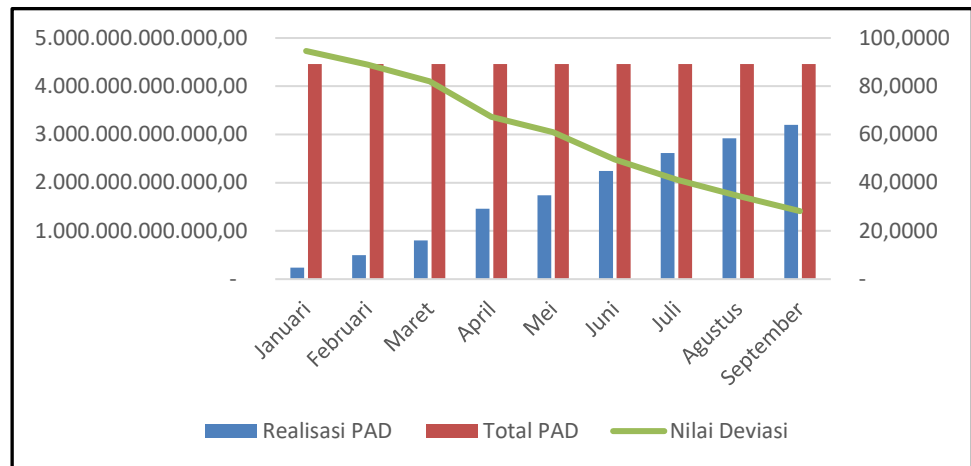
3.1.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran realisasi data kinerja IKSS.1 Triwulan III tahun 2025:

No.	Bulan	Realisasi PAD	Total PAD	Nilai Deviasi	Target Tahunan 2025
1.	Januari	240.196.687.137,67	4.459.311.556.974,00	94,6136	5,00
2.	Februari	495.908.944.084,99	4.459.311.556.974,00	88,8792	
3.	Maret	800.547.217.519,50	4.459.311.556.974,00	82,0477	
4.	April	1.456.859.523.046,22	4.459.311.556.974,00	67,3299	
5.	Mei	1.740.160.942.225,74	4.459.311.556.974,00	60,9769	
6.	Juni	2.242.892.148.257,79	4.459.311.556.974,00	49,7032	
7.	Juli	2.616.648.796.709,94	4.459.311.556.974,00	41,3217	
8.	Agustus	2.920.093.533.483,03	4.459.311.556.974,00	34,5169	
9.	September	3.201.572.841.453,93	4.459.311.556.974,00	28,2048	

$$\text{Capaian kinerja Triwulan III tahun 2025} = \frac{28,2048}{5,000} \times 100\% = 564,09 \%$$

Capaian kinerja untuk IKSS.1 Triwulan III tahun 2025 mencapai 564,09 %, menunjukkan bahwa pendapatan termobilisasi dengan baik, dengan nilai deviasi yang semakin menurun pada trend bulanan.

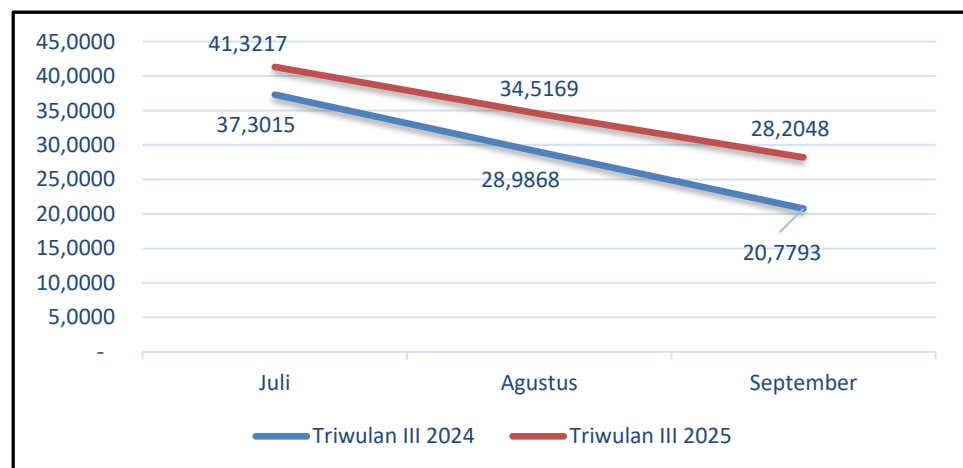


3.1.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan III tahun 2024

Realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan III tahun 2025 mencapai 28,2048 % dan Triwulan III tahun 2024 mencapai 20,7793 %:

Periodesasi	Nilai Deviasi		
	Juli	Agustus	September
Triwulan III 2024	37,3015	28,9868	20,7793
Triwulan III 2025	41,3217	34,5169	28,2048

Perbandingan realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan III tahun 2025 sebesar 28,2048 % mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada Triwulan III tahun 2024 sebesar 20,7793 % atau turun sebesar 7,4255 %, hal ini menunjukkan kinerja yang belum baik dari Triwulan III tahun 2024 (makin menjauh dari garis normal).



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.1	:	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
IKSS.1	:	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)

$$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} - 1 \times 100\% \right)$$

Dimana :

y	= Nilai Deviasi
Realisasi	= Realiasi PAD tahun ke n
Belanja	= Belanja yang bersumber dari PAD

No.	Uraian	Nilai Absolut dari Total Realisasi PAD	Total PAD dalam APBD	Nilai Deviasi (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 4.459.311.556.974,00	82,0477
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 4.459.311.556.974,00	49,7032
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 4.459.311.556.974,00	28,2048
4	Triwulan IV			

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 495.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.533.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93			
2	Total PAD dalam APBD	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,00			
	Nilai Deviasi	94,6136	88,8792	82,0477	67,3299	60,9769	49,7032	41,3217	34,5169	28,2048			

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

SS.1	:	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
IKSS.1	:	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)

No.	Uraian	Nilai Absolut dari Total Realisasi PAD	Total PAD dalam APBD	Nilai Deviasi (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 4.760.692.664.094,00	76,429
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 4.760.692.664.094,00	48,672
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.760.692.664.094,00	20,779
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 4.760.692.664.094,00	11,597

$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} - 1 \times 100\% \right)$

Dimana :
y = Nilai Deviasi
Realisasi = Realiasi PAD tahun ke n
Belanja = Belanja yang bersumber dari PAD

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.338.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	Total PAD dalam APBD	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00
	Nilai Deviasi	92,5513	85,1946	76,4288	64,0142	56,7756	48,6722	37,3015	28,9868	20,7793	12,4706	1,6802	11,5972

3.1.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja IKSS.1 Triwulan III tahun 2025 sebesar 28,2048 dan terhadap target jangka menengah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD 2025 – 2029, dimana pada akhir tahun 2030 target kinerja IKSS.1 ini sebesar 8,51. Terhadap target jangka menengah bahwa capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 telah mencapai 331,43 %.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	20,2048	8,51	331,43

3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan data kinerja triwulan III tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera) tidak digunakan.

3.1.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN III 2025	REALISASI TRIWULAN III 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	35,00	20,2048	57,728	Sinergi dan kolaborasi bersama OPD pemungut retribusi dalam menggali potensi PAD dari sektor Retribusi	
						Perpanjangan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penambahan kuota akses data kependudukan	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Pembentukan Satgas OPAD PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin	

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	35,00	20,2048	57,728	312.400.000	98.200.000	31,43	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Terus melakukan rapat koordinasi dengan OPD pemungut retribusi dan BUMD/BUMS yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara rutin 3. Pelaksanaan operasi gabungan dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Sat Pol PP berjalan cukup efektif 4. Koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan Kementerian ESDM terkait dengan dana bagi hasil Migas 5. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari sisi pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah 6. Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.1.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.2.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	35,00	20,2048	57,728	312.400.000	98.200.000	31,43	

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Triwulan III tahun 2025 ini belum dihitung karena realisasi kinerja anggaran belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025

3.1.3 Sasaran Strategis 2 (SS.2)

SS.2

Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah

".....Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan....."

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

Seiring dengan mandatory Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah agar mempunyai desentralisasi fiskal yang semakin kuat, Pemerintah Pusat melalui perimbangan keuangan mulai mengurangi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), untuk menilai kemampuan kinerja pembiayaan daerah dalam membiayai pembangunan di tingkat daerah. Peran pemerintah daerah yang diserahkan dalam mengelola dan mengatur keuangan dengan reformasi di bidang keuangan adalah diharapkan membuat pemerintah lebih independen melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Dari 4 (empat) komponen PAD, yang mempunyai kontribusi terbesar yaitu penerimaan pajak daerah, dimana pilar penguatan *local taxing power*, diharapkan peningkatan desentralisasi fiskal melalui pajak daerah menjadi instrumen kunci dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah, *performance* layanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Perpajakan menghasilkan negara yang lebih representatif dan akuntabel,

karena ekstraksi pendapatan menciptakan kontrak sosial fiskal antara negara dan warga negara, dimana pemerintah cenderung melakukan tawar-menawar dengan pembayar pajak, bertukar perwakilan dan layanan untuk meningkatkan perpajakan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang mandiri menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan dan pembiayaan di daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan desentralisasi fiskal daerah. Salah satu faktor pendukung yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kekuatan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Formula Perhitungan IKSS.2:

$$IKF = 1 - \left(\frac{[Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH]}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH} \right)$$

Dimana:

IKF = Indeks Kemandirian Fiskal

Tr_{GP} = *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)

Tr_{SP} = Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)

B = *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)

REVSH = Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Kehutanan

REV_{OR} = Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1 = Nilai Invers

3.1.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Pengukuran data kinerja:

No.	Uraian	Realisasi Triwulan III tahun 2025 [Rp.]
[1]	[2]	[3]
I	Pembilang:	
1	Tr _{GP}	1.262.251.710.974,00
2	Tr _{SP}	547.785.603.568,00
3	B	0,00
4	REVSH	1.522.729.990.900,00
	Sub Total I	3.332.767.305.442,00
II	Penyebut:	
1	REV _{OR}	3.201.572.841.453,93
2	Tr _{GP}	1.262.251.710.974,00
3	Tr _{SP}	547.785.603.568,00
4	B	0,00
5	REVSH	1.522.729.990.900,00
	Sub Total II	6.534.340.146.895,93

Capaian Triwulan III 2025: $IKF = 1 - \left(\frac{3.332.767.305.442,00}{6.534.340.146.895,93} \right) = 0,490$

Capaian indeks kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III tahun 2025 sebesar 49,00 % yang mengindikasikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah otonom dengan kategori menuju mandiri (dibawah nilai 50%). Dalam membiayai pembangunan di Sumatera Selatan masih mempunyai ketergantungan dengan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Terhadap target tahun 2025, nilai IKF = $\frac{0,490}{0,4340} \times 100 \% = 112,90\%$

Upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan mencapai 112,90 %, namun nilai indeks kemandirian fiskal Sumatera Selatan masih belum mandiri (menuju mandiri).

3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan III tahun 2024

Nilai realisasi capaian kinerja IKSS.2 apabila dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024, posisi indeks kemandirian fiskal Sumatera Selatan mengalami fluktuatif antara mandiri dan menuju mandiri.

Periodesasi	Indeks Kemandirian Fiskal		
	Juli	Agustus	September
Triwulan III 2024	0,528	0,479	0,503
Triwulan III 2025	0,486	0,450	0,490

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.2	:	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
IKSS.2	:	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	TrGP	Rp 486.492.112.670,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 1.262.251.710.974,00	
2	Trsp	Rp 7.055.512.461,00	Rp 362.230.490.246,00	Rp 547.785.603.568,00	
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	-
4	REVSH	Rp 405.228.980.350,00	Rp 945.516.417.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	
Total		Rp 898.776.605.481,00	Rp 2.095.968.136.816,00	Rp 3.332.767.305.442,00	

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	REVor	Rp 800.547.217.519,50	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 3.201.572.841.453,93	
5	TrGP	Rp 486.492.112.670,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 1.262.251.710.974,00	
3	TrSP	Rp 7.055.512.461,00	Rp 362.230.490.246,00	Rp 547.785.603.568,00	
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	-
5	REVSH	Rp 405.228.980.350,00	Rp 945.516.417.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	
Total		Rp 1.699.323.823.000,50	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 6.534.340.146.895,93	

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Kemandirian Fiskal	0,5289	0,4831	0,5100	
IKF Invers	0,4711	0,5169	0,4900	

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	TrGP	Rp 243.345.202.000,00	Rp 365.017.803.300,00	Rp 486.492.112.670,00	Rp 666.548.627,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 1.031.586.430.670,00	Rp 1.262.251.710.974,00	Rp 1.262.251.710.974,00			
2	Trsp	Rp -	Rp 275.132.837.961,00	Rp 7.055.512.461,00	Rp 344.913.670.956,00	Rp 394.532.065.681,00	Rp 362.230.490.246,00	Rp 532.677.888.716,00	Rp 786.810.709.818,00	Rp 547.785.603.568,00			
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
4	REVSH	Rp 126.821.779.500,00	Rp 214.996.311.100,00	Rp 405.228.980.350,00	Rp 613.868.338.750,00	Rp 813.254.620.500,00	Rp 945.516.417.900,00	Rp 1.199.349.976.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00			
Total		Rp 370.166.981.500,00	Rp 855.146.952.361,00	Rp 898.776.605.481,00	Rp 959.448.558.333,00	Rp 1.996.007.914.851,00	Rp 2.095.968.136.816,00	Rp 2.763.614.296.286,00	Rp 3.571.792.411.692,00	Rp 3.332.767.305.442,00			

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	REVor	Rp 240.196.687.137,67	Rp 495.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.706.709,94	Rp 2.920.093.533.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93			
2	TrGP	Rp 243.345.202.000,00	Rp 365.017.803.300,00	Rp 486.492.112.670,00	Rp 666.548.627,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 788.221.228.670,00	Rp 1.031.586.430.670,00	Rp 1.262.251.710.974,00	Rp 1.262.251.710.974,00			
3	Trsp	Rp -	Rp 275.132.837.961,00	Rp 7.055.512.461,00	Rp 344.913.670.956,00	Rp 394.532.065.681,00	Rp 362.230.490.246,00	Rp 532.677.888.716,00	Rp 786.810.709.818,00	Rp 547.785.603.568,00			
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5	REVSH	Rp 126.821.779.500,00	Rp 214.996.311.100,00	Rp 405.228.980.350,00	Rp 613.868.338.750,00	Rp 813.254.620.500,00	Rp 945.516.417.900,00	Rp 1.199.349.976.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00	Rp 1.522.729.990.900,00			
Total		Rp 610.363.668.637,67	Rp 1.351.055.896.445,99	Rp 1.699.323.823.000,50	Rp 2.416.308.081.379,22	Rp 3.736.168.857.076,74	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 5.380.263.002.995,94	Rp 6.491.885.945.175,03	Rp 6.534.340.146.895,93			

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	November
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,606	0,633	0,529	0,397	Rp 0,534	0,483	0,514	0,550	0,510			
	IKF Invers	0,394	0,367	0,471	0,603	0,466	0,517	0,486	0,450	0,490			

$$\left(\frac{[TrGP + TrSP + B + REVSH]}{REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH} \right)$$

IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal
TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
TrSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
B adalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)
REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan
REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024		
SS.2	:	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
IKSS.2	:	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	TrGp	Rp 489.925.420.000,00	Rp 1.062.769.464.650,00	Rp 1.430.047.935.968,00	Rp 1.806.673.215.634,00
2	TrSp	Rp 270.122.897.177,00	Rp 241.782.644.906,00	Rp 314.551.341.254,00	Rp 1.189.620.027.205,00
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 373.725.738.760,00	Rp 939.676.066.826,00	Rp 1.988.297.808.004,00	Rp 2.645.802.349.840,00
Total		Rp 1.133.774.055.937,00	Rp 2.244.228.176.382,00	Rp 3.732.897.085.226,00	Rp 5.642.095.592.679,00

No.	Uraian	Jumlah			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	REVor	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 5.312.866.005.773,45
2	TrGP	Rp 489.925.420.000,00	Rp 1.062.769.464.650,00	Rp 1.430.047.935.968,00	Rp 1.806.673.215.634,00
3	TrSP	Rp 270.122.897.177,00	Rp 241.782.644.906,00	Rp 314.551.341.254,00	Rp 1.189.620.027.205,00
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	REVSH	Rp 373.725.738.760,00	Rp 939.676.066.826,00	Rp 1.988.297.808.004,00	Rp 2.645.802.349.840,00
Total		Rp 2.255.925.057.076,74	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 7.504.351.303.896,40	Rp 10.954.961.598.452,40

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Indeks Kemandirian Fiskal	0,5026	0,4787	0,4974	0,5150
IKF Invers	0,4974	0,5213	0,5026	0,4850

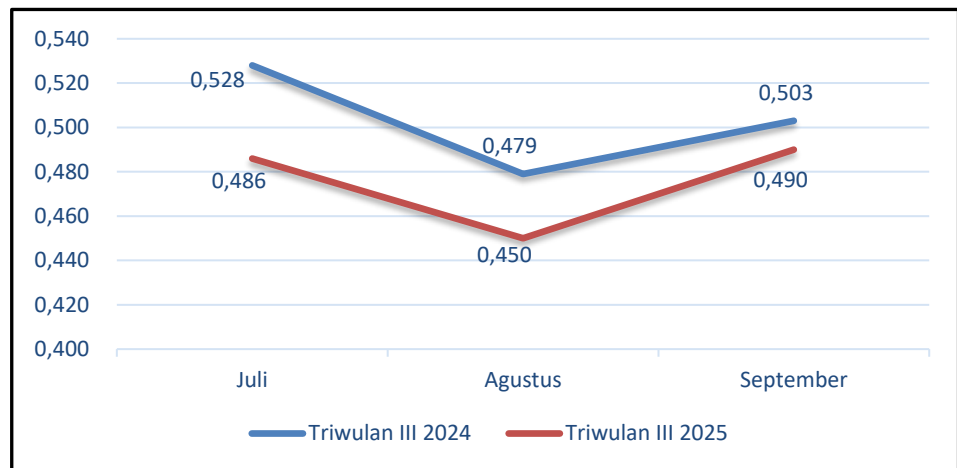
No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	TrGP	Rp 122.481.355.000,00	Rp 367.444.065.000,00	Rp 489.925.420.000,00	Rp 687.105.311.100,00	Rp 809.586.666.100,00	Rp 1.062.769.464.650,00	Rp 1.067.379.920.400,00	Rp 1.194.513.368.400,00	Rp 1.430.047.935.968,00	Rp 1.557.665.355.630,00	Rp 1.806.673.215.634,00	Rp 1.806.673.215.634,00
2	TrSP	Rp 266.191.210.000,00	Rp 267.167.210.000,00	Rp 270.122.897.177,00	Rp 275.149.778.095,00	Rp 396.421.684.656,00	Rp 241.782.644.906,00	Rp 528.767.285.205,00	Rp 835.551.775.085,00	Rp 314.551.341.254,00	Rp 1.047.220.389.844,00	Rp 1.189.620.027.205,00	Rp 1.189.620.027.205,00
3	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	REVSH	Rp 193.849.918.800,00	Rp 237.952.406.400,00	Rp 373.725.738.760,00	Rp 616.032.547.260,00	Rp 691.497.025.010,00	Rp 939.676.066.826,00	Rp 1.070.377.510.378,00	Rp 1.647.578.166.258,00	Rp 1.988.297.808.004,00	Rp 1.510.958.441.255,00	Rp 2.645.802.349.840,00	Rp 2.645.802.349.840,00
Total		Rp 582.522.483.800,00	Rp 872.563.681.400,00	Rp 1.133.774.055.937,00	Rp 1.578.287.636.455,00	Rp 1.897.505.375.766,00	Rp 2.244.228.176.382,00	Rp 2.666.524.715.983,00	Rp 3.677.643.309.743,00	Rp 3.732.897.085.226,00	Rp 4.115.844.186.729,00	Rp 5.642.095.592.679,00	Rp 5.642.095.592.679,00

No.	Uraian	Jumlah													
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]		
1	REVOR	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.338.204,98	Rp 3.380.719.250.289	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552	Rp 5.312.866.005.773	Rp 5.312.866.005.773,45		
2	TRGP	Rp 122.481.355.000,00	Rp 367.444.065.000,00	Rp 489.925.420.000,00	Rp 687.105.311.100,00	Rp 809.586.666.100	Rp 1.062.769.464.650,00	Rp 1.067.379.920.400	Rp 1.194.513.368.400	Rp 1.430.047.935.968,00	Rp 1.557.665.355.630	Rp 1.806.673.215.634	Rp 1.806.673.215.634,00		
3	TRSP	Rp 266.191.210.000,00	Rp 267.167.210.000,00	Rp 270.122.897.177,00	Rp 275.149.778.095,00	Rp 396.421.684.656	Rp 241.782.644.906,00	Rp 528.767.285.205	Rp 835.551.775.085	Rp 314.551.341.254,00	Rp 1.047.220.389.844	Rp 1.189.620.027.205	Rp 1.189.620.027.205,00		
4	B	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	REVSH	Rp 193.849.918.800,00	Rp 237.952.406.400,00	Rp 373.725.738.760,00	Rp 616.032.547.260,00	Rp 691.497.025.010,00	Rp 939.676.066.826,00	Rp 1.070.377.510.378,00	Rp 1.647.578.166.258,00	Rp 1.988.297.808.004,00	Rp 1.510.958.441.255,00	Rp 2.645.802.349.840,00	Rp 2.645.802.349.840,00		
Total		Rp 937.131.162.833,45	Rp 1.577.404.660.494,04	Rp 2.255.925.057.076,74	Rp 3.291.459.189.500,31	Rp 3.955.287.842.849,47	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 5.651.408.054.187,98	Rp 7.058.362.560.031,98	Rp 7.504.351.303.896,40	Rp 8.282.851.383.281,23	Rp 10.954.961.598.452,40	Rp 10.954.961.598.452,40		

No.	Uraian	Jumlah											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	November
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,622	0,553	0,503	0,480	Rp 0,480	0,479	0,472	0,521	0,497	0,497	0,515	0,515
	IKF Invers	0,378	0,447	0,497	0,520	0,520	0,521	0,528	0,479	0,503	0,503	0,485	0,485

$$\left(\frac{[TrGP + TrSp + B + REVSH]}{REVOR + TrGP + TrSp + B + REVSH}\right)$$

IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal
TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
TrSp adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
B adalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah)
REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan
REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah



Trend tertinggi kemandirian fiskal Sumatera Selatan terjadi pada Bulan September tahun 2025 dengan nilai IKF sebesar 0,490 dan terendah terjadi pada Bulan Agustus tahun 2025 dengan nilai IKF sebesar 0,450.

3.1.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan Triwulan III tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

No.	Uraian	Indeks Kemandirian Fiskal		Capaian Kinerja Triwulan III 2025
		Realisasi Triwulan III 2025	Target RPJMD 2030	
1.	IKF	0,490	0,520	94,23 %
2.	Pendapatan	6.534.340.146.895,93	13.549.281.593.204,80	0,520
3.	TKD	3.332.767.305.442,00	6.468.639.847.802,56	

Capaian realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan Triwulan III tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target dalam RPJMD tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2030 telah mencapai 94,23 %.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,490	0,520	94,23

3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan data kinerja triwulan III tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera) tidak digunakan.

3.1.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN III 2025	REALISASI TRIWULAN III 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,564	0,490	86,879	Memperkuat basis data pajak daerah dengan potensi kemampuan daerah	
						Meningkatkan intensifikasi pajak daerah dengan program peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah	
						Memperluas ekstensifikasi pajak daerah dengan peningkatan pendaftaran wajib pajak baru untuk memberikan stimulus peningkatan investasi daerah	
						Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat secara berkala waktu	
						Kerjasama dengan pemerintah Kab/Kota untuk berkontribusi dalam Optimalisasi Pajak Daerah	
						Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern	

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,564	0,490	86,879	980.400.000	250.000.000	25,50	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Tagging pendanaan pembangunan melalui PAD pada APBD telah tepat sasaran <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Memberikan program penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan 3. Integrasi data wajib pajak pusat dengan data wajib pajak daerah pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan 4. Perpanjangan kerjasama dengan BP Batam dalam rangka back up database server utama yang ada main/recovery data 5. Pembangunan dan pengembangan aplikasi samsat bapenda, perbaikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait pengolahan, pengamanan dan up grading data serta peralatan pengolahan data yang lebih canggih dan modern 6. Pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk kendali kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah 7. Meningkatkan intensifikasi, memperluas ekstensifikasi serta diversifikasi pajak daerah 8. Memperluas akses keuangan pembayaran pajak daerah melalui plaform digitalisasi untuk inklusi keuangan yang lebih baik

3.1.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.3.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	0,564	0,490	86,879	980.400.000	250.000.000	25,50	

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Triwulan III tahun 2025 ini belum dihitung karena realisasi kinerja anggaran belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025.

3.1.4 Sasaran Strategis 3 (SS.3)

SS.3

Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

".....Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah"

Mencermati perkembangan dinamika yang ada saat ini, maka perencanaan pembangunan daerah memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang bersumber pada kemampuan fiskal daerah melalui sumber – sumber pendapatan daerah. Kemandirian otonomi daerah dalam hal mengatur, mengurus dan mengelolah kemampuan keuangan daerah yang tercermin pada pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana amanat Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Belanja daerah (*government expenditure*) dalam bentuk belanja program, kegiatan serta sub kegiatan merupakan semua kewajiban entitas Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Belanja program, kegiatan serta sub kegiatan tersebut disusun berdasarkan skala prioritas daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran (*budget constraint*), misalnya belanja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan makroekonomi merupakan cara yang dilakukan pemerintah untuk memberikan stimulus terhadap permintaan agregat dengan mengendalikan penerimaan pajak daerah dan intervensi belanja daerah (*government expenditure*). Ketika konsumsi belanja daerah dinaikan dan/atau tarif pajak daerah diturunkan, maka akan terjadi *multiplier effect* dari pemerintah ke sektor swasta dalam bentuk investasi yang berdampak pada permintaan akan barang dan jasa serta modal akan mengalami kenaikan, jika hal ini tidak diikuti dengan keseimbangan penawaran akan menyebabkan terjadinya inflasi

Formula Perhitungan IKSS.3

$$y = \left(\frac{[Pendapatan\ tahun\ n - Pendapatan\ tahun\ (n - 1)]}{Pendapatan\ tahun\ (n - 1)} \right) \times 100\ %$$

Dimana:

y = Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD

Pendapatan n = Realisasi Pendapatan tahun berjalan

Pendapatan (n-1) = Realisasi Pendapatan tahun sebelumnya

3.1.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Pengukuran data kinerja Triwulan III tahun 2025:

No.	Bulan	Realisasi Pendapatan [Rp.]		Pertumbuhan (%)	Target Tahunan 2025
		2024	2025		
1.	Januari	937.131.162.833,45	610.363.668.637,67	(34,689)	1,26
2.	Februari	1.577.409.132.494,04	1.351.055.896.145,99	(14,350)	
3.	Maret	2.255.925.057.076,74	1.699.323.823.000,50	(24,673)	
4.	April	3.291.459.189.500,31	3.082.180.160.422,22	(6,3582)	
5.	Mei	3.955.287.842.849,47	3.736.168.857.076,74	(5,540)	
6.	Juni	4.687.788.699.397,97	4.338.860.285.073,79	(7,743)	
7.	Juli	5.651.408.054.185,98	5.383.297.239.495,94	(4,744)	
8.	Agustus	7.058.362.580.031,98	6.498.375.238.175,03	(7,934)	
9.	September	7.510.343.386.396,40	6.543.538.055.895,93	(12,873)	

Capaian kinerja IKSS.3 Triwulan III tahun 2025 secara *quarterly-on-quarterly* mengalami pertumbuhan negatif sebesar (12,873 %), maupun secara *month-to-month*.

Terhadap target tahun 2025 sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029, capaian sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{(12,873)}{1,26} \times 100\% = (10,27\%)$$

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.3	:	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD
IKSS.3	:	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

No.	Uraian	Tahun		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD (%)
		2025	2024	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW I	Rp 1.699.323.823.000,50	Rp 2.255.925.057.076,74	-24,673
2	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW II	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 4.687.788.699.397,97	-7,443
3	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW III	Rp 6.543.538.055.895,93	Rp 7.510.343.386.396,40	-12,873
4	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW IV			

$$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n - 1)]}{Pendapatan\ (n - 1)} \right) \times 100\ %$$

Dimana :
Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n
Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)

No.	TAHUN	PENDAPATAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	2024	Rp 937.131.162.833,45	Rp 1.577.409.132.494,04	Rp 2.255.925.057.076,74	Rp 3.291.459.189.500,31	Rp 3.955.287.842.849,47	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 5.651.408.054.185,98	Rp 7.058.362.580.031,98	Rp 7.510.343.386.396,40			
2	2025	Rp 610.363.668.637,67	Rp 1.351.055.896.145,99	Rp 1.699.323.823.000,50	Rp 3.082.180.160.422,22	Rp 3.736.168.857.076,74	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 5.383.297.239.495,94	Rp 6.498.375.238.175,03	Rp 6.543.538.055.895,93			
% Pertumbuhan Pendapatan Daerah		-34,869	-14,350	-24,673	-6,3582	-5,540	-7,443	-4,744	-7,934	-12,873			

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024		
SS.3	:	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD
IKSS.3	:	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD

No.	Uraian	Tahun		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD (%)
		2024	2023	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW I	Rp 2.255.925.057.076,00	Rp 2.002.284.852.029,98	12,668
2	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW II	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 4.271.959.130.659,26	9,734
3	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW III	Rp 7.510.343.386.396,40	Rp 6.502.497.240.699,34	15,499
4	Pendapatan Daerah Prov. Sumsel TW IV	Rp 10.965.540.990.987,20	Rp 9.603.554.186.271,61	14,182

$$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n - 1)]}{Pendapatan\ (n - 1)} \right) \times 100\ %$$

Dimana :
Pendapatan n = Pendapatan tahun ke n
Pendapatan n-1 = Pendapatan tahun ke (n-1)

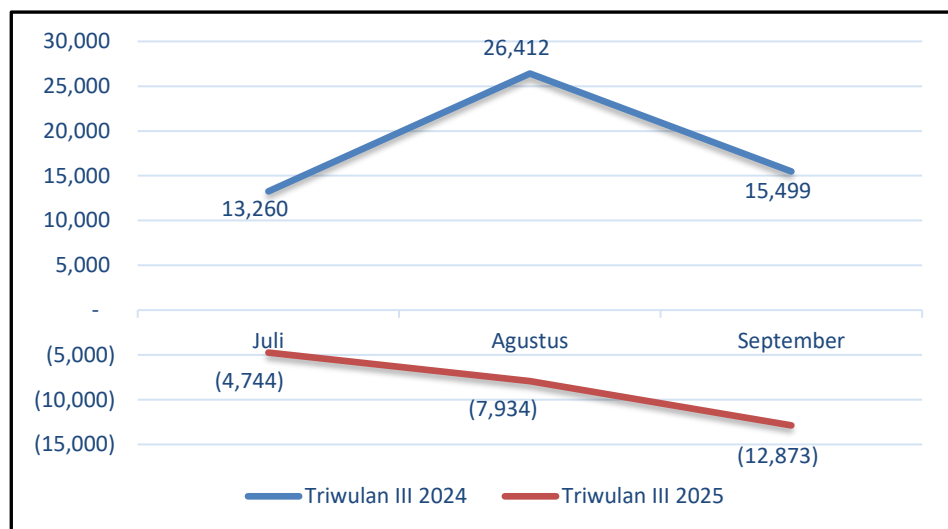
No.	TAHUN	PENDAPATAN											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	2023	Rp 642.422.706.406,28	Rp 1.187.588.378.704,90	Rp 2.002.284.852.029,98	Rp 2.756.544.748.321,62	Rp 3.270.429.803.288,63	Rp 4.271.959.130.659,26	Rp 4.989.773.356.256,68	Rp 5.583.638.844.500,25	Rp 6.502.497.240.699,34	Rp 7.927.349.839.005,46	Rp 8.672.800.719.256,51	Rp 9.603.554.186.271,61
2	2024	Rp 937.131.162.833,45	Rp 1.577.409.132.494,04	Rp 2.255.925.057.076,00	Rp 3.291.459.189.500,31	Rp 3.955.287.842.849,47	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 5.651.408.054.165,98	Rp 7.058.362.560.031,98	Rp 7.510.343.386.396,40	Rp 9.034.450.070.781,23	Rp 9.734.258.083.136,37	Rp 10.965.540.990.987,20
% Pertumbuhan Pendapatan Daerah		45,875	32,825	12,668	19,4053	20,941	9,734	13,260	26,412	15,499	13,966	12,239	14,182

3.1.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan III Tahun 2024

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan dalam APBD (IKSS.3) Triwulan III tahun 2025 apabila dibandingkan pada Triwulan III tahun 2024 tergambar pada kinerja sebagai berikut:

Periodesasi	Pertumbuhan Pendapatan dalam APBD		
	Juli	Agustus	September
Triwulan III 2024	13,260	26,412	15,499
Triwulan III 2025	(4,744)	(7,934)	(12,873)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III tahun 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan negatif sebesar (12,873 %) dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 15,499 %.



3.1.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan (IKSS.3) Triwulan III tahun 2025 terhadap rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030 sebagai berikut:

No.	Tahun	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		Realisasi Triwulan III	Target RPJMD 2030	
1.	2024	7.510.343.386.396,40		(12,873)
2.	2025	6.543.538.055.895,93		
3.	2030			1,48

Capaian realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah Triwulan III tahun 2025, apabila dibandingkan dengan rencana target RPJMD tahun 2025-2029 dimana pada tahun 2030:

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{[12,873]}{6,43} \times 100\% = (869,79\%)$$

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	(12,873)	1,48	(869,79)

- 3.1.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
- Perbandingan data kinerja triwulan III tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera) tidak digunakan.

3.1.4.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN III 2025	REALISASI TRIWULAN III 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	0,315	(12,873)	(4.086,87)	Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah	Penyesuaian dan harmonisasi kebijakan UU 1/2022 kedalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2023 Sinergi dan kolaborasi pendanaan dan kegiatan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Menyesuaikan dengan pencatatan akuntansi di SIPD Terus berupaya melakukan sosialisasi kebijakan pajak daerah secara massif Memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif untuk menstimulus pertumbuhan investasi di Sumatera Selatan Meningkatkan kinerja makroekonomi mendukung PSN untuk mendapatkan umpan balik berupa pemberian Dana Insentif Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam APBD	0,315	(12,873)	(4.086,87)	535.000.000	204.200.000	38,17	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 4. Perubahan rencana kerja memastikan ketercapaian kinerja dengan dukungan anggaran <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perubahan paradigma kebijakan UU 28/2009 ke UU 1/2022, dimana pada tahun 2025, awal pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB 2. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025 mengamatkan bahwa Opsen PKB dan Opsen BBN-KB split payment secara real time ke RKUD Kabupaten/Kota 3. Secara pencatatan akuntansi realisasi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB langsung dicatat ke RKUD Kabupaten/Kota 4. Belum optimalnya upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan 5. Kondisi perekonomian di Sumatera Selatan dan di seluruh provinsi di Pulau Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi 6. Konsolidasi fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah mengalami penyesuaian sehingga mempengaruhi nilai transfer ke daerah

3.1.4.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.4.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	0,315	(12,873)	(4.086,87)	535.000.000	204.200.000	38,17	

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Triwulan III tahun 2025 ini belum dihitung karena realisasi kinerja anggaran belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025.

3.1.5 Sasaran Strategis 4 (SS.4)

SS.4

Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

".....Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (local tax ratio) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi....."

Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah).

Peran pendapatan pajak daerah dalam perekonomian regional itu sendiri ditunjukkan dengan membandingkan realisasi pajak daerah terhadap total pendapatan dari perekonomian daerah provinsi, rasio pajak daerah (*local tax ratio*) yaitu perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan total pendapatan dari aktivitas ekonomi regional provinsi. Sistem pengaturan keuangan daerah, rasio pajak daerah merupakan perbandingan antara pajak daerah yang diterima sesuai dengan kewenangan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), angka rasio pajak daerah dipengaruhi oleh pangsa PDRB. Peran lain dari pendapatan pajak akan mempengaruhi *ekspansi* atau relaksasi kegiatan produksi, pengeluaran, serta penghematan rumah tangga.

Dimana Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan akuntabel. PAD memegang peranan yang sangat penting dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah

keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

IKSS.4

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Formula Perhitungan IKSS.4:

$$IKSS.4 = \frac{\sum_{k=1}^i (Pajak Daerah Provinsi + Pajak Daerah Kabupaten/Kota)}{Total PDRB} \times 100 \%$$

Dimana:

Pajak Daerah = Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Non Migas

3.1.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Pengukuran data kinerja dengan perbandingan antara target dan realisasi kinerja IKSS.4 Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Bulan	Uraian Tahun 2025		Persentase (%)	Target Tahunan 2025
		Pajak Daerah Gabungan Pemerintah Daerah	PDRB		
1.	Januari	415.317.380.972,18	56.936.149.266.666,70	0,729	1,25
2.	Februari	880.980.781.519,52	85.404.223.900.000,00	1,032	
3.	Maret	1.328.994.487.798,91	170.808.447.800.000,00	0,778	
4.	April	2.013.898.111.908,24	230.958.397.140.000,00	0,872	
5.	Mei	2.502.560.326.082,50	261.033.371.810.000,00	0,959	
6.	Juni	3.626.094.936.395,24	351.258.295.820.000,00	1,032	
7.	Juli	3.783.656.476.320,71	413.023.695.820.000,00	0,916	
8.	Agustus	4.338.198.733.887,11	443.906.395.820.000,00	0,977	
9.	September	4.980.079.723.928,71	536.554.495.820.000,00	0,928	

Realisasi capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB
Triwulan III tahun 2025 sebesar 0,928 %

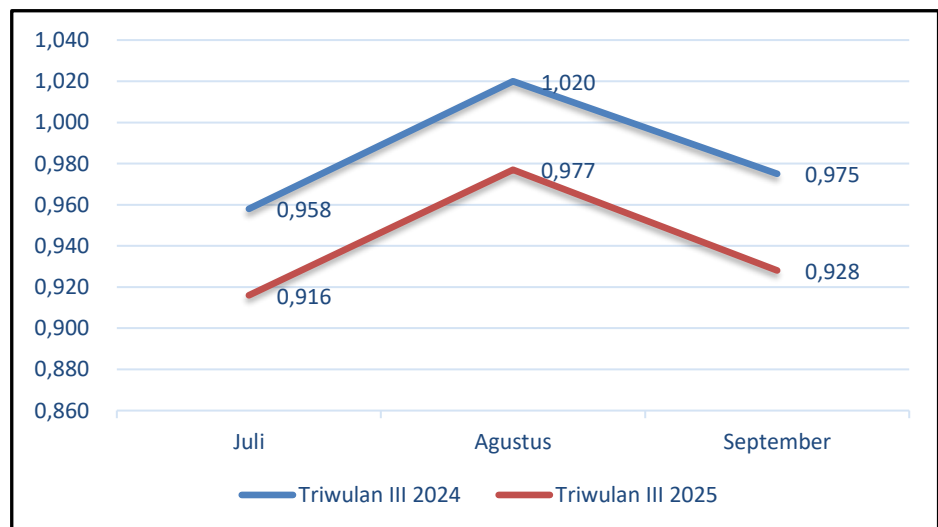
$$\text{Capaian terhadap target tahun 2025} = \frac{0,928}{1,25} \times 100 \% = 74,24 \%$$

3.1.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan III Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB sebagai berikut:

Periodesasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
	Juli	Agustus	September
Triwulan III 2024	0,958	1,020	0,975
Triwulan III 2025	0,916	0,977	0,928

Realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tertinggi terjadi pada Bulan Agustus tahun 2025 sebesar Rasio 0,977 dan terendah terjadi pada Bulan Juli tahun 2025 Rasio 0,916.



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.4	:	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
IKSS.4	:	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No.	Periode	Pajak Daerah	Total PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.328.994.487.798,91	Rp 170.808.447.800.000,00	0,778
2	Triwulan II	Rp 3.626.094.936.395,24	Rp 351.258.295.820.000,00	1,032
3	Triwulan III	Rp 4.980.079.723.928,71	Rp 536.561.950.000.000,00	0,928
4	Triwulan IV			

$$IKSS.4 = \frac{\sum_{i=1}^4 (Pajak\ Daerah\ Provinsi + Pajak\ Daerah\ Kabupaten/Kota)}{Total\ PDRB} \times 100\%$$

Dimana:
Pajak Daerah : Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Pemerintahan Daerah	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Realisasi Bulan Januari	Realisasi s.d Februari	Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d April	Realisasi s.d Mei	Realisasi s.d Juni	Realisasi s.d Juli	Realisasi s.d Agustus	Realisasi s.d September	Realisasi s.d Oktober	Realisasi s.d November	Realisasi s.d Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Provinsi Sumatera Selatan	Rp 221.932.930.205,38	Rp 457.750.920.553,67	Rp 708.527.218.847,12	Rp 1.215.326.736.529,10	Rp 1.794.405.164.629,50	Rp 1.751.922.085.177,00	Rp 2.178.314.944.748,80	Rp 2.445.014.404.738,70	Rp 2.727.105.112.589,80			
Kab. Lahat	Rp 6.112.518.810,00	Rp 13.170.142.736,00	Rp 20.208.116.795,00	Rp 34.995.321.163,00	Rp 26.147.242.031,00	Rp 53.482.422.940,00	Rp 62.639.868.228,00	Rp 69.964.578.754,00	Rp 79.246.832.251,00			
Kab. Musi Banyuasin	Rp 10.312.666.991,00	Rp 33.094.748.950,00	Rp 47.174.419.409,00	Rp 58.478.728.005,35	Rp 30.645.522.723,00	Rp 90.661.650.331,35	Rp 107.794.686.913,35	Rp 124.357.203.334,35	Rp 152.158.419.663,35			
Kab. Musi Rawas	Rp 4.003.994.925,00	Rp 7.286.554.906,00	Rp 10.569.440.324,00	Rp 14.395.846.059,00	Rp 12.278.732.135,00	Rp 37.673.366.355,00	Rp 41.617.029.877,00	Rp 45.477.972.336,00	Rp 51.210.630.012,00			
Kab. Muara Enim	Rp 23.385.515.723,00	Rp 57.279.078.011,00	Rp 71.187.149.635,00	Rp 82.941.125.824,00	Rp 38.551.902.721,00	Rp 77.428.404.525,54	Rp 127.011.502.539,08	Rp 142.221.512.738,58	Rp 161.145.999.093,08			
Kab. Ogan Komering Ilir	Rp 6.627.794.481,00	Rp 13.315.914.259,00	Rp 20.401.564.709,00	Rp 26.746.027.519,00	Rp 26.028.235.209,00	Rp 42.753.276.477,00	Rp 51.777.944.745,00	Rp 75.690.052.360,00	Rp 108.989.368.211,00			
Kab. Ogan Komering Ulu	Rp 6.446.632.639,00	Rp 13.266.925.930,00	Rp 20.259.704.214,00	Rp 26.070.197.583,00	Rp 23.580.107.340,00	Rp 20.326.023.010,60	Rp 45.948.322.188,00	Rp 46.834.252.600,00	Rp 46.834.252.600,00			
Kota Palembang	Rp 92.726.032.033,00	Rp 191.145.895.531,00	Rp 288.159.270.193,00	Rp 373.903.700.731,00	Rp 385.550.200.015,00	Rp 634.818.682.034,00	Rp 780.080.571.592,00	Rp 931.109.823.392,00	Rp 1.131.509.162.722,00			
Kota Prabumulih	Rp 4.897.600.371,00	Rp 11.022.324.412,00	Rp 15.609.620.103,00	Rp 20.133.709.149,00	Rp 15.602.091.487,00	Rp 31.504.217.611,00	Rp 39.439.213.548,00	Rp 45.879.176.754,00	Rp 52.718.413.490,00			
Kota Pagar Alam	Rp 1.381.543.514,00	Rp 2.560.309.686,00	Rp 3.825.571.517,00	Rp 5.029.241.369,00	Rp 3.504.260.470,00	Rp 634.818.682.034,00	Rp 7.810.634.476,00	Rp 9.643.767.518,00	Rp 11.891.819.497,00			
Kota Lubuk Linggau	Rp 5.170.599.627,00	Rp 11.114.115.096,00	Rp 16.354.987.414,00	Rp 20.975.131.731,00	Rp 19.750.762.340,00	Rp 33.794.909.659,00	Rp 41.912.201.967,00	Rp 49.641.870.489,00	Rp 57.497.608.350,00			
Kab. Banyuasin	Rp 14.500.685.260,00	Rp 31.672.570.187,00	Rp 51.347.356.274,00	Rp 66.362.403.259,00	Rp 72.795.539.981,00	Rp 113.582.079.036,00	Rp 169.971.911.083,00	Rp 204.742.861.267,00	Rp 225.725.027.516,00			
Kab. Ogan Ilir	Rp 5.694.862.408,80	Rp 10.888.601.814,90	Rp 16.094.729.739,84	Rp 20.086.756.350,84	Rp 19.084.688.054,00	Rp 30.760.096.484,80	Rp 37.143.758.801,53	Rp 42.763.731.216,53	Rp 49.635.902.520,53			
Kab. OKU Timur	Rp 5.479.906.054,00	Rp 11.417.959.274,95	Rp 16.959.092.202,95	Rp 21.702.417.411,95	Rp 15.595.161.350,00	Rp 33.159.180.149,95	Rp 46.592.231.539,95	Rp 53.950.100.796,95	Rp 63.029.502.480,95			
Kab. OKU Selatan	Rp 1.929.150.093,00	Rp 3.883.182.467,00	Rp 4.714.196.594,00	Rp 4.882.012.288,00	Rp 5.524.141.728,00	Rp 8.790.074.536,00	Rp 9.881.547.113,00	Rp 10.959.536.203,00	Rp 12.176.421.568,00			
Kab. Empat Lawang	Rp 971.076.121,00	Rp 1.971.294.770,00	Rp 2.890.969.387,00	Rp 3.672.827.922,00	Rp 3.424.904.662,00	Rp 6.196.966.930,00	Rp 7.849.959.396,00	Rp 9.661.764.458,00	Rp 11.487.165.394,00			
Kab. Pemukut Abas Lematang Ilir	Rp 1.937.133.251,00	Rp 4.420.246.152,00	Rp 6.931.024.611,00	Rp 8.660.043.903,00	Rp 5.065.949.770,00	Rp 10.938.752.930,00	Rp 11.095.214.907,00	Rp 11.095.214.907,00	Rp 11.095.214.907,00			
Kab. Musi Rawas Utara	Rp 1.806.738.465,00	Rp 5.719.996.783,00	Rp 7.780.055.830,00	Rp 9.535.885.111,00	Rp 5.025.719.437,00	Rp 13.484.066.174,00	Rp 16.774.932.658,00	Rp 19.190.910.024,00	Rp 26.622.871.063,00			
TOTAL PAJAK DAERAH	Rp 415.317.380.972,18	Rp 880.980.781.519,52	Rp 1.328.994.487.798,91	Rp 2.013.898.111.908,24	Rp 2.502.560.326.082,50	Rp 3.626.094.936.395,24	Rp 3.783.656.476.320,71	Rp 4.338.198.733.887,11	Rp 4.980.079.723.928,71			
PDRB Bruto	Rp 56.936.149.266.666,70	Rp 85.404.223.900.000,00	Rp 170.808.447.800.000,00	Rp 230.958.397.140.000,00	Rp 261.033.371.810.000,00	Rp 351.258.295.820.000,00	Rp 413.023.695.820.000,00	Rp 443.906.395.820.000,00	Rp 536.554.495.820.000,00			
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,729	1,032	0,778	0,872	0,959	1,032	0,916	0,977	0,928			

PENGUKURAN KINERIA TAHUN 2024

SS.4	:	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
IKSS.4	:	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No.	Periode	Pajak Daerah	Total PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.303.214.379.780,00	Rp 157.419.880.000.000,00	0,828
2	Triwulan II	Rp 5.114.186.610.664,10	Rp 323.381.940.000.000,00	1,581
3	Triwulan III	Rp 4.826.588.202.304,24	Rp 495.039.530.000.000,00	0,975
4	Triwulan IV	Rp 7.005.576.280.698,56	Rp 663.961.720.000.000,00	1,055

$$IKSS.4 = \frac{\sum_{i=1}^4 \text{Pajak Daerah Provinsi} + \text{Pajak Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Total PDRB}} \times 100 \%$$

Dimana :
Pajak Daerah : Total Pajak Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Pemerintahan Daerah	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Realisasi Bulan Januari	Realisasi s.d Februari	Realisasi s.d Maret	Realisasi s.d April	Realisasi s.d Mei	Realisasi s.d Juni	Realisasi s.d Juli	Realisasi s.d Agustus	Realisasi s.d September	Realisasi s.d Oktober	Realisasi s.d November	Realisasi s.d Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
Provinsi Sumatera Selatan	Rp 338.301.273.608,00	Rp 640.380.662.479,00	Rp 939.309.157.989,00	Rp 1.477.928.189.115,60	Rp 1.794.405.164.629,50	Rp 2.108.501.901.671,50	Rp 2.580.339.157.261,10	Rp 2.940.866.503.514,50	Rp 3.294.153.288.460,30	Rp 3.661.891.432.535,50	Rp 4.147.187.326.033,10	Rp 4.744.701.180.377,20
Kab. Lahat	Rp 4.055.844.995,00	Rp 7.171.704.914,00	Rp 10.842.343.741,00	Rp 21.801.952.476,00	Rp 26.147.242.031,00	Rp 2.108.501.901.671,60	Rp 37.129.042.195,00	Rp 42.219.209.792,00	Rp 55.703.882.930,00	Rp 61.421.431.299,00	Rp 71.442.613.225,00	Rp 84.547.106.156,00
Kab. Musi Banyuasin	Rp 18.277.497.569,53	Rp 10.830.492.055,00	Rp 16.476.964.409,00	Rp 22.284.942.433,00	Rp 30.645.522.723,00	Rp 52.348.402.049,00	Rp 64.830.135.404,00	Rp 72.994.881.470,00	Rp 83.016.226.084,00	Rp 90.160.582.397,00	Rp 102.550.631.590,00	Rp 113.650.131.384,00
Kab. Musi Rawas	Rp 1.757.370.116,00	Rp 3.113.290.636,00	Rp 9.343.519.920,00	Rp 10.608.947.406,00	Rp 12.278.732.135,00	Rp 21.831.753.167,00	Rp 24.186.480.136,00	Rp 26.879.251.326,00	Rp 30.151.539.668,00	Rp 33.942.483.799,00	Rp 36.428.994.213,00	Rp 42.113.876.511,00
Kab. Muara Enim	Rp 7.546.286.811,00	Rp 14.893.309.050,00	Rp 22.831.540.727,00	Rp 30.417.963.243,00	Rp 38.551.902.721,00	Rp 48.553.649.916,00	Rp 61.723.185.889,00	Rp 72.697.773.174,00	Rp 87.468.619.508,00	Rp 101.833.758.672,00	Rp 112.645.043.891,00	Rp 127.905.669.439,00
Kab. Ogan Komering Ilir	Rp 3.836.771.992,00	Rp 7.205.740.659,00	Rp 10.499.979.800,00	Rp 16.368.648.946,00	Rp 26.028.235.209,00	Rp 29.641.274.807,00	Rp 33.500.240.177,00	Rp 38.746.189.359,00	Rp 64.483.952.995,00	Rp 69.342.136.557,00	Rp 73.689.225.045,00	Rp 127.905.669.439,00
Kab. Ogan Komering Ulu	Rp 5.410.036.485,00	Rp 10.432.748.428,00	Rp 14.480.225.309,00	Rp 19.171.389.677,00	Rp 23.580.107.340,00	Rp 15.076.981.287,00	Rp 32.289.724.056,00	Rp 38.130.976.404,00	Rp 44.192.574.072,00	Rp 49.484.611.140,90	Rp 54.899.348.481,92	Rp 62.247.346.094,92
Kota Palembang	Rp 72.854.520.201,00	Rp 72.854.520.201,00	Rp 178.370.543.309,00	Rp 286.531.259.322,00	Rp 538.730.804.168,00	Rp 567.646.956.719,00	Rp 660.122.398.786,00	Rp 823.840.558.931,00	Rp 917.930.420.644,00	Rp 917.930.420.644,00	Rp 1.004.857.047.377,00	Rp 1.171.585.354.710,00
Kota Prabumulih	Rp 2.858.560.176,00	Rp 5.815.062.097,00	Rp 8.955.323.761,00	Rp 11.848.689.120,00	Rp 15.602.091.487,00	Rp 18.891.563.199,00	Rp 22.519.298.735,00	Rp 26.925.764.154,00	Rp 30.566.429.293,00	Rp 34.196.166.609,00	Rp 37.376.695.269,00	Rp 40.684.910.404,00
Kota Pagar Alam	Rp 681.355.712,00	Rp 1.155.196.804,00	Rp 1.896.469.737,00	Rp 2.654.539.136,00	Rp 3.504.260.470,00	Rp 4.399.834.299,00	Rp 4.399.834.299,00	Rp 4.887.417.472,00	Rp 4.887.417.472,00	Rp 4.887.417.472,00	Rp 4.887.417.472,00	Rp 11.761.132.232,50
Kota Lubuk Linggau	Rp 4.432.111.600,00	Rp 7.989.242.029,00	Rp 12.135.007.365,00	Rp 15.672.411.901,00	Rp 19.750.762.340,00	Rp 23.337.750.876,00	Rp 30.441.850.291,00	Rp 35.748.462.182,00	Rp 41.581.770.322,00	Rp 49.568.783.917,00	Rp 54.582.812.046,00	Rp 61.457.389.070,00
Kab. Banyuasin	Rp 13.169.075.330,00	Rp 37.585.747.668,00	Rp 49.230.296.515,00	Rp 59.874.195.020,00	Rp 72.795.539.981,00	Rp 91.552.446.328,00	Rp 107.374.878.703,00	Rp 124.378.456.738,00	Rp 152.995.251.256,00	Rp 166.245.863.604,00	Rp 179.956.316.108,00	Rp 191.824.324.978,00
Kab. Ogan Ilir	Rp 13.169.075.330,00	Rp 6.752.282.481,00	Rp 10.588.959.656,00	Rp 14.561.211.337,00	Rp 19.084.688.054,00	Rp 22.848.439.829,00	Rp 26.717.952.975,00	Rp 25.452.924.471,00	Rp 34.128.996.396,00	Rp 38.985.424.310,00	Rp 71.081.807.672,00	Rp 76.028.741.547,00
Kab. OKU Timur	Rp 2.622.500.185,00	Rp 5.457.476.968,00	Rp 8.421.752.750,00	Rp 11.701.224.867,00	Rp 15.595.161.350,00	Rp 5.806.855.327,00	Rp 24.567.314.181,00	Rp 29.558.224.855,00	Rp 35.287.284.064,00	Rp 39.297.258.223,00	Rp 43.545.546.828,00	Rp 48.578.361.113,00
Kab. OKU Selatan	Rp 814.822.024,00	Rp 1.934.481.664,00	Rp 2.948.896.118,00	Rp 4.369.701.301,00	Rp 5.524.141.728,00	Rp 6.821.714.188,00	Rp 8.204.072.263,00	Rp 9.532.585.090,00	Rp 14.688.134.415,00	Rp 16.327.639.275,00	Rp 17.449.506.661,00	Rp 19.814.770.287,00
Kab. Empat Lintang	Rp 573.130.140,00	Rp 1.168.815.535,00	Rp 1.862.074.538,00	Rp 2.538.343.321,00	Rp 3.424.904.662,00	Rp 4.299.716.657,00	Rp 5.192.963.222,00	Rp 6.093.767.965,00	Rp 6.935.778.170,00	Rp 7.704.647.978,00	Rp 8.567.728.304,00	Rp 9.484.599.619,00
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 573.130.140,00	Rp 2.144.010.213,00	Rp 2.915.380.913,00	Rp 3.858.040.963,00	Rp 5.065.949.770,00	Rp 6.690.548.977,00	Rp 7.955.319.073,00	Rp 9.372.845.353,00	Rp 9.373.670.488,00	Rp 9.373.670.488,00	Rp 9.373.670.488,00	Rp 19.163.195.623,00
Kab. Musi Rawas Utara	Rp 638.300.106,00	Rp 1.456.366.470,00	Rp 2.307.943.223,00	Rp 3.679.955.043,00	Rp 5.025.719.437,00	Rp 6.351.072.247,00	Rp 7.700.322.998,94	Rp 9.387.832.871,94	Rp 13.132.827.779,94	Rp 14.595.608.046,94	Rp 15.834.430.772,94	Rp 52.122.521.713,94
TOTAL PAJAK DAERAH	Rp 491.471.662.520,53	Rp 838.341.150.351,00	Rp 1.303.214.379.780,00	Rp 2.015.871.604.627,60	Rp 2.502.560.326.082,50	Rp 5.114.186.610.664,10	Rp 3.646.718.728.656,04	Rp 4.173.995.464.977,44	Rp 4.826.588.202.304,24	Rp 5.367.191.335.967,34	Rp 6.046.356.161.476,96	Rp 7.005.576.280.698,56
PDRB Bruto	Rp 52.473.293.333.333,30	Rp 78.709.940.000.000,00	Rp 157.419.880.000.000,00	Rp 212.740.566.666.667,00	Rp 240.400.910.000.000,00	Rp 323.381.940.000.000,00	Rp 380.601.136.666.667,00	Rp 409.210.735.000.000,00	Rp 495.039.530.000.000,00	Rp 551.346.926.666.667,00	Rp 579.500.625.000.000,00	Rp 663.961.720.000.000,00
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,937	1,065	0,828	0,948	1,041	1,581	0,958	1,020	0,975	0,973	1,043	1,055

3.1.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut:

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,928	1,27	73,07

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 telah mengalami tingkat kemajuan sebesar 73,07 %.

3.1.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan data kinerja triwulan III tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera) tidak digunakan.

3.1.5.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN III 2025	REALISASI TRIWULAN III 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,913	0,928	101,643	Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota	Penguatan sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah	Konsolidasi Bersama Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah
						Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah	Memberikan insentif fiskal daerah untuk memberikan stimulus bagi investasi daerah
						Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB	Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar patuh dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah
						Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan	Kerjasama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi lainnya
						Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah	Melakukan pengawasan pajak daerah secara intensif berbasis risiko untuk mengendalikan kebocoran penerimaan pajak daerah

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
5.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,913	0,928	101,643	756.287.000	225.630.000	29,83	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 3. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Belum optimalnya pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB Bersama Pemerintahan Kabupaten/Kota 2. Kebijakan equivalen pembayaran pajak daerah PKB dan BBN-KB berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan di sektor pajak daerah 3. Perlambatan struktur perekonomian daerah yang mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi rendah 4. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah terutama pajak PKB 5. Kendaraan yang beroperasi dalam menjalankan usahanya di Sumatera Selatan banyak yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Selatan 6. Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengawasan pajak daerah 7. Belum optimalnya update data kendaraan bermotor 8. Layanan pembayaran pajak daerah belum seluruhnya menyentuh titik layanan sampai ke tingkat pedesaan

3.1.5.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.5.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,913	0,928	101,643	756.287.000	225.630.000	29,83	

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Triwulan III tahun 2025 ini belum dihitung karena realisasi kinerja anggaran belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025.

3.1.6 Sasaran Strategis 5 (SS.5)

SS.5

Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

".....Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah....."

Dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk memperkuat desentralisasi fiskal daerah dari sisi penerimaan pendapatan daerah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kualitas pemerintahan daerah dengan kondisi perekonomian kembali ke azas desentralisasi, yang berarti bahwa desentralisasi merupakan reformasi dari sisi kebijakan yang harus mempertimbangkan kualitas pemerintahan daerah menyerahkan wewenang. Dengan pemberian pengaturan desentralisasi fiskal pendapatan daerah melahirkan berbagai strategi dan kebijakan pemerintahan daerah untuk menggali potensi penerimaan daerah yang dikelompokkan pada Pendapatan Asli Daerah.

Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Walaupun otonomi dalam penggalian sumber-sumber yang menjadi potensi penerimaan PAD telah diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah, pemerintah pusat juga mengatur dan memberikan mandatori dana transfer ke daerah. Mandatori dana transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sehingga tercapai tujuan bernegara untuk mensejahterakan masyarakat dengan indikator PDRB riil per kapita juga meningkat. Bentuk dana transfer ke daerah antara lain dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah.

Transfer dana pemerintah dalam bentuk program tepat sasaran untuk masyarakat miskin dan melakukan pemantauan yang tepat untuk menangkap permasalahan di daerah dengan target pemerintah untuk mengurangi ketimpangan secara maksimal.

IKSS.5

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Formula Perhitungan IKSS.5:

$$\left(\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100 \% \right)$$

Dimana:

PAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah = Realisasi Pendapatan Daerah

3.1.6.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Pengukuran data kinerja IKSS.5 Triwulan III tahun 2025:

No.	Bulan	Realisasi 2025		Persentase (%)	Target Tahunan 2025
		Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah		
1.	Januari	610.363.668.637,67	240.196.687.137,67	39,353	48,45
2.	Februari	1.351.055.896.145,99	496.908.944.084,99	36,779	
3.	Maret	1.699.323.823.000,00	800.547.217.519,50	47,110	
4.	April	3.082.180.160.422,22	1.456.859.523.046,22	47,267	
5.	Mei	3.736.168.857.076,74	1.740.160.942.225,74	46,576	
6.	Juni	4.338.860.285.073,79	2.242.892.148.257,79	51,693	
7.	Juli	5.383.297.239.495,94	2.616.648.796.709,94	48,607	
8.	Agustus	6.498.375.238.175,03	2.920.093.633.483,03	44,936	
9.	September	6.543.538.055.895,93	3.201.572.841.453,93	48,927	

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah selama Triwulan III tahun 2025 secara month-to-month masih mempunyai ketergantungan yang cukup besar dari transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, hal ini dibuktikan nilai realisasi kontribusi PAD masih di bawah 50 %, kinerja pada bulan September

2025, dimana kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 48,927 %.

Capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 untuk Triwulan III tahun 2025 $= \frac{48,927}{48,450} \times 100 \% = 100,98 \%$

3.1.6.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan III tahun 2024.

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Triwulan III tahun 2024 ke Triwulan III tahun 2025 tergambar pada tabel berikut.

Periodesasi	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah		
	Juli	Agustus	September
Triwulan III 2024	52,817	47,897	50,217
Triwulan III 2025	48,607	44,936	48,927

Kontribusi PAD terbesar terhadap Pendapatan Daerah terjadi pada Bulan September tahun 2025 dengan memberikan kontribusi sebesar 48,927 %, namun kondisi ini mengalami penurunan pada Bulan September tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 50,217 %, mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan pembangunan dengan menggunakan dana APBD, Provinsi Sumatera Selatan masih mengharapkan sumber pembiayaan lainnya non APBD antara lain transfer ke daerah, investasi, CSR, KPBU dan *creative financing* lainnya.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.5	:	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
IKSS.5	:	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.699.323.823.000,00	47,110
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 4.338.860.285.073,79	51,693
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 6.543.538.055.895,93	48,927
4	Triwulan IV			

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 496.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.633.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93			
2	PENDAPATAN DAERAH	Rp 610.363.668.637,67	Rp 1.351.055.896.145,99	Rp 1.699.323.823.000,00	Rp 3.082.180.160.422,22	Rp 3.736.168.857.076,74	Rp 4.338.860.285.073,79	Rp 5.383.297.239.495,94	Rp 6.498.375.238.175,03	Rp 6.543.538.055.895,93			
% PAD terhadap Pendapatan Daerah		39,353	36,779	47,110	47,267	46,576	51,693	48,607	44,936	48,927			

$$\left(\frac{[Pendapatan Asli Daerah]}{Pendapatan Daerah} \times 100 \% \right)$$

Dimana :
PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Daerah : Realisasi pendapatan daerah

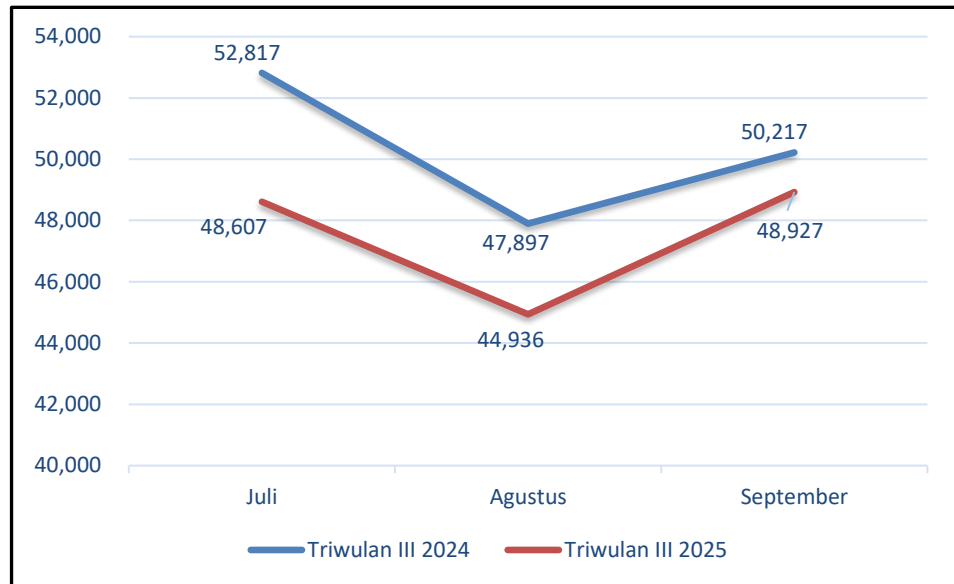
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024		
SS.5	:	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
IKSS.5	:	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

No.	Uraian	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 2.255.925.057.076,74	49,742
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 4.687.788.699.397,97	52,126
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 7.510.343.386.396,40	50,217
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 10.965.540.990.987,20	48,450

No.	URAIAN	TAHUN 2024											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.338.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	PENDAPATAN DAERAH	Rp 937.131.162.833,45	Rp 1.577.409.132.494,04	Rp 2.255.925.057.076,74	Rp 3.291.459.189.500,31	Rp 3.955.287.842.849,47	Rp 4.687.788.699.397,97	Rp 5.651.408.054.185,98	Rp 7.058.362.560.031,98	Rp 7.510.343.386.396,40	Rp 9.034.450.070.781,23	Rp 9.734.258.083.136,37	Rp 10.965.540.990.987,20
% PAD terhadap Pendapatan Daerah		37,840	44,683	49,742	52,049	52,026	52,126	52,817	47,897	50,217	46,124	48,085	48,450

$$\left(\frac{[Pendapatan Asli Daerah]}{Pendapatan Daerah} \times 100 \% \right)$$

Dimana :
PAD : Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Daerah : Realisasi pendapatan daerah



3.1.6.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Triwulan III tahun 2025, apabila dibandingkan dengan rencana target yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No.	Tahun	Realisasi Triwulan III		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	2025	3.201.572.841.453,93	6.543.538.055.895,93	48,927
dst				
2.	2030			55,64

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada Triwulan III tahun 2025 = $\frac{48,927}{55,64} \times 100 \% = 87,93 \%$

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,927	55,64	87,93

3.1.6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan data kinerja triwulan III tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera) tidak digunakan.

3.1.6.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN III 2025	REALISASI TRIWULAN III 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,230	48,927	95,505	Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah	
						Memperkuat sistem informasi teknologi secara bertahap terus membenahi sistem IT melalui kerjasama dengan pihak ketiga	
						Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru	
						Melakukan penagihan langsung kepada objek-objek pajak daerah di lapangan, seperti objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Alat Berat dan Pajak Air Permukaan (PAP) yang berada di semua Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Laut, TNI AL, Pol Airud terkait pengawasan peredaran penjualan bahan bakar kendaraan bermotor di perairan	
						Melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara persuasif	

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,230	48,927	95,505	1.140.000.000	150.000.000	13,16	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dalam menggali potensi Retribusi Daerah 2. Kerjasama kolaboratif bersama Agen Pemegang Merk Tunggal (ATPM) kendaraan bermotor 3. Kerjasama dengan Camat, Lurah dan Ketua RT setempat dalam rangka penagihan pajak daerah 4. Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor 5. Program kredit murah bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam keringanan berusaha 6. Memperluas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penambahan titik pelayanan baru seperti samsat desa dan samsat drive thru 7. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 8. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 9. Secara berkala melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas kendala dan permasalahan yang timbul di lapangan

3.1.6.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.6.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	51,230	48,927	95,505	1.140.000.000	150.000.000	13,16	

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Triwulan III tahun 2025 ini belum dihitung karena realisasi kinerja anggaran belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025.

3.1.7 Sasaran Strategis 6 (SS.6)

SS.6

Meningkatnya Pendapatan Daerah

".....Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat"

Pendekatan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan daerah pertama kali diterapkan di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Landasan kebijakan penerapan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di daerah menuju kemandirian fiskal daerah.

Dua dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mulai tahun 2001-2020 telah memberikan gambaran perekonomian daerah serta memberikan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ke depannya. Keleluasaan dalam kewenangan pemerintahan daerah untuk menggali sumber yang menjadi potensi pendapatan asli daerah terutama yang bersumber pada pendapatan pajak daerah, penerimaan melalui retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sumber pendapatan pajak daerah merupakan penerimaan terbesar dari penerimaan pendapatan asli daerah, dimana dalam perekonomian pajak memiliki peranan sebagai sumber penerimaan daerah dan juga sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dengan insentif fiskal daerah melalui pengurangan tarif pajak sehingga merangsang pertumbuhan investasi daerah.

Formula Perhitungan IKSS.6:

$$y = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Target PAD Tahun } n} \times 100 \%$$

Dimana:

y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD

Realisasi PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

Target PAD = Target PAD Tahun ke n yang ditetapkan dalam APBD

3.1.7.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Pengukuran data kinerja IKSS.6 Triwulan III tahun 2025:

No.	Bulan	Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)	Target Tahunan 2025
		Realisasi	Target		
1.	Januari	240.196.687.137,67	4.459.311.556.974,42	5,386	92,03
2.	Februari	496.908.944.084,99	4.459.311.556.974,42	11,143	
3.	Maret	800.547.217.519,50	4.459.311.556.974,42	17,952	
4.	April	1.456.859.523.046,22	4.459.311.556.974,42	32,670	
5.	Mei	1.740.160.942.225,74	4.642.152.890.474,00	37,486	
6.	Juni	2.242.892.148.257,79	4.642.152.890.474,00	48,316	
7.	Juli	2.616.648.796.709,94	4.642.152.890.474,00	56,367	
8.	Agustus	2.920.093.633.483,03	4.642.152.890.474,00	62,904	
9.	September	3.201.572.841.453,93	4.838.287.154.591,00	66,172	

Realisasi pengukuran data kinerja pencapaian PAD terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 secara month-to-month mengalami kenaikan.

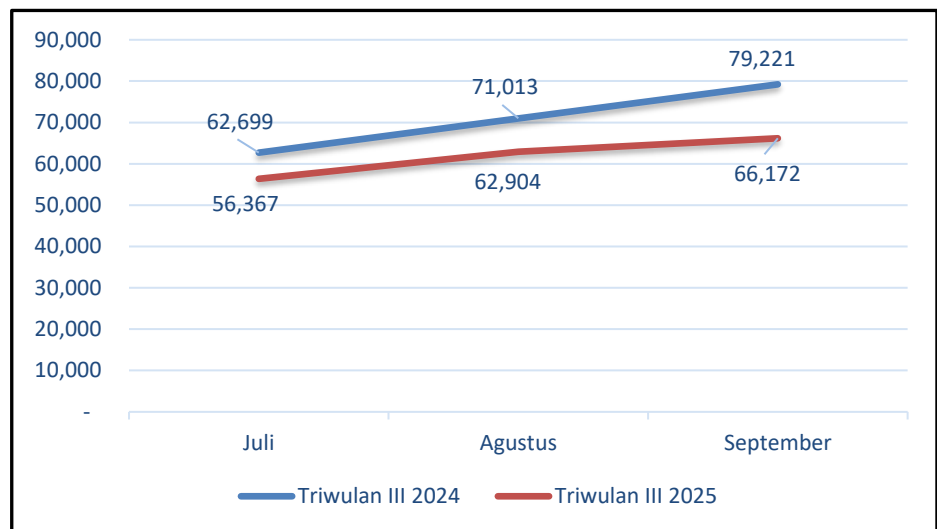
$$\text{Capaian kinerja} = \frac{66,172}{92,03} \times 100 \% = 71,90 \%$$

3.1.7.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan III tahun 2024

Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target Triwulan III tahun 2024 ke Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Periodesasi	Persentase Pencapaian Pendapatan Asli Daerah terhadap Target		
	Juli	Agustus	September
Triwulan III 2024	62,699	71,013	79,221
Triwulan III 2025	56,367	62,904	66,172

Realisasi capaian kinerja pencapaian PAD terhadap target Bulan September tahun 2025 mencapai 66,172 %. Capaian kinerja tertinggi terjadi pada Bulan September tahun 2025 sebesar 66,172 %, namun kondisi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Bulan September 2024 mencapai 79,221 %.



3.1.7.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja pencapaian PAD Triwulan III tahun 2025 dengan rencana target di dalam RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.6	:	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
IKSS.6	:	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Uraian	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 4.459.311.556.974,00	17,952
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 4.642.152.890.474,00	48,316
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 4.838.287.154.591,00	66,172
4	Triwulan IV			

$$y = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n}{Target\ PAD\ Tahun\ n} \times 100\%$$

Dimana :
y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD
RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n
Target Tahun = Target Pendapatan Tahun ke n

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 496.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.633.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93			
2	Target PAD	Rp 4.459.311.556.974,42	Rp 4.459.311.556.974,42	Rp 4.459.311.556.974,00	Rp 4.459.311.556.974,42	Rp 4.642.152.890.474,00	Rp 4.642.152.890.474,00	Rp 4.642.152.890.474,00	Rp 4.642.152.890.474,00	Rp 4.838.287.154.591,00			
% Realisasi PAD terhadap Target PAD		5,386	11,143	17,952	32,670	37,486	48,316	56,367	62,904	66,172			

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024		
SS.6	:	Meningkatnya Pendapatan Daerah
IKSS.6	:	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No.	Uraian	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 4.760.692.664.094,00	23,571
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 4.760.692.664.094,00	51,328
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.760.692.664.094,00	79,221
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 5.236.576.566.867,00	101,456

No.	URAIAN	TAHUN 2024											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.338.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	Target PAD	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 4.760.692.664.094,00	Rp 5.236.576.566.867,00	Rp 5.236.576.566.867,00	Rp 5.236.576.566.867,00
% Realisasi PAD terhadap Target PAD		7,449	14,805	23,571	35,986	43,224	51,328	62,699	71,013	79,221	79,575	89,385	101,456

$$y = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n}{Target\ PAD\ Tahun\ n} \times 100\%$$

Dimana :

y = Persentase Realisasi Pencapaian PAD

RP Tahun n = Realisasi PAD Tahun ke n

Target Tahun = Target Pendapatan Tahun ke n

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Persentase (%)
		Realisasi Triwulan III	Target	
1.	2025	3.201.572.841.453,93	4.838.287.154.591,00	66,172
dst				
2.	2030			N/A

Capaian realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target PAD dalam RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan pada akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	66,172	N/A	N/A

3.1.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan data kinerja triwulan III tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera) tidak digunakan.

3.1.7.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN III 2025	REALISASI TRIWULAN III 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75,00	66,172	88,23	Melakukan update pendataan wajib pajak untuk memperkuat pajak daerah dengan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Perluasan ekstensifikasi melalui pendaftaran objek wajib pajak baru dengan mengadakan kerjasama dengan perizinan setempat	
						Melakukan konsolidasi fiskal dengan Pemerintah Pusat untuk memberikan stimulus bagi perpajakan daerah	
						Melakukan percepatan dalam untuk mengejar target kinerja yang memiliki realisasi kinerja terendah antara lain melalui sinergi dan kolaborasi dengan pihak pemangku kepentingan lainnya	
						Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu	
						<i>Cascading</i> pohon kinerja dengan indikator mulai dari sasaran strategis, sasaran intermediate outcomes level ke n sampai dengan indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcomes dan indikator impact harus dijadikan tolok ukur kinerja Perangkat Daerah	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
7.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75,00	66,172	88,23	634.000.000	200.000.000	31,55	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Upaya <i>cross-cutting</i> bersama stakeholder Kepolisian dan Jasaraharja dalam penerimaan pajak PKB dan BBN-KB sudah optimal dengan penggunaan anggaran yang efisien 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan (OPAD) telah memberikan kontribusi nyata dalam mencapai kinerja pencapaian penerimaan PAD diatas 90%, e kinerja pegawai dengan SKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja 2. Pelaksanaan door to door service cukup efektif sebagai aktivitas nyata dalam rencana aksi AKIP 3. Kolaboratif baik internal dan eksternal bagi upaya peningkatan kinerja organisasi 4. Memanfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal 5. Pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) secara gabungan dengan stakeholder terkait dan secara berkala waktu 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah

3.1.7.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.7.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	75,00	66,172	88,23	634.000.000	200.000.000	31,55	

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Triwulan III tahun 2025 ini belum dihitung karena realisasi kinerja anggaran belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025.

3.1.8 Sasaran Strategis 7 (SS.7)

SS.7

Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB

".....Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah"

Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah suatu produk pada suatu waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik daerah timbul sebagai akibat adanya berbagai aktivitas perekonomian periode tertentu tanpa mempertimbangkan faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (BPS Indonesia;2024). Dari sisi lapangan usaha, PDRB merupakan akumulasi dari seluruh komponen pembentuk nilai tambah bruto yang mampu dihasilkan oleh setiap lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income).

Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Formula Perhitungan IKSS.7:

$$Rasio = \frac{Realisasi\ PAD}{Realisasi\ PDRB\ Non\ Migas} \times 100\ %$$

Dimana:

PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB = Realisasi PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas

3.1.8.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Pengukuran data kinerja IKSS.7 Triwulan III tahun 2025:

No.	Bulan	Uraian		Persentase (%)	Target Tahunan 2025
		Realisasi PAD	Realisasi PDRB Non Migas		
1.	Januari	240.196.687.137,67	51.717.800.000.000,00	0,464	0,96
2.	Februari	496.908.944.084,99	103.435.600.000.000,00	0,480	
3.	Maret	800.547.217.519,50	155.153.400.000.000,00	0,516	
4.	April	1.456.859.523.046,22	208.558.180.000.000,00	0,699	
5.	Mei	1.740.160.942.225,74	261.962.960.000.000,00	0,664	
6.	Juni	2.242.892.148.257,79	320.428.680.000.000,00	0,700	
7.	Juli	2.616.648.796.709,94	374.956.641.111.111,00	0,698	
8.	Agustus	2.920.093.633.483,03	429.484.602.222.222,00	0,680	
9.	September	3.201.572.841.453,93	490.751.650.000.000,00	0,652	

Realisasi kinerja IKSS.7 Triwulan III tahun 2025 secara month-to-month menunjukkan kenaikan secara bertahap yang mengindikasikan kinerja positif kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan realisasi sebesar 0,652 %.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{0,652}{0,960} \times 100\ % = 67,92\ %$$

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025		
SS.7	:	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS.7	:	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB Non Migas	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 155.153.400.000.000	0,516
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 320.428.680.000.000	0,700
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 490.751.650.000.000	0,652
4	Triwulan IV			

$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ Non\ Migas} \times 100\%$$

Dimana :
Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
PDRB = PDRB Non Migas

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 496.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.533.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93			
2	Realisasi PDRB Non Migas	Rp 51.717.800.000.000,00	Rp 77.576.700.000.000,00	Rp 155.153.400.000.000,00	Rp 210.245.160.000.000,00	Rp 237.791.040.000.000,00	Rp 320.428.680.000.000,00	Rp 377.203.003.333.333,00	Rp 405.590.165.000.000,00	Rp 490.751.650.000.000,00			
% Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas		0,464	0,641	0,516	0,693	0,732	0,700	0,694	0,720	0,652			

	PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
SS.7	: Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS.7	: Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB Non Migas	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 141.637.750.000.000	0,792
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 292.449.210.000.000	0,836
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 448.972.980.000.000	0,840
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 602.503.020.000.000	0,882

$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ Non\ Migas} \times 100\%$$

Dimana :
Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
PDRB = PDRB Non Migas

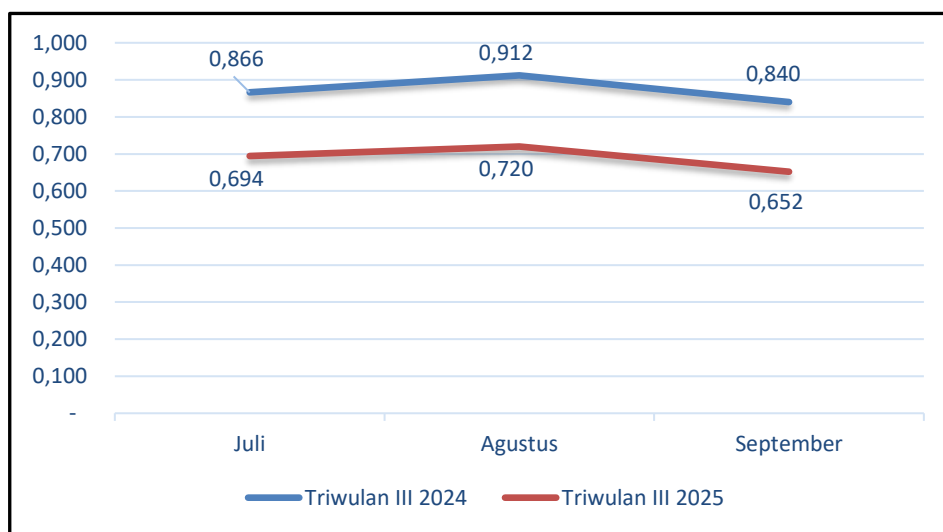
No.	URAIAN	TAHUN 2024											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.336.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	Realisasi PDRB Non Migas	Rp 47.212.583.333.333,30	Rp 70.818.875.000.000,00	Rp 141.637.750.000.000,00	Rp 191.908.236.666.667,00	Rp 217.043.480.000.000,00	Rp 292.449.210.000.000,00	Rp 344.623.800.000.000,00	Rp 370.711.095.000.000,00	Rp 448.972.980.000.000,00	Rp 500.149.660.000.000,00	Rp 525.738.000.000.000,00	Rp 602.503.020.000.000,00
% Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas		0,751	0,995	0,792	0,893	0,948	0,836	0,866	0,912	0,840	0,833	0,890	0,882

3.1.8.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan III tahun 2024

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas Triwulan III tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

Periodesasi	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas		
	Juli	Agustus	September
Triwulan III 2024	0,866	0,912	0,840
Triwulan III 2025	0,694	0,720	0,652

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas secara *month-to-month* terbesar terjadi pada Bulan Agustus tahun 2025 sebesar 0,720 % dan kontribusi terendah pada Bulan September tahun 2025 sebesar 0,652 %.



3.1.8.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2025-2030 sebagai berikut:

No.	Tahun	Realisasi Triwulan III		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	2025	3.201.572.841.453,93	490.751.650.000.000,00	0,652
dst				
2.	2030			N/A

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,652	N/A	N/A

3.1.8.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan data kinerja triwulan III tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera) tidak digunakan.

3.1.8.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN III 2025	REALISASI TRIWULAN III 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,750	0,652	86,933	Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru	Diperlukan menciptakan peluang investasi daerah mendorong investor dengan memberikan insentif fiskal daerah
						Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan	Diperlukan Kerjasama dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih atau Posko Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan sampai ke wilayah pedesaan
						Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Mengadakan Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Bersama dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
						Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal	Melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian atas kecurangan terhadap kebocoran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
						Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat secara massif dan berkala waktu
						Belum optimalnya pelaksanaan atas rekomendasi dari KPK	Pendampingan tim korusupgah KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025			FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,75	0,652	86,933	300.000.000	0,00	0,00	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat secara intensif (kolaboratif) memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana transfer pusat bisa terealisasi 3. Penyaluran dana bagi hasil pemerintah pusat dengan system <i>treasury deposit facility</i> cukup efisien <u>Faktor Penghambat:</u> 1. Perlambatan perekonomian Sumatera Selatan yang menyebabkan PDRB riil per kapita mengalami perlambatan yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru 2. Belum optimalnya penagihan pajak daerah sampai ke titik pelayanan wilayah pedesaan 3. Perlambatan daya serap anggaran sinergi Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di sektor pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah belum berjalan secara optimal 5. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak daerah belum optimal 6. Belum optimalnya penggalan sumber potensi yang menjadi penerimaan Retribusi Daerah 7. Pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB memerlukan kebijakan equivalen dengan pembayaran pajak sesuai UU 28/2009 8. Belum optimalnya sinergi Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) perairan dan daratan

3.1.8.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.1.6.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	0,75	0,652	86,933	300.000.000	0,00	0,00	

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Triwulan III tahun 2025 ini belum dihitung karena realisasi kinerja anggaran belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025.

Formula Perhitungan IKSS.8:

$$Rasio = \frac{Realisasi\ PAD}{Realisasi\ PDRB\ PKPD}$$

Dimana:

PAD = Realisasi PAD Tahun ke n

PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pola opsen PKB dan opsen BBNKB diharapkan menjadi sumber kekuatan pajak daerah yang berdasarkan basis data pajak daerah berdasarkan domisili penduduk. Penguatan basis data pajak daerah ini diharapkan mampu mendorong kemandirian daerah dalam menggali potensi pajak daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

3.1.8.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Pengukuran data kinerja IKSS.8 Triwulan tahun 2025:

No.	Bulan	Uraian		Rasio	Target Tahunan 2025
		Realisasi PAD	Realisasi PDRB PKPD		
1.	Januari	240.196.687.137,67	154.392.592.592,59	1,556	1,12
2.	Februari	496.908.944.084,99	308.785.185.185,19	1,609	
3.	Maret	800.547.217.519,50	463.177.777.777,78	1,728	
4.	April	1.456.859.523.046,22	632.988.518.518,52	2,302	
5.	Mei	1.740.160.942.225,74	802.799.259.259,26	2,168	
6.	Juni	2.242.892.148.257,79	1.018.864.444.444,44	2,201	
7.	Juli	2.616.648.796.709,94	1.194.929.444.444,44	2,190	
8.	Agustus	2.920.093.633.483,03	1.370.994.444.444,44	2,130	
9.	September	3.201.572.841.453,93	1.584.585.000.000,00	2,020	

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah secara *month-to-month* Triwulan tahun 2025 tertinggi terjadi pada Bulan April 2025 sebesar 2,302 dan terendah terjadi pada Bulan Januari 2025 sebesar 1,556.

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{2,020}{1,12} \times 100 \% = 180,36 \%$$

3.1.8.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 serta Capaian Kinerja Dengan Triwulan III tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SS.7	:	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS.8	:	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB PKPD	Rasio PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 800.547.217.519,50	Rp 463.177.777.778	1,728
2	Triwulan II	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 1.018.864.444.444	2,201
3	Triwulan III	Rp 3.201.572.841.453,93	Rp 1.584.585.000.000	2,020
4	Triwulan IV			

$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ PKPD}$$

Dimana :
Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 240.196.687.137,67	Rp 496.908.944.084,99	Rp 800.547.217.519,50	Rp 1.456.859.523.046,22	Rp 1.740.160.942.225,74	Rp 2.242.892.148.257,79	Rp 2.616.648.796.709,94	Rp 2.920.093.633.483,03	Rp 3.201.572.841.453,93			
2	Realisasi PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rp 154.392.592.592,59	Rp 231.588.888.888,89	Rp 463.177.777.777,78	Rp 648.406.666.666,67	Rp 741.021.111.111,11	Rp 1.018.864.444.444,44	Rp 1.207.437.962.962,96	Rp 1.301.724.722.222,22	Rp 1.584.585.000.000,00			
Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah		1,556	2,146	1,728	2,247	2,348	2,201	2,167	2,243	2,020			

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024		
SS.7	:	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
IKSS.8	:	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Jumlah PAD	Jumlah PDRB PKPD	Rasio PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Triwulan I	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 407.138.333.333	2,756
2	Triwulan II	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 970.850.000.000	2,517
3	Triwulan III	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 1.511.552.222.222	2,495
4	Triwulan IV	Rp 5.312.800.889.308,22	Rp 2.276.276.666.667	2,334

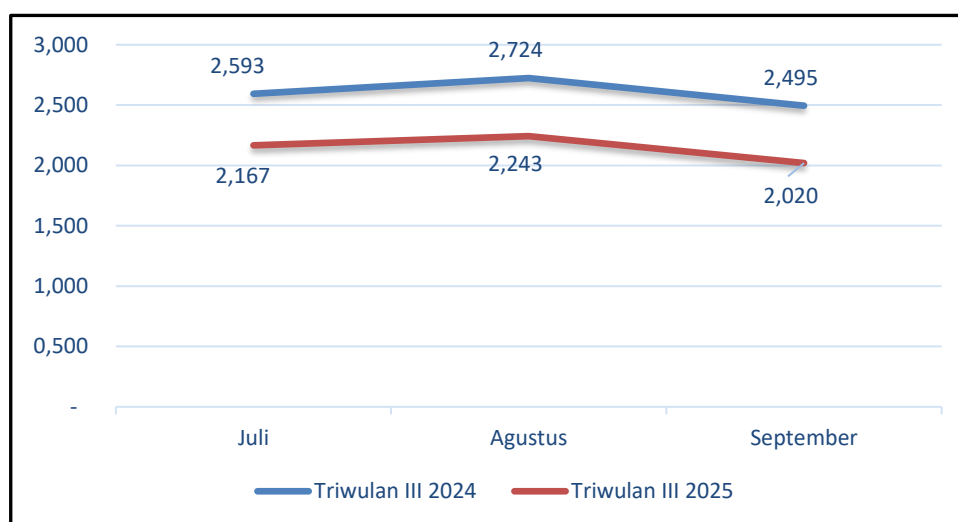
$$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ PKPD}$$

Dimana :
Jumlah PAD = Realisasi PAD Tahun ke n
PDRB PKPD = PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

No.	URAIAN	TAHUN 2025											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Realisasi PAD	Rp 354.608.679.033,45	Rp 704.840.979.094,04	Rp 1.122.151.001.139,74	Rp 1.713.171.553.045,31	Rp 2.057.782.467.083,47	Rp 2.443.560.523.015,97	Rp 2.984.883.336.204,98	Rp 3.380.719.250.288,98	Rp 3.771.454.218.670,40	Rp 4.167.007.196.552,23	Rp 4.680.704.704.427,37	Rp 5.312.800.889.308,22
2	Realisasi PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rp 135.712.777.777,78	Rp 203.569.166.666,67	Rp 407.138.333.333,33	Rp 595.042.222.222,22	Rp 688.994.166.666,67	Rp 970.850.000.000,00	Rp 1.151.084.074.074	Rp 1.241.201.111.111	Rp 1.511.552.222.222,22	Rp 1.766.460.370.370	Rp 1.893.914.444.444,44	Rp 2.276.276.666.666,67
Rasio PAD terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah		2,613	3,462	2,756	2,879	2,987	2,517	2,593	2,724	2,495	2,359	2,471	2,334

Periodesasi	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah		
	Juli	Agustus	September
Triwulan III 2024	2,593	2,724	2,495
Triwulan III 2025	2,167	2,243	2,020

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi pada Bulan Agustus tahun 2025 mencapai 2,243 dan terendah terjadi pada Bulan September tahun 2025 sebesar 2,020.



3.1.8.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029

No.	Tahun	Realisasi Triwulan III		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	2025	3.201.572.841.453,93	1584.585.000.000,00	2,020
dst				
2.	2030			N/A

Capaian kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah terhadap rencana jangka menengah RPJMD tahun 2025-2029 tidak dapat dihitung, hal ini dikarenakan indikator ini tidak dilanjutkan sampai akhir periode RPJMD tahun 2025-2029.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Triwulan III 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	2,020	N/A	N/A

3.1.8.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan data kinerja triwulan III tahun 2025 dengan standar nasional (perbandingan 10 Provinsi se Sumatera) tidak digunakan.

3.1.8.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN III 2025	REALISASI TRIWULAN III 2025	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,115	2,020	181,166	Memberikan program keringanan tarif Pajak Kendaraan Bermotor Progresif berupa tarif Rp. 0	
						Memfaatkan teknologi untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak daerah seperti, pembayaran secara non tunai menggunakan mesin EDC, QRIS serta pengembangan pembayaran pajak melalui modern kanal	
						Penempelan stiker tanda lunas di kendaraan bermotor sebagai inovasi pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak	
						Pembentukan Satgas PBB-KB pada perairan/laut di Provinsi Sumatera Selatan	
						Kerjasama dengan Dirlantas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor	
						Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan Opsen PKB, Opsen BBN-KB serta Opsen MBLB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan door to door service	

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			DUKUNGAN ANGGARAN TRIWULAN III TAHUN 2025			FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	1,115	2,020	181,166	500.000.000	150.000.000	30,00	<u>Kriteria kinerja > 90% realisasi anggaran < 90%</u> 1. Untuk menghasilkan kinerja >90% diperlukan realisasi anggaran < 90%, telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya (anggaran) berbasis kinerja; 2. Program keringan pajak daerah dan insentif pajak daerah menstimulus PAD 3. Penyerapan anggaran berbasis accrual telah memadai dalam rangka memonitoring penyerapan anggaran berbasis kinerja 4. Perhitungan nilai efisien sumber daya (anggaran) dimulai sejak penyusunan rancangan awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) <u>Faktor Pendukung:</u> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui pendidikan formal dan informal secara bertahap 2. Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor telah di update dalam system informasi pembayaran pajak daerah 3. Mengendalikan tindak pengendalian atas perhitungan beban tariff pajak, denda pajak dan bunga pajak 4. Kolaboratif bersama dengan pihak Kepolisian dalam penertiban kendaraan bermotor 5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah 6. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari masing- masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain dalam bentuk peningkatan penyertaan modal kepada masing-masing BUMD di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan

3.1.8.2.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.8.2.5.1 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Terhadap Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025			ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN				
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1,115	2,020	181,166	500.000.000	150.000.000	30,00	

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja Triwulan III tahun 2025 ini belum dihitung karena realisasi kinerja anggaran belum selesai sampai dengan akhir tahun 2025.



Kesimpulan dan Saran Rekomendasi

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja terhadap beberapa indikator sebagaimana tertuang di dalam Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra tahun 2025-2029, dimana kinerja Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

I. Hasil pengukuran indikator tujuan dan sasaran strategis:

1. Indikator indeks kapasitas fiskal daerah mencapai nilai indeks 3,112
2. Indikator deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (*Revenue Mobilization*) mencapai 28,2048 % (deviasi belum baik karena belum mendekati garis normal)
3. Indikator indeks kemandirian fiskal daerah mencapai nilai indeks 0,490
4. Indikator pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD mempunyai kontribusi sebesar 12,873 %
5. Indikator rasio pajak daerah terhadap PDRB mempunyai kontribusi sebesar 0,928 %
6. Indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah mempunyai kontribusi sebesar 48,927 %
7. Indikator persentase realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai realisasi sebesar 66,172 %
8. Indikator persentase rasio PAD terhadap PDRB Non Migas mempunyai kontribusi sebesar 0,652 %
9. Indikator rasio PAD terhadap PDRB pengeluaran konsumsi pemerintah daerah mempunyai kontribusi sebesar 2,020

B. Saran Rekomendasi

Berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah yang telah dicapai pada Triwulan III tahun 2025, berikut saran dan rekomendasi yang bersifat evaluasi perbaikan internal dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja yang perlu ditingkatkan pada Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

1. Terhadap hasil pengukuran indikator tujuan dan sasaran strategis:
 - a. Sasaran penguatan sumber daya manusia internal:
 - ❖ Peningkatan atas pemahaman, komitmen dan implementasi terhadap kinerja mulai dari pejabat eselon III sampai ke level staf pelaksana
 - ❖ Setiap individu pegawai mempunyai tanggungjawab atas produk hasil kinerja untuk berkontribusi baik untuk Perangkat Daerah maupun masyarakat
 - ❖ Lakukan kerja dengan pola kemitraan yang kreatif dengan stakeholder lainnya sehingga dapat menjadi faktor pendorong dalam upaya peningkatan kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah
 - ❖ Tingkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mencapai kinerja sasaran strategis yang ingin dicapai
 - ❖ Segera melaksanakan dan perbaikan kinerja sehingga tidak terjadi deviasi keterlambatan kinerja sebagaimana pada Triwulan III tahun 2025 namun tetap dalam koridor dan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah dari sisi pendapatan:
 - ❖ Sinergi dan Kolaborasi terkait dengan pendanaan serta pelaksanaan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dengan 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan kegiatan antara lain sosialisasi dan edukasi, pendataan bersama, pelaksanaan razia bersama, pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
 - ❖ Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPAD) melalui satuan tugas bersama stakeholder terkait antara lain Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal serta 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - ❖ Melaksanakan Koordinasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah per wilayah 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
 - ❖ Pelaksanaan *door to door service*, optimalisasi pendapatan sektor pajak bahan bakar dan operasi gabungan dengan Tim Pembina Samsat Provinsi

- ❖ Peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan intensifikasi pajak daerah
- ❖ Penguatan basis data pajak daerah
- ❖ Pengawasan berbasis risiko serta penguatan pengendalian sistem intern pemerintah sektor pajak daerah
- ❖ Perluasan akses keuangan digital dengan peningkatan pembayaran pajak daerah secara non tunai
- ❖ Meningkatkan pengendalian intern dan menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai kinerja yang optimal

2. Terhadap kinerja anggaran:

- a. Percepatan dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan serta pendanaan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis PD, terutama pada capaian kinerja yang masih rendah untuk diterus ditingkatkan pada periode berikutnya
- b. Peningkatan dan konsistensi penyerapan anggaran untuk menghasilkan produktivitas yang efisien dalam mendukung kinerja indikator tujuan dan sasaran strategis

Palembang, 01 Oktober 2025


**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**
D. H. ACELMAD RIZWAN, S. STP., M. M
 PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
 NIP. 19810923 200012 1 001

LAMP IRAN

GRAFIK KURVA "S"
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Posisi : Triwulan III Tahun Anggaran 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN [Rp.]	BOBOT (%)	REALISASI [Rp.]	% Realisasi	% Tertimbang	BULAN / RENCANA / REALISASI AGREGAT PER PAGU PERANGKAT DAERAH (dalam %)																												KETERANGAN
					Penyerapan	Anggaran Per Kegiatan	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember						
					s.d saat ini	s.d saat ini	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real	Renc	Real					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranokak Daerah	174.300.000	0,08	98.055.116,00	0,04	0,04	2,00	-	3,00	-	15,00	-	5,00	-	10,00	0,00	15,00	-	10,00	0,00	5,00	0,00	10,00	0,01	10,00		5,00		10,00						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	168.827.292.000	72,78	137.776.114.439,00	59,39	59,39	2,00	1,93	3,00	0,90	15,00	4,56	5,00	1,86	10,00	7,43	15,00	3,79	10,00	8,45	5,00	2,10	10,00	0,01	10,00		5,00		10,00						
3	Administarsi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	16.600.000	0,01	5.504.000,00	0,00	0,00	2,00	-	3,00	-	15,00	-	5,00	-	10,00	-	15,00	-	10,00	0,00	5,00	-	10,00	-	10,00		5,00		10,00						
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	319.180.000	0,14	224.233.306,00	0,10	0,10	2,00	-	3,00	-	15,00	-	5,00	-	10,00	0,02	15,00	0,00	10,00	0,01	5,00	0,00	10,00	0,01	10,00		5,00		10,00						
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	936.843.524	0,40	429.603.060,00	0,19	0,19	2,00	-	3,00	-	15,00	-	5,00	-	10,00	0,01	15,00	0,01	10,00	0,03	5,00	0,00	10,00	0,00	5,00		5,00		10,00						
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.892.747.920	9,87	19.586.238.672,00	8,44	8,44	2,00	-	3,00	-	15,00	-	5,00	0,49	10,00	2,02	15,00	0,06	10,00	0,48	5,00	0,77	10,00	1,05	10,00		5,00		10,00						
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.000.000	0,47	998.219.017,00	0,43	0,43	2,00	-	3,00	-	15,00	-	5,00	-	10,00	-	15,00	-	10,00	-	5,00	-	10,00		10,00		5,00		10,00						
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.160.520.204	10,85	22.299.748.124,00	9,61	9,61	2,00	0,09	3,00	0,33	15,00	0,59	5,00	0,24	10,00	0,68	15,00	0,79	10,00	0,96	5,00	1,12	10,00	0,62	10,00		5,00		10,00						
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.039.355.386	3,03	5.354.305.629,00	2,31	2,31	2,00	-	3,00	-	15,00	-	5,00	-	10,00	0,07	15,00	0,11	10,00	0,11	5,00	0,18	10,00	0,25	10,00		5,00		10,00						
10	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	115.000.000	0,05	106.826.431,00	0,05	0,05	2,00	-	3,00	-	15,00	-	5,00	-	10,00	0,00	15,00	-	10,00	-	5,00	-	10,00	0,01	10,00		5,00		10,00						
11	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.398.909.010	2,33	3.139.393.968,00	1,35	1,35	2,00	-	3,00	-	15,00	0,00	5,00	0,00	10,00	0,32	15,00	0,05	10,00	0,25	5,00	0,02	10,00	0,07	10,00		5,00		10,00						
	JUMLAH	231.980.748.044	100,00	190.018.241.762,00	81,91	81,91																													
							2,00		3,00		15,00		5,00		10,00		15,00		10,00		5,00		10,00			9,55		5,45		10,00					
									5,00		20,00		25,00		35,00		50,00		60,00		65,00		75,00			84,55		90,00		100,00					
								2,01		1,23		5,15		2,59		10,55		4,81		10,28		4,20		2,03											
										3,25		8,40		10,99		21,54		26,35		36,63		40,84		42,86											
								0,01		(1,77)		(9,85)		(2,41)		0,55		(10,19)		0,28		(0,80)		(7,97)											
										(1,75)		(11,60)		(14,01)		(13,46)		(23,65)		(23,37)		(24,16)		(32,14)											

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

[illegible]

